

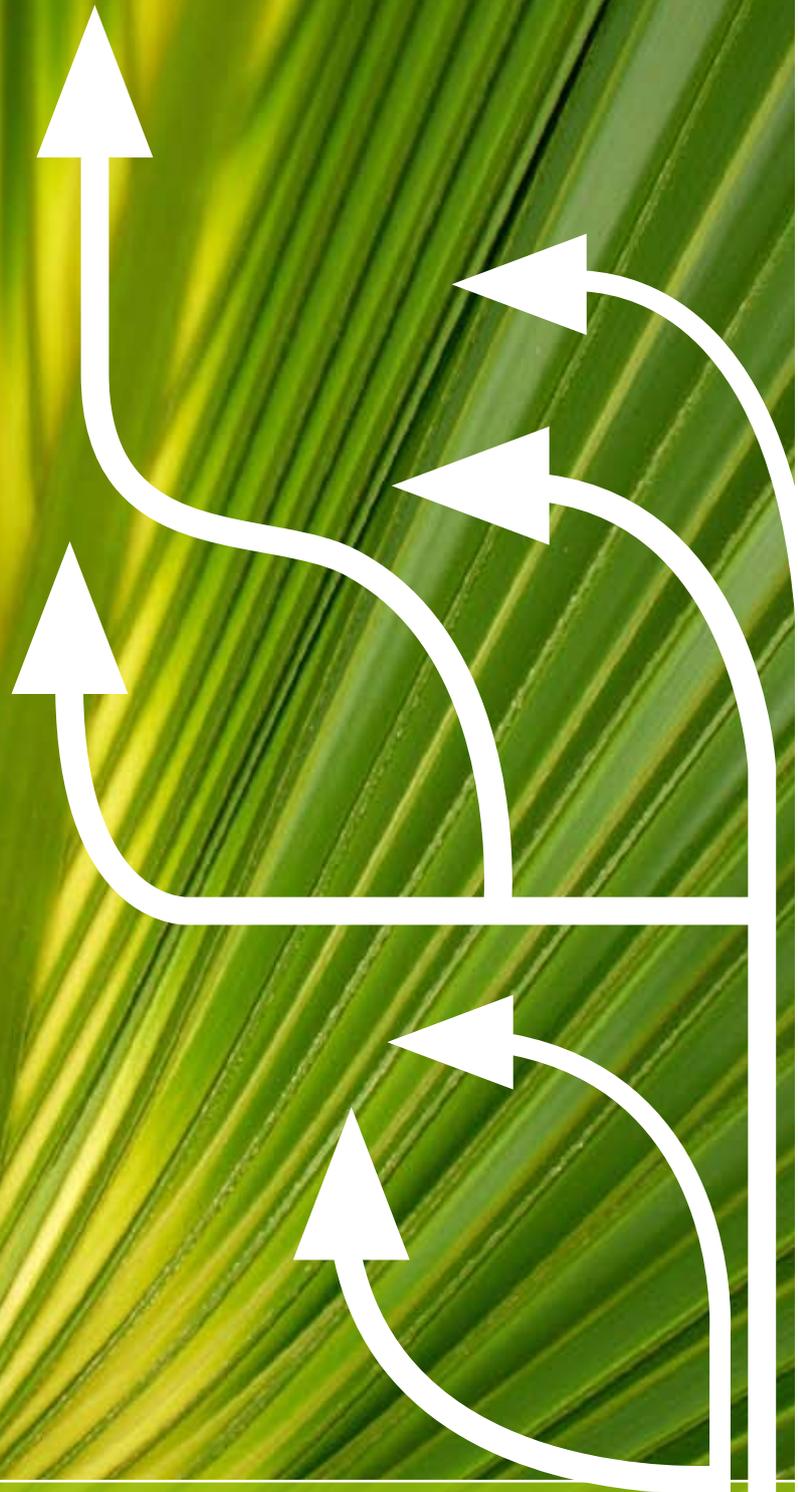


**WWF**

**BUSINESS  
REPORT**

HoB NI

**2011**



# SOLUSI BISNIS: MEWUJUDKAN DEKLARASI HEART OF BORNEO

FOKUS PADA KEHUTANAN, KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN

KERJASAMA DENGAN PWC

# HEART OF BORNEO - JARINGAN BISNIS HIJAU

Di WWF kami meyakini adanya solusi terhadap tantangan-tantangan lingkungan dengan cara bekerjasama dengan bisnis, pemerintah dan masyarakat.

Selama bertahun-tahun WWF mendukung Deklarasi Heart of Borneo (HoB) yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei pada tahun 2007 untuk melestarikan dan mengelola 22 juta hektar hutan alam yang luas yang masih utuh secara berkelanjutan.

WWF menyadari bahwa bisnis mempunyai peran yang vital, itulah sebabnya Jaringan Bisnis Hijau HoB (HoB Green Business Network (GBN)) dibentuk untuk mendorong perubahan tindakan bisnis terhadap konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan di HoB.

GBN dimaksudkan sebagai alat dan dukungan bagi dunia bisnis yang bersedia bekerja untuk masa depan berkelanjutan HoB. Dengan bekerja secara bersama kita dapat menjaga sumber daya alam yang merupakan modal bisnis Anda dan mengembangkan reputasi internasional untuk HoB sebagai tempat untuk menjalankan bisnis hijau dan berkelanjutan.

Kami bermaksud untuk bekerja bersama dengan:

**Bisnis yang mengoperasikan, mendanai atau mendapatkan sumberdaya material/bahan di HoB:** GBN berdedikasi untuk mengkomunikasikan informasi yang perlu diketahui oleh bisnis Anda; bagaimana pemerintah akan menjabarkan dan menerapkan “pemakaian lahan yang berkelanjutan” di sektor Anda? Bagaimana Anda dapat mengakses pendanaan karbon dengan cara memperbaiki manajemen yang berkelanjutan pada konsesi Anda? Apa yang dilakukan pihak lain di sektor Anda tentang keberlanjutan?

Kami juga bermaksud untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan berbagai solusi bagi pengembangan bisnis yang menguntungkan dan berkelanjutan di HoB. Laporan ini menyertai peluncuran Heart of Borneo Green Business Network (Jaringan Bisnis Hijau Heart of Borneo) dan secara khusus ditujukan pada tiga sektor bisnis utama di HoB: kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan.

**Organisasi lain yang berkomitmen untuk mendukung hutan, iklim dan masyarakat:** GBN diprakarsai oleh WWF tetapi jaringan ini dibangun untuk mawadahi organisasi organisasi yang dapat mendukung bisnis yang berkelanjutan di HoB. Mungkin Anda memiliki bidang usaha yang berminat untuk berbagi sumberdaya keuangan dan keterampilan, suatu bisnis konsultasi yang ingin menawarkan nasihat yang berkelanjutan, sebuah donor yang mencari dukungan mekanisme konservasi sektor swasta yang inovatif atau sebuah LSM yang juga bekerja untuk menghadirkan solusi bisnis yang berkelanjutan di HoB.

Laporan ini serta strategi terkait untuk GBN merupakan hasil dari wawancara dan survei yang luas yang mencakup lebih dari 80 perusahaan yang saat ini beroperasi di dalam dan di sekitar area fokus HoB. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah mereka luangkan dan kami mengharapkan agar laporan ini, yang menyertakan contoh praktik terbaik saat ini untuk bisnis yang berkelanjutan, dapat menjadi awal dialog tentang solusi yang mengantarkan bisnis di HoB ke praktik yang berkelanjutan yang sesungguhnya.

Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kunjungi [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork) tentang bagaimana bisnis Anda dapat mendapatkan manfaat dari GBN atau email: [borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org) untuk menambahkan keterangan tentang Anda dalam daftar distribusi kami.

CARI TAHU APAKAH ANDA  
ADA DI HOB:

KETAHUI PENGARUH  
ANDA:

DAPATKAN SOLUSI YANG  
TEPAT BAGI USAHA  
ANDA:

BERBAGI IDE DAN  
PENGALAMAN :

BEKERJA BERSAMA  
PEMERINTAH:

## Tabel berikut menganjurkan 5 langkah awal yang dapat diambil oleh perusahaan serta komitmen dari WWF untuk mendukungnya.

### Rekomendasi bagi perusahaan-perusahaan di Borneo

### Solusi WWF

Kunjungi situs web [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork) di mana Anda dapat melihat peta batas HoB dan mempelajari tentang komitmen dan program pemerintah untuk mendukung bisnis yang berkelanjutan di HoB.

WWF akan menyimpan informasi on-line tentang informasi terkini di HoB dan dapat membantu Anda memahami bagaimana Deklarasi HoB bisa relevan untuk operasi Anda.

Pahami pengaruh industri Anda pada HoB dan risiko serta kesempatan terkait bagi usaha Anda. Bab 2-4 laporan ini memberikan informasi lanjut tentang pengaruh khusus sektor dan pandangan dari perusahaan lain tentang kasus bisnis untuk praktik yang berkelanjutan.

WWF akan memberikan pandangan industri pro-keberlanjutan yang berimbang tentang pengaruh dari sektor kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan di HoB.

Terdapat banyak hal yang dapat dilakukan oleh bisnis untuk mendukung konservasi dan pengembangan yang berkelanjutan. Kami yakin bahwa solusi-solusi ini dapat diterima baik bagi bisnis maupun bagi bumi kita. Informasi tentang solusi untuk lingkungan yang baik dan praktik sosial dimasukkan dalam Bab 2-4 laporan ini dan juga tersedia di: [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork).

Situs web WWF tentang HoB akan memberikan informasi tentang solusi bagi industri Anda termasuk: contoh praktik yang baik, peralatan, pelatihan, kesempatan pencarian dana serta hubungan ke sumberdaya tambahan.

Tentang keberlanjutan dengan perusahaan lain melalui keikutsertaan dalam daftar anggota (mail list) GBN WWF. Email: [borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org) untuk informasi lebih lanjut.

WWF mendukung perusahaan yang ingin lebih berkelanjutan dan mendirikan the Heart of Borneo Green Business Network untuk berbagi ide dan praktik terbaik dengan semua perusahaan yang berminat. Kami ingin mengetahui dari Anda tentang alat dan pelatihan apa yang dapat kami berikan untuk mendukung usaha selanjutnya. Email: [borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org).

HoB adalah suatu inisiatif yang dipimpin oleh pemerintah. Banyak di antara Anda mengatakan kepada kami bahwa Anda ingin lebih terlibat lagi dengan pemerintah tentang kemungkinan perubahan dalam kebijakan dan peraturan dan struktur insentif baru yang akan memudahkan bagi perusahaan untuk disampaikan dalam Deklarasi HoB.

WWF berketetapan untuk bekerja dengan perusahaan dan pemerintah untuk mendukung pengembangan kebijakan dan insentif untuk disampaikan dalam Deklarasi HoB. Beritahukanlah kepada kami apa yang dapat kami bantu untuk difasilitasi untuk menyatukan sektor swasta dan publik untuk secara bersama-sama mencari solusi yang terbaik untuk usaha, masyarakat dan lingkungan.

# UCAPAN TERIMA KASIH

WWF mengucapkan terima kasih kepada tim Keberlanjutan dan Perubahan Iklim Global PwC (Sustainability and Climate Change team), termasuk para mitra dan staf dari Indonesia, Malaysia dan UK (Kerajaan Inggris Raya) atas bantuan mereka yang terutama difokuskan pada keterlibatan dalam usaha di HoB dan melakukan penelitian dan analisa. Peran PricewaterhouseCoopers telah berperan dalam pengumpulan dan penyusunan data maupun fakta yang diserahkan kepada WWF.

WWF juga ingin mengucapkan terima kasih kepada banyak perusahaan yang beroperasi dalam sektor kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan di Borneo yang telah meluangkan waktu untuk ikut serta dalam wawancara, survei dan lokakarya yang telah membantu memberi masukan dalam laporan ini – kami mengharapkan dapat bekerjasama dengan Anda sekalian untuk mewujudkan masa depan yang berkelanjutan bagi Borneo.

## TENTANG LAPORAN INI

Data dalam laporan ini memberikan pandangan WWF yang terbaik yang ada mengenai situasi saat ini di HoB. Kami menyadari bahwa tidak semua data kami lengkap dan kami juga tidak mengharapkan untuk mewakili pandangan dari semua bisnis di HoB. Kami telah melakukan usaha terbaik dan menyuguhkan data di sini dengan itikad baik dan mengaharapkan agar laporan ini dapat memulai suatu diskusi yang konstruktif antara pelaku usaha, LSM dan pemerintah untuk lebih membawa keberlanjutan di HoB. Bila Anda mempunyai komentar atau usul untuk bagaimana kami dapat memperbaiki pengumpulan data dan pelibatan pemangku kepentingan di kemudian hari, kami ingin mendapatkan masukan dari Anda semua. Silakan kirim email kepada kami di: [borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org).





# ISI

---

<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>6</b>
<b>BAB 1: Heart of Borneo</b>	<b>9</b>
<b>BAB 2: Solusi bisnis untuk hutan yang berkelanjutan di Borneo</b>	<b>21</b>
<b>BAB 3: Solusi bisnis untuk kelapa sawit yang berkelanjutan di Borneo</b>	<b>45</b>
<b>BAB 4: Solusi bisnis untuk pertambangan yang bertanggungjawab di Borneo</b>	<b>65</b>
<b>KONTAK WWF</b>	<b>82</b>



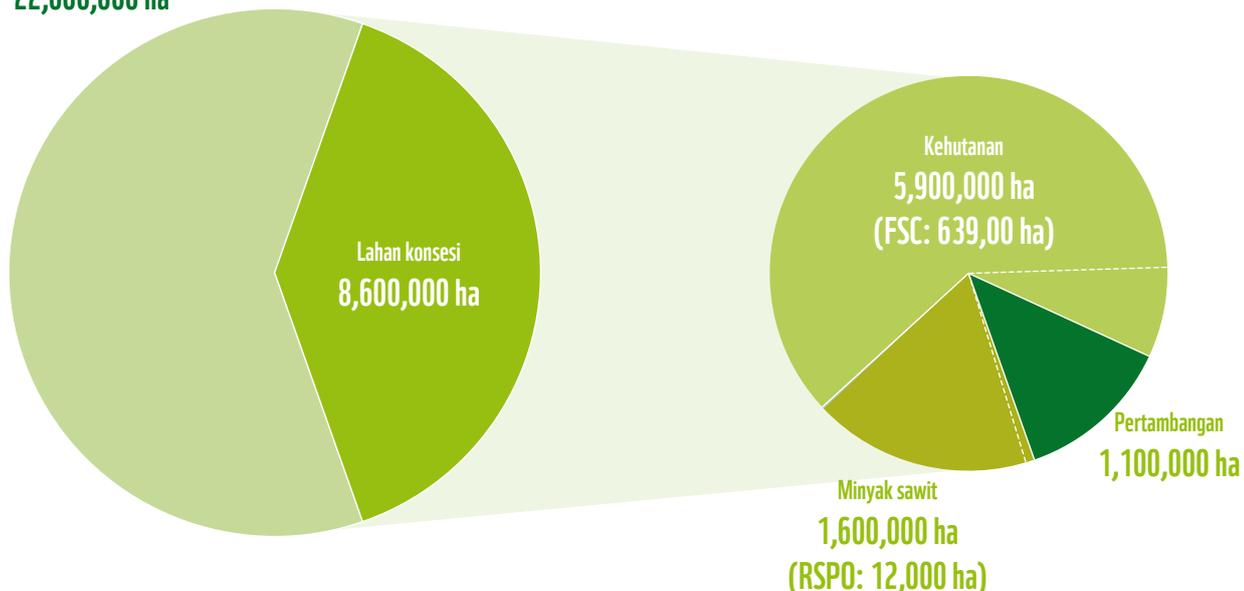
# RINGKASAN EKSEKUTIF

Heart of Borneo (HoB) meliputi 22 juta hektar (ha) hutan hujan ekuatorial lintas batas merupakan habitat dengan keanekaragaman hayati yang paling tinggi di muka bumi. Hutan-hutan di HoB memberikan banyak manfaat bagi bisnis dan masyarakat Borneo dan bagi dunia secara luas. Ini termasuk pasokan air bersih, penangkapan karbon, manfaat keanekaragaman hayati, pendapatan ekonomi dan jasa budaya yang penting.

Pada tahun 2007, dengan menandatangani Deklarasi Jantung Borneo, ketiga pemerintah Borneo mengambil langkah berani untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan pemanfaatan sumberdaya alam secara berkesinambungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah seluas 22 juta hektar ini. Sejak tahun 2007 pemerintah ketiga negara tersebut telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam penerapannya; mengadakan 4 pertemuan tri-lateral, mengeluarkan peraturan tentang lingkungan hidup yang baru, mengembangkan rencana aksi tri-lateral dan nasional, mengembangkan kapasitas lokal dan mengejar proyek-proyek praktis. Namun demikian, masukan dari dunia bisnis menunjukkan bahwa kesenjangan dalam penegakan peraturan tetap ada dan upaya untuk memperkecil kesenjangan tersebut menjadi langkah penting untuk mendorong kinerja yang lebih baik dan untuk mempertahankan momentum dari Inisiatif HoB.

Para pelaku bisnis yang beroperasi di HoB telah mengambil langkah untuk menempatkan dan mengelola operasi mereka secara lebih berkelanjutan. Misalnya, dari 8,6 juta ha yang dialokasikan dalam konsesi di wilayah HoB, 651.000 ha (8%) telah menerima sertifikasi untuk standar Forest Stewardship Council (FSC) atau Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO), yang mengindikasikan bahwa konsesi-konsesi ini dikelola secara berkelanjutan. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam diagram pie di bawah ini masih banyak yang dapat dilakukan untuk meningkatkan bisnis berkelanjutan dengan praktik terbaik di HoB.

Luas lahan  
22,000,000 ha



GAMBAR 0.1: LUAS KONSESI KEHUTANAN, KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN DI DALAM HOB

Dengan potensi untuk mengelola hampir 40% dari area di dalam HoB (Gambar 0.1), bisnis dalam sektor-sektor ini mempunyai peranan yang sangat besar dan penting dalam keberhasilan Inisiatif HoB di kemudian hari. Terkait erat dengan Inisiatif HoB ada

momentum politik dan kebijakan publik yang berkembang di balik konsep ekonomi hijau di wilayah tersebut. Sebagai sumber solusi yang potensial terhadap tantangan lingkungan hidup dan pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, sektor swasta akan menjadi pusat transisi menuju ekonomi hijau yang diharapkan di Borneo.

Mengakui peran penting dari sektor swasta, WWF terlibat dengan lebih dari 80 bisnis dari tiga sektor kunci: kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan, yang beroperasi di dalam dan di sekitar kawasan HoB untuk memahami pandangan mereka tentang HoB dan tantangan-tantangan tertentu dari produksi yang berkelanjutan. Hasil dari keterlibatan ini membuktikan bahwa banyak

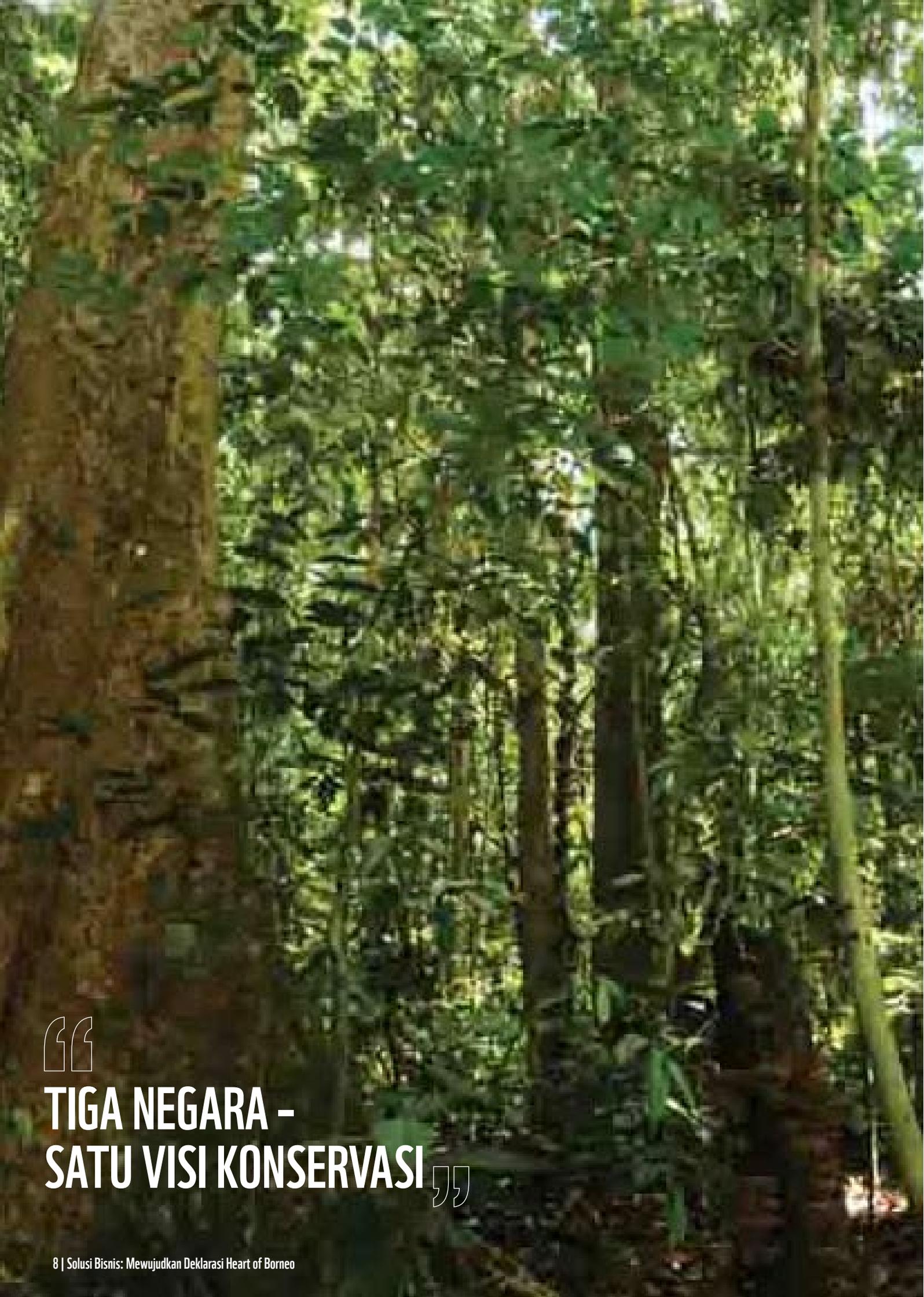
SEKTOR	KEGIATAN	SOLUSI	HALAMAN	
 <b>KEHUTANAN</b>	Penempatan dan perencanaan	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	29	
		Penebangan – Konsesi Restorasi	30	
		Perkebunan – area pengolahan lahan pertanian yang bertanggungjawab	31	
	Pengelolaan	Praktik Manajemen Spesies	32	
		Sertifikasi	33	
		Penebangan – Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi (Reduced Impact Logging)	34	
		Perkebunan – Perkebunan Generasi Baru	35	
	Pembiayaan	Pembiayaan yang bertanggungjawab	36	
		Insentif Keuangan Baru	37	
	Pembeli	Mendorong Kebutuhan akan Produk Hutan yang Berkelanjutan	38	
Membeli Kertas yang Ramah Lingkungan		39		
 <b>KELAPA SAWIT</b>	Penempatan dan perencanaan	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	53	
		Area pengolahan lahan pertanian yang bertanggungjawab	54	
	Pengelolaan	Praktik Manajemen Spesies	55	
		Sertifikasi RSPO	56	
		Meningkatkan Produktivitas Pengusaha Kecil	57	
	Pembiayaan	Pembiayaan yang bertanggungjawab	58	
		Insentif Keuangan Baru	59	
	Pembeli	Mendorong Kebutuhan akan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan	60	
	 <b>PERTAMBANGAN</b>	Penempatan dan perencanaan	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	72
			Analisa Mengenai Dampak Lingkungan	74
Pengelolaan		Penggunaan Air Raksa	75	
		Rehabilitasi Tambang	76	
Pembiayaan		Pembiayaan yang bertanggungjawab	77	
		Insentif Keuangan Baru	78	

TABEL 0. 1: SOLUSI BISNIS BAGI HEART OF BORNEO

perusahaan memang mempertimbangkan prinsip produksi berkelanjutan dalam sebuah bisnis, memang melihat sebagian unsur kasus bisnis untuk produksi yang lebih berkelanjutan, namun juga berbagai tantangan dan hambatan untuk mengadopsi praktik yang berkelanjutan masih tetap ada.

Dikembangkan dari pekerjaan WWF sebelumnya dengan perusahaan-perusahaan serta hasil dari keterlibatan ini, maka laporan ini memberikan berbagai ‘solusi’ khusus sektor terhadap isu-isu lingkungan hidup yang juga berusaha untuk menangani masalah-masalah yang dihadapi oleh berbagai perusahaan di Borneo.

Terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh para pemangku kepentingan yang berbeda untuk melakukan konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan dan yang lebih luas di HoB . Laporan ini menyoroti sebagian dari cara tersebut, namun ini baru tahap awal dari proses keterlibatan dan pengembangan strategi yang berkesinambungan. WWF akan bekerja melalui GBN untuk membantu mendorong lebih banyak aksi dan solusi baru di tahun 2011, Tahun Kehutanan Internasional.



“

# TIGA NEGARA – SATU VISI KONSERVASI

”

# BAB 1: HEART OF BORNEO

## Pendahuluan tentang Heart of Borneo

Deklarasi Heart of Borneo ditandatangani pada tahun 2007 di bawah spanduk “Tiga Negara – Satu Visi Konservasi”. Deklarasi ini merupakan ikrar pemerintah Brunei Darussalam, Republik Indonesia dan Malaysia untuk berjuang melestarikan keanekaragaman hayati dan meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan, di dalam wilayah seluas 22 juta hektar yang dikenal sebagai Heart of Borneo (HoB) (Gambar 1.1).



GAMBAR 1.1: LOKASI HOB

## Nilai dari Heart of Borneo

Deklarasi para pemerintah tersebut mengakui pentingnya kolaborasi untuk melestarikan dan mengelola hutan-hutan HoB secara berkelanjutan karena nilainya yang tinggi bagi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Jasa-jasa bernilai tinggi yang disediakan oleh hutan-hutan di HoB termasuk: pasokan air bersih, penangkapan karbon, manfaat keanekaragaman hayati, pendapatan ekonomi dan jasa budaya.

### Air:

Dari 20 sungai utama di Borneo, 14 bersumber dari hutan pegunungan HoB (Gambar 1.2). Sungai merupakan masukan penting bagi industri, pertanian dan pembangkit listrik; sungai juga menyediakan air minum bersih; dan juga merupakan sarana transportasi penting di Borneo. Degradasi waduk meningkatkan risiko terhadap banjir dan kekeringan yang tidak dapat diprediksi, yang membahayakan transportasi kapal, dan merusak pasokan industri, pertanian dan domestik. Semua akibat tersebut dapat menimbulkan biaya ekonomi dan sosial yang besar bagi masyarakat dan sektor swasta serta publik. Melestarikan mutu daerah aliran sungai di HoB akan membantu menjamin pasokan air bersih dan aman serta dapat diandalkan bagi penduduk desa dan kota di Borneo.



GAMBAR 1.2: HOB MEMBERIKAN MANFAAT DALAM MENJAGA MUTU AIR BAGI PENGGUNA DI HILIR

## Karbon:

Hutan dunia menyimpan jumlah karbon yang sangat tinggi baik dalam biomassa maupun tanah subur, “gudang karbon” ini mempunyai peran yang sangat penting dalam pengaturan iklim global. Akan tetapi, penggundulan hutan dan konversi tanah berskala besar melepaskan karbon dalam jumlah sangat banyak ke atmosfer, yang ikut menyebabkan perubahan iklim dunia.

Di Borneo, dampak dari perubahan iklim diperkirakan akan mencakup: pola curah hujan yang lebih ekstrim, jangka waktu musim kekeringan dan kebakaran yang lebih panjang, kenaikan permukaan laut dan banjir pantai, serta kejadian El Nino dan La Nina yang lebih hebat. Terdapat indikasi bahwa sebagian dari dampak ini mungkin sudah dirasakan.<sup>1</sup> Hutan-hutan dan lahan gambut di Borneo memiliki nilai penting karena merupakan tempat penyimpanan karbon yang sangat efektif, dengan rata-rata 230 ton per ha dalam biomassa di atas tanah, dan 2.400 ton per ha di lahan gambut di bawah tanah; kebanyakan dilepaskan melalui penebangan hutan dan degradasi tanah.<sup>2</sup> Penebangan hutan di Indonesia dan Malaysia saat ini menyumbang lebih dari 80% dari emisi karbon total kedua negara, mewakili lebih dari 2,5GtCO<sub>2</sub> per tahun<sup>3</sup>, ini sebanding dengan hampir 4 kali emisi tahunan dari industri penerbangan dunia.<sup>4</sup>

## Keanekaragaman hayati:

Hutan-hutan Borneo merupakan habitat bagi sebagian keanekaragaman hayati yang paling signifikan di atas bumi ini, yang kebanyakan tidak ditemukan di tempat lain di dunia. Borneo merupakan tempat tinggal bagi gajah kerdil (pygmy elephant), orang utan, badak dan macan tutul (clouded leopard), lebih dari 350 spesies burung, 150 spesies reptil dan 15.000 tanaman berbunga.<sup>5</sup>

Berbagai survei telah menemukan lebih dari 700 spesies pohon di dalam area seluas 10 hektar, suatu angka yang lebih besar daripada keanekaragaman spesies pohon total di Amerika Utara. Lebih dari 600 spesies binatang dan tumbuhan baru telah ditemukan sejak tahun 1995, yang mengindikasikan masih banyak lagi yang harus dipelajari tentang keanekaragaman binatang dan tumbuhan yang terdapat di HoB.<sup>6</sup>



GAMBAR 1.3: ORANG UTAN DAN BUNGA BANGKAI RAKSASA TERDAPAT DI BORNEO.

## Manfaat Ekonomi:

Nilai ekonomis hutan HoB sangatlah tinggi. HoB menyediakan sumberdaya alam yang kaya dalam bentuk kayu dan produk hutan lainnya. Apabila sumberdaya ini dikelola secara berkelanjutan maka sumberdaya tersebut dapat menjadi potensi penyediaan sumber pendapatan yang berkesinambungan dan berjangka panjang. Manajemen hutan yang berkelanjutan juga menjaga sumber jasa ekosistem, seperti penyediaan air, penyerbukan dan pengaturan iklim lokal bagi area di sekitarnya. Masukan alam yang penting ini sangatlah penting bagi pembangunan pertanian dan kegiatan yang mendatangkan pendapatan lainnya secara berkesinambungan di dalam HoB.

<sup>1</sup> Case et al. *Climate Change in Indonesia, implications for humans and nature*, WWF, 2007; Santoso and Forner, *Climate change projections for Indonesia*, CIFOR, 2006

<sup>2</sup> Paoli et al. *Biodiversity Conservation in the REDD, Carbon Balance and Management* 5:7, 2010

<sup>3</sup> USAID, *Indonesia Climate Change Strategies*, 2008. Laporan terakhir mempunyai perkiraan yang cukup berbeda mengenai emisi karbon total serta persentase emisi dari penebangan hutan dan degradasi di Indonesia. Perbedaan dalam perkiraan mungkin disebabkan oleh metodologi yang berbeda. Laporan tahun 2007 yang dipublikasikan oleh PEACE dan didanai oleh Bank Dunia dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris menyatakan bahwa 3,01 Gigaton CO<sub>2</sub>e dilepaskan setiap tahun. Laporan tahun 2009 oleh Dewan Nasional untuk Perubahan Iklim Indonesia menyatakan bahwa emisi CO<sub>2</sub> dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan mencapai 1,88 Gigaton. Sementara the Second National Communication (SNC) untuk periode 2000 sampai 2005 menyiarkan bahwa Kementerian Lingkungan Indonesia pada bulan Desember 2010 mengatakan bahwa Indonesia mengeluarkan paling banyak 1,38 Gigaton karbon dioksida setara CO<sub>2</sub>e setiap tahun selama periode ini. Laporan SNC juga memberikan angka yang jauh lebih rendah untuk proporsi CO<sub>2</sub> yang dilepaskan dari perubahan penggunaan lahan dan kehutanan termasuk kebakaran gambut. SNC akan diserahkan ke UN Framework Convention on Climate Change (Kerangka Konvensi Tentang Perubahan Iklim PBB)

<sup>4</sup> Pada tahun 2007 emisi karbon industri penerbangan di mana 666 juta ton setara CO<sub>2</sub>, IATA, 2009

<sup>5</sup> WWF, *Borneo: Treasure Island at Risk*, 2005

<sup>6</sup> WWF, *Borneo's new world; discovering new species in Borneo*, 2010

## Budaya dan Kehidupan:

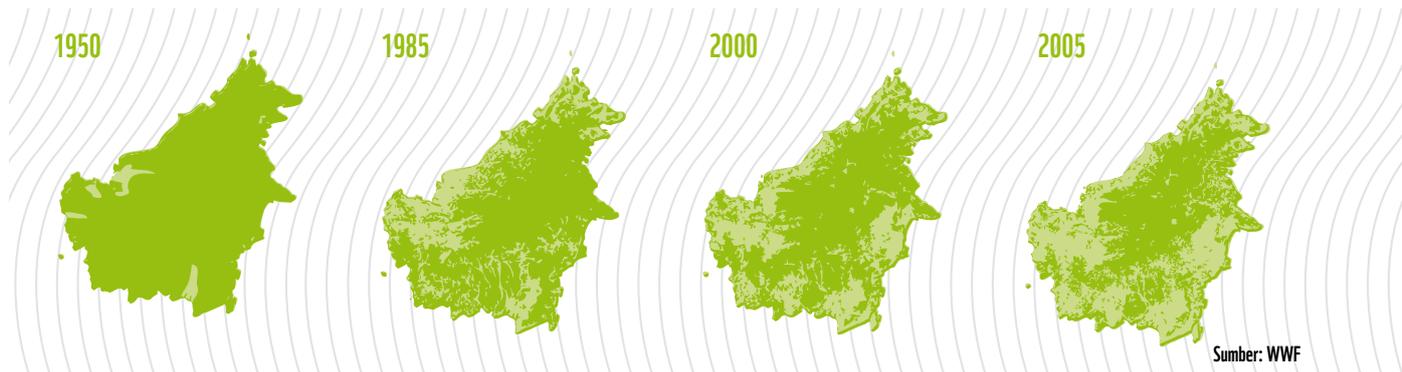
Mempertahankan mutu lingkungan alam merupakan hal yang utama penduduk yang tinggal di HoB. Mayoritas dari penduduk dimaksud secara langsung bergantung pada hutan untuk mendapatkan makanan, air, obat dan bahan bangunan. Keunikan dan kecantikan alami hutan-hutan dan kawasan pantai Borneo juga mengundang wisatawan dari seluruh dunia. Pada tahun 2009, Sabah saja mencatat lebih dari 2 juta pengunjung yang, menghasilkan pendapatan dari kegiatan pariwisata sebanyak kurang lebih USD 1,2 juta.<sup>7</sup>



GAMBAR 1.4: BANYAK MASYARAKAT BERGANTUNG PADA HUTAN

## Heart of Borneo – Di bawah Tekanan

Di samping dari segi nilai lingkungan, ekonomi dan sosial dari Heart of Borneo, kawasan tersebut turut menghadapi tekanan yang meningkat dari pertumbuhan penduduk dan perkembangan industri. Antara tahun 1985 dan 2005 Borneo kehilangan rata-rata 850.000 ha hutan setiap tahun. Gambar 1.5 menunjukkan hilangnya lapisan hutan di Borneo sejak 1950.



GAMBAR 1.5: LUAS LAPISAN HUTAN DI BORNEO DARI TAHUN 1950 SAMPAI 2005

Bertambahnya penduduk dan permintaan internasional telah mengakibatkan naiknya produksi industri kelapa sawit, kehutanan dan pertambangan (antara lain) yang meningkatkan tekanan pada hutan-hutan Borneo. Sangatlah penting untuk mencapai keseimbangan antara nilai yang diberikan kepada masyarakat oleh hutan, dan pendapatan dari kegiatan yang menggantikannya.

Saat ini, eksploitasi terhadap sumberdaya alam Borneo untuk mendapatkan hasil finansial jangka pendek belum didasari pertimbangan yang cukup terhadap implikasi yang lebih luas terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial dari kegiatan ini. Biaya bagi masyarakat akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan jasa ekosistem belum dipertimbangkan oleh para pembuat keputusan kunci dan hal ini berdampak pada peningkatan kegiatan eksploitatif yang lebih tinggi daripada yang optimal untuk masa depan jangka panjang ekonomi dan masyarakat Borneo.

<sup>7</sup> Sabah Tourism Board, 2010

<sup>8</sup> WWF, Borneo: Treasure Island at Risk, 2005

## Deklarasi Heart of Borneo

Inisiatif HoB dibentuk sebagai tanggapan atas tekanan yang terpantau pada hutan-hutan Borneo. Pertama-tama, pemerintah Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia mengadakan pertemuan dan lokakarya untuk membangun pemahaman bersama tentang prinsip dan sasaran HoB. Deklarasi HoB secara resmi ditandatangani di Bali pada tahun 2007, yang melaluinya ketiga pemerintah berjanji untuk bekerjasama dalam mewujudkan visi HoB. Ketiga pemerintah kemudian mengembangkan Rencana Aksi Strategis Trilateral dan Indonesia, Sabah dan Brunei juga telah mengembangkan dan sedang menerapkan rencana aksi nasional/negara mereka masing-masing untuk mencapai visi bersama ketiga negara.

GAMBAR 1.6: DEKLARASI HOB



## PRINSIP DAN SASARAN INISIATIF HOB YANG TELAH DISEPAKATI ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

### Prinsip:

- Penyediaan suatu sistem pendukung kehidupan yang berkelanjutan;
- Perhatian pada fungsi-fungsi sosial-budaya, ekonomi dan lingkungan;
- Kemitraan antara negara-negara dan distrik/wilayah; dan
- Keterhubungan ekologis.

### Sasaran:

- Untuk mendukung manajemen sumberdaya alam yang berkelanjutan dalam kerangka area konservasi dan area yang dilindungi serta hutan produksi dan penggunaan lahan lainnya;
- Penerapan kebijakan dan penegakan hukum yang mendukung manajemen yang berkelanjutan sesuai dengan perjanjian multilateral dan bilateral yang ada; dan,
- Penerapan pembangunan yang berkelanjutan berdasarkan metoda ilmiah dan kebijaksanaan setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan meliputi penerapan manajemen yang berkelanjutan, perlindungan, inisiatif pendidikan dan pelatihan serta kegiatan lain yang relevan untuk kegiatan manajemen lintas batas, konservasi dan produksi yang bertanggungjawab di area HoB.

Area yang ditetapkan sebagai HoB dalam Deklarasi ini meliputi 22 juta hektar, 56,6% di antaranya terdapat di Indonesia (Kalimantan Timur, Barat dan Tengah), 41,8% di Malaysia (Sabah dan Sarawak), dan 1,6% di Brunei Darussalam (58% dari keseluruhan wilayah negara tersebut).



GAMBAR 1.7: PARA MENTERI DARI BRUNEI, INDONESIA DAN MALAYSIA SETELAH MENANDATANGANI DEKLARASI

**SEJAK DITANDATANGANINYA  
DEKLARASI TERSEBUT KETIGA  
PEMERINTAH TELAH MENCAPAI  
PERKEMBANGAN YANG  
SIGNIFIKAN DALAM RENCANA  
AKSI STRATEGIS TRILATERAL  
MEREKA, TERMASUK MELALUI:**

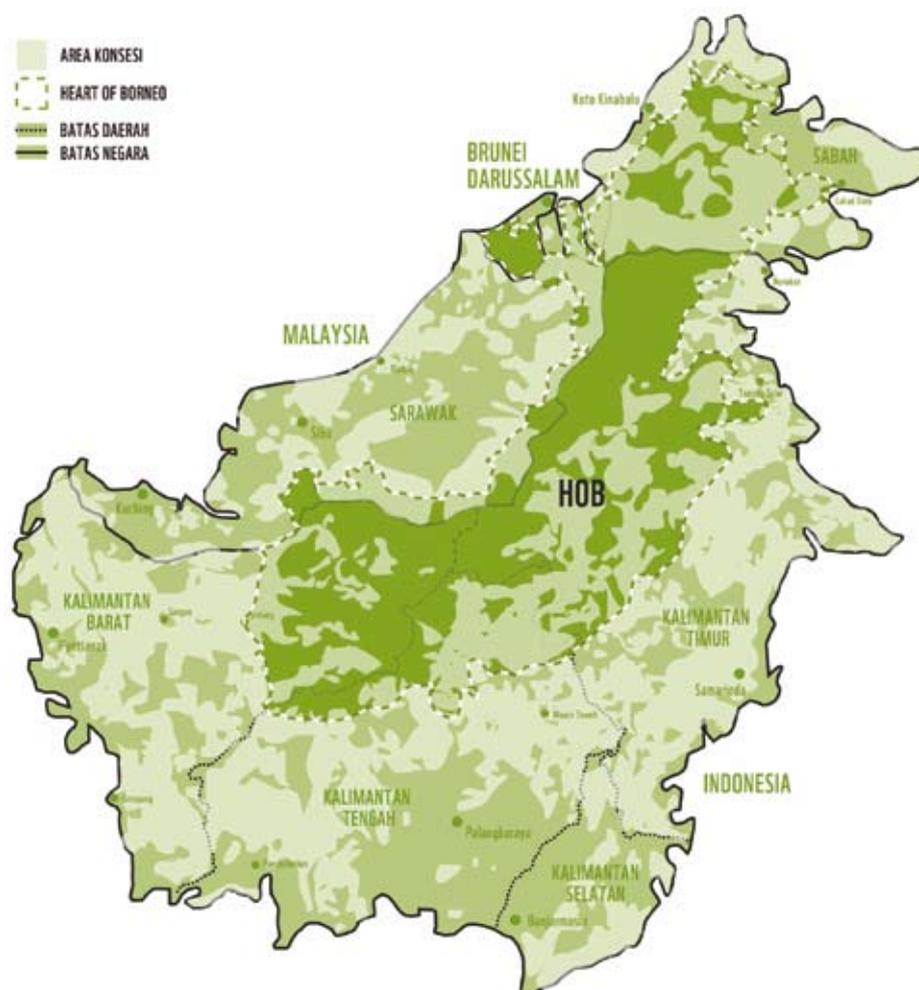
- Pertemuan tingkat tinggi para pemimpin ASEAN dan BIMP-EAGA yang mendukung Deklarasi HoB
- Pemerintah Sabah telah mengamanatkan manajemen hutan yang berkelanjutan yang resmi di konsesi hutan Sabah sebelum 2014.
- Di Kalimantan, lebih dari 1,6 juta ha konsesi kayu di dalam dan di sekitar HoB telah mendaftar untuk berusaha mencapai manajemen yang berkelanjutan yang disertifikasi oleh Forest Stewardship Council (FSC). Perusahaan pertama di Sarawak, Ta Ann, juga telah mendaftar untuk berusaha mencapai sertifikasi FSC.
- Empat pertemuan trilateral HoB mendorong perkembangan pada isu-isu lintas batas utama seperti rencana aksi ekowisata, area serta spesies yang dilindungi.
- Pembentukan badan pemerintahan multi-menteri di bidang lingkungan, ekonomi dan pembangunan.
- Proyek manajemen lahan gambut lintas batas di Brunei serta ekspedisi ilmiah untuk menemukan spesies dan sumberdaya biologis baru di HoB.
- Pemakaian area yang dilindungi di HoB oleh pemerintah Indonesia sebagai “pusat unggulan” pelatihan bagi lebih dari 150 peserta pelatihan manajemen taman nasional dari berbagai negara.
- Pengembangan dan peluncuran analisa kelayakankomprehensif dari aspek Pembiayaan yang Berkelanjutan di Heart of Borneo.

Selain itu, pemerintah Indonesia saat ini sedang melaksanakan proses konsultasi untuk menetapkan HoB sebagai suatu Kawasan Strategis Nasional (KSN). Ini adalah kawasan yang perencanaan tata ruangnya dianggap sebagai prioritas nasional. Secara historis prioritas ini mungkin karena alasan kedaulatan negara, keamanan nasional, atau karena alasan ekonomi, sosial atau budaya. HoB adalah KSN pertama yang diusulkan karena alasan lingkungan. KSN HoB memperjelas rencana tata ruang dan memberikan pedoman yang lebih jelas bagi pengguna lahan mengenai definisi dari “konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan” di kawasan khusus mereka dan bagi industri khusus mereka. KSN dan bimbingan terkait seyogyanya dapat memfasilitasi pelaku bisnis agar bekerja bersama-sama dengan pemerintah untuk menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan yang membantu mencapai tujuan pemerintah untuk kawasan tersebut.

## Pentingnya sektor swasta di Borneo

Yang merupakan fokus dalam prinsip dan sasaran Inisiatif HoB adalah kesejahteraan masyarakat setempat dan keberlangsungan pembangunan ekonomi dan sosial di kawasan itu. Sektor swasta mempunyai peran penting di sini. Memang pendapatan dari eksploitasi sumberdaya alam Borneo telah memberi kontribusi besar dalam engembangan kawasan ini di beberapa dekade terakhir. Persentase populasi yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional di Indonesia dan Malaysia masing-masing turun dari 40% pada tahun 1970-an menjadi 17,8% di Indonesia dan 5% di Malaysia di tahun 2006 dan 2007.<sup>9</sup> Walaupun terdapat penurunan dalam tingkat kemiskinan, negara-negara Borneo tetap menjadi negara termiskin di kawasan, dengan perkiraan 23% dari penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan, misalnya di Sabah, Malaysia.<sup>10</sup>

Sektor swasta akan terus memainkan peran penting dalam menurunkan angka kemiskinan di seluruh Borneo. Akan tetapi, dengan terdapatnya kebutuhan pengolahan kembali hutan, maka semakin nyata bahwa arah pertumbuhan saat ini tidak dapat dipertahankan untuk jangka panjang. Penggunaan sumberdaya alam secara destruktif bukan hanya telah mengakibatkan hilangnya jasa ekosistem yang merugikan masyarakat setempat, nasional, dan internasional, namun juga telah memfokuskan pada ekonomi dengan keuntungan jangka pendek, yang secara potensial mengorbankan kesempatan pertumbuhan yang berkelanjutan jangka panjang. Tanpa mengevaluasi kembali model pertumbuhan ekonomi di Borneo, prospek untuk penurunan tingkat kemiskinan jangka panjang yang berkelanjutan akan terbatas.<sup>11</sup>



**GAMBAR 1.8: GABUNGAN WILAYAH KONSESI KEHUTANAN, KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN DI BORNEO**

Catatan: Peta ini memberikan perkiraan ilustratif dari lokasi dan luas konsesi berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum; ini tidak dimaksudkan sebagai suatu sajian yang akurat.

<sup>9</sup> CIA World Fact Book - <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/fields/2046.html>; UNDP, Malaysia Measuring and Monitoring Poverty and Inequality, 2007

<sup>10</sup> Ninth Malaysian Plan 2006-2010

<sup>11</sup> Pezzey, Sustainable development concepts : an economic analysis, World Bank, 1992; Toman, The Roles of the Environment and Natural Resources in Economic Growth Analysis, Resources for the Future, 2003; Indonesia: Critical Development Constraints, Asian Development Bank, 2010



*“ Saya pernah mendengar tentang Heart of Borneo, tetapi belum mengetahui apa maksudnya*

*Saya tahu kami memiliki konsesi di Heart of Borneo namun belum memahami bagaimana inisiatif itu akan mempengaruhi bisnis kami?*

*Saya rasa bertindak secara berkelanjutan pada dasarnya akan baik untuk perusahaan saya di kemudian hari*



Gambar 1.8 menunjukkan luasnya konsesi kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan saat ini di dalam dan di sekitar HoB. Tabel 1.112 menunjukkan bahwa berdasarkan perkiraan alokasi konsesi saat ini, sektor swasta dapat mengelola hampir 40% dari area lahan di dalam HoB, yang memberi indikasi tentang peranan penting yang perlu dimainkan oleh sektor swasta dalam melaksanakan Deklarasi HoB. Sebagian besar dari ancaman utama bagi HoB dianggap diimbulkan dari kegiatan sektor swasta, namun seiring dengan hal tersebut, sektor swasta memiliki kesempatan untuk menjadi penyedia dan pelaksana solusi terhadap tantangan lingkungan dan sosial dan dapat terus menjadi pendorong pembangunan ekonomi dan sosial.

	Kalimantan (ha)	Malaysia (ha)	Brunei (ha)	Total (ha)
Kelapa Sawit di HoB	830,000	770,000	-	1,600,000
Kelapa Sawit yang disertifikasi RSPO di HoB	-	12,000	-	12,000
Kehutanan di HoB	2,600,000	3,200,000	138,000	5,938,000
Kehutanan yang disertifikasi FSC di HoB	424,000	215,000	-	639,000
Pertambangan di HoB	1,100,000	-	-	1,100,000
Konsesi pertambangan yang berproduksi	120,000	-	-	120,000
Konsesi total				8,638,000
% dari HoB yang dialokasikan sebagai konsesi				39%
Total yang disertifikasi FSC/RSPO				651,000
% dari area konsesi yang disertifikasi FSC/RSPO				8%
Area HoB Total				22,000,000

GAMBAR 1.1: LUAS KONSESI KEHUTANAN, KELAPA SAWIT DAN PERTAMBANGAN DI DALAM HOB

### Keterlibatan dengan perusahaan di Heart of Borneo

Peningkatan dukungan industri penting untuk mencapai keberhasilan sasaran Deklarasi HoB. Atas kesadaran akan hal tersebut, diiringi dengan dukungan dari upaya pemerintah untuk mencapai visi konservasi, maka WWF meluncurkan the Heart of Borneo Green Business Network untuk merangkul bisnis dan menyebarkan kesadaran serta pemahaman yang lebih luas tentang inisiatif Heart of Borneo. Laporan ini, beserta dengan situs web terkait, merupakan hasil dari suatu proyek untuk secara khusus melibatkan sektor kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di Borneo, dengan fokus pada Kalimantan, Sabah dan Sarawak.<sup>12</sup>

Para spesialis industri dan keberlanjutan dari PwC yang berbasis di Malaysia dan Indonesia membantu WWF untuk terlibat dengan lebih dari 80 perwakilan perusahaan dari sektor kehutanan, kelapa sawit dan pertambangan yang beroperasi di dalam dan di sekitar Heart of Borneo. Proses keterlibatan ini mencakup lebih dari 50 wawancara mendalam serta lokakarya yang difokuskan pada industri ini di Kuala Lumpur dan Jakarta. Hal ini didukung oleh survei yang dikembangkan secara khusus yang tersedia dalam format cetakan dan on-line.

Sasaran dari kegiatan keterlibatan industri ini adalah untuk:

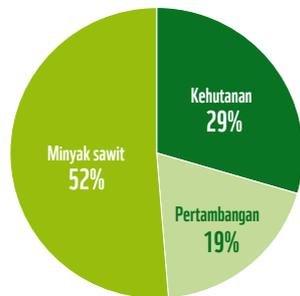
- Memahami pandangan perusahaan mengenai keberlanjutan lingkungan dan Inisiatif HoB;
- Menyoroti perkembangan industri saat ini dan praktik yang baik yang ada;
- Mengidentifikasi tantangan-tantangan khusus yang dihadapi oleh perusahaan yang berupaya untuk menerapkan praktik lingkungan yang baik; dan,
- Menginformasikan solusi praktis yang dapat diterapkan oleh para produsen, pembuat peraturan, investor, dan konsumen untuk membantu melaksanakan produksi yang berkelanjutan.

<sup>12</sup> Sumber: Kehutanan – Kementerian Kehutanan Indonesia 2008, FSC 2010, Membiayai Lanskap HoB, Departemen Kehutanan Brunei, 2010. Kelapa Sawit – Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian (tingkat Kota/ Kabupaten) 2008, Survei lapangan perusahaan Kelapa Sawit WWF 2008, MPOB 2010, RSPO 2010. Pertambangan – Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia 2008, Laporan Pertambangan Malaysia 2008.

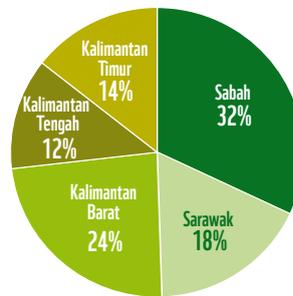
<sup>13</sup> Kondisi di Brunei berbeda dengan di tempat lain di pulau tersebut untuk sektor-sektor ini: Kelapa sawit dan pertambangan tidak signifikan, dan Brunei tidak mengeksport kayu. Malahan Brunei mengimpor sekitar 20% dari kebutuhan kayu dalam negerinya dan berupaya menyediakan sisa 80% atas dasar keberlanjutan penuhi

## Siapa saja pihak yang terlibat

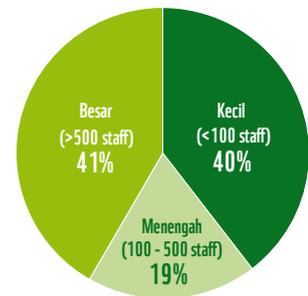
Bagan berikut ini menyediakan rangkuman profil peserta dalam kegiatan pelibatan ini.



GAMBAR 1.9: % RESPONDEN BERDASARKAN SEKTOR



GAMBAR 1.10: % RESPONDEN BERDASARKAN OPERASI DI MASING-MASING WILAYAH

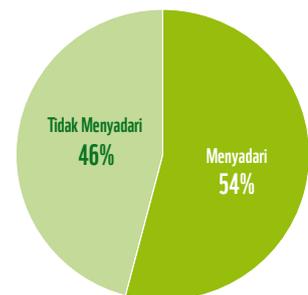


(n=84)

GAMBAR 1.11: % RESPONDEN BERDASARKAN UKURAN PERUSAHAAN

## Apa yang mereka katakan?

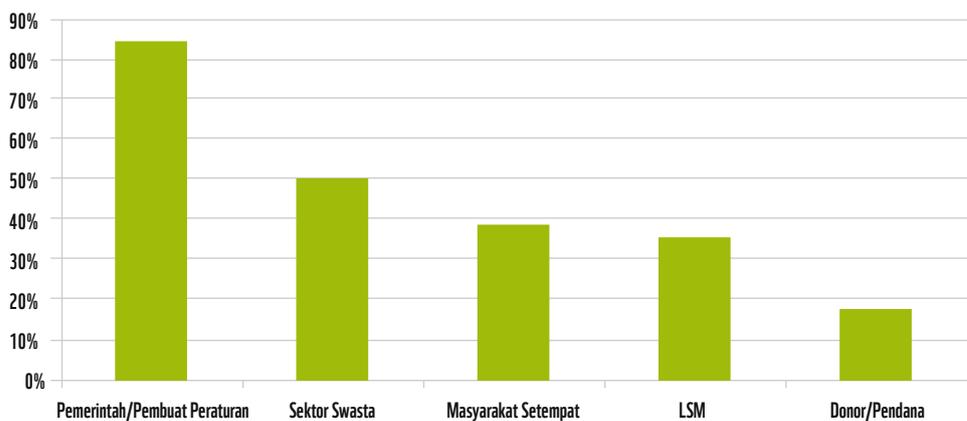
Analisa di bawah ini memberi ringkasan dari hasil kegiatan ini berdasarkan semua responden.



(n=84)

GAMBAR 1.12: KESADARTAHUAN AKAN INISIATIF HOB. BAGAN BERIKUT INI MENYEDIAKAN RANGKUMAN PROFIL PESERTA DALAM KEGIATAN INI.

Pertanyaan pertama dalam survei dan wawancara menggali pengetahuan para responden mengenai HoB dan sasarnya. Sebesar 46 persen responden tidak menyadari tentang adanya HoB, yang menunjukkan perlunya bagi pemerintah dan pendukung HoB lainnya untuk lebih berupaya dalam meningkatkan profil dari inisiatif ini terhadap para perusahaan, terutama terkait dengan peranan penting yang perlu dimainkan oleh sektor swasta dalam pelaksanaannya.



(n=84, Catatan: Para responden diminta untuk "memilih semua yang tepat")

GAMBAR 1.13: PEMANGKU KEPENTINGAN MANA YANG MEMPUNYAI PERAN YANG SIGNIFIKAN DALAM MENERAPKAN DEKLARASI HEART OF BORNEO?



*Inisiatif Borneo perlu didukung oleh peraturan agar berhasil.*

*Praktik lingkungan dan sosial yang baik telah membantu melindungi bisnis saya dari risiko*

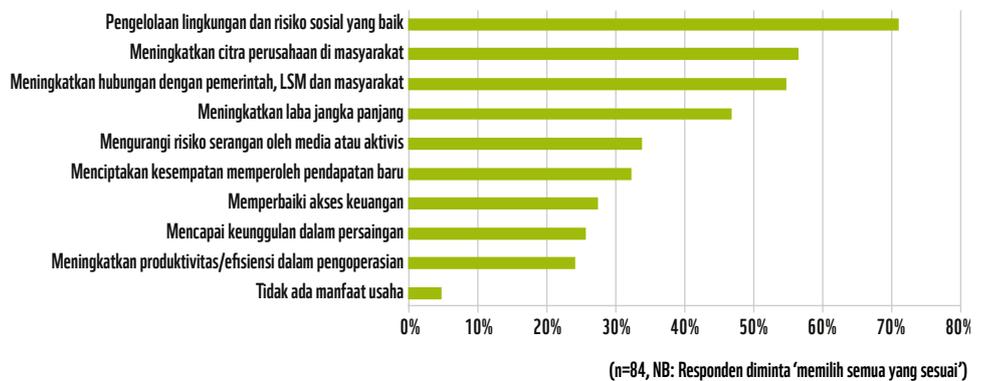
*Mendidik karyawan dan kontraktor merupakan inti dari pendekatan keberlanjutan kami*



Setelah diberikan penjelasan singkat mengenai Inisiatif HoB, para responden ditanya mengenai pemangku kepentingan yang mana yang akan memainkan peran signifikan dalam pelaksanaannya. Mayoritas responden merasa bahwa inisiatif tersebut perlu dipimpin secara kuat oleh pemerintah (negara dan nasional) dan pembuat kebijakan. Pesan ini disuarakan dalam lokakarya yang melibatkan kalangan industri di mana mayoritas perusahaan dari seluruh sektor menyatakan bahwa mereka melandaskan tindakan mereka dalam praktik lingkungan dan sosial yang baik pada ketentuan pemerintah. Hanya lebih dari separuh (51%) yang merasa bahwa sektor swasta akan memainkan peran yang signifikan sedangkan 39% berpendapat bahwa masyarakat setempat akan penting.

Mengingat bahwa banyak manfaat dari hutan-hutan Borneo bersifat regional dan global, kami mengharapkan agar donor internasional secara khusus akan membantu memberi dukungan untuk mendorong perubahan yang diperlukan untuk melindungi HoB. Penandang dana lainnya juga memiliki peranan dalam mendorong praktik yang baik dan menggunakan kerangka penilaian yang kuat bagi para pelaku yang kurang bertanggungjawab.

### Kasus bisnis untuk perubahan



GAMBAR 1. 14: APA MANFAAT DARI PRAKTIK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG BAIK?

Para responden juga ditanya tentang apa manfaat yang mereka ketahui sebagai hasil dari pelaksanaan praktik lingkungan dan sosial yang baik. Hasilnya (Gambar 1. 14) memberikan pemahaman yang memberitahukan mengenai kasus bisnis yang potensial untuk produksi yang berkelanjutan di Borneo.

Sebagian besar (71%) mengidentifikasi lingkungan yang baik dan manajemen risiko sosial merupakan alasan utama untuk mengadopsi praktik-praktik yang baik. Jumlah responden yang hampir sama menganggap bahwa mengadopsi praktik-praktik yang berkelanjutan akan memperbaiki citra publik terhadap perusahaan mereka (56%) dan memperbaiki hubungan dengan para pemangku kepentingan utama (55%). Hampir separuh (47%) dari responden merasa bahwa dengan menerapkan praktik lingkungan dan sosial yang baik dapat meningkatkan keuntungan jangka panjang. Berbagai manfaat lain yang juga sering dipaparkan mencakup terciptanya sumber pendapatan baru (32%), perbaikan akses ke keuangan/pembiayaan (27%) dan peningkatan produktivitas (24%).

Perusahaan juga mengidentifikasi berbagai tantangan khusus dalam mengadopsi praktik yang berkelanjutan. Tantangan yang paling sering disebutkan termasuk: kurangnya dukungan finansial untuk mengubah praktik-praktik ditambah dengan persepsi bahwa sebagian praktik yang berkelanjutan berbiaya tinggi dan mempunyai manfaat terbatas; kurangnya pengetahuan/kapasitas di antara karyawan tentang praktik lingkungan dan sosial terkemuka; dan, kesulitan mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan kunci, terutama kontraktor dan karyawan, untuk melakukan praktik yang berkelanjutan. Secara umum tantangan yang dilaporkan tidak berbanding seimbang dengan manfaatnya dan oleh sebab itu terdapat kesulitan dalam penggolongan dan pelaporan dalam bentuk persentase namun kami telah memberi perhatian khusus pada tantangan yang diangkat oleh perusahaan dalam bagian solusi pada Bab 2, 3 dan 4.

Meskipun kami mengakui akan adanya tantangan, hasil di atas memperlihatkan bahwa banyak perusahaan yang beroperasi di Borneo juga memaparkan unsur dari kasus bisnis yang beralih ke produksi yang berkelanjutan. Kami mengharapkan agar analisa dan solusi yang disajikan dalam pasal-pasal khusus industri laporan ini bisa menyediakan informasi dan memperkuat kasus bisnis untuk produksi yang berkelanjutan dan secara signifikan membantu mengurangi sebagian hambatan dalam tindakan yang dapat diperkirakan.

Hasil dari kegiatan yang melibatkan sektor industri ini memaparkan tentang struktur dan isi laporan ini dan hal tersebut diuraikan dengan lebih mendalam sesuai dengan jenis sektor dalam Bab 1, 3 dan 4. Temuan-temuan dalam kajian ini juga telah disampaikan kepada pemerintah. Bersama dengan Kelompok kerja HoB, kami mengharapkan agar laporan ini akan menjadi awal dari kerja sama yang meningkat antara bisnis, pemerintah dan LSM dalam mendukung Inisiatif HoB. WWF menggunakan hasil ini untuk mendorong strateginya untuk Jaringan Bisnis Hijau HoB. Halaman web berikut ini akan memberikan informasi terkini mengenai perkembangan kinerja kami dan isu-isu terkait HoB yang mempengaruhi bisnis:

[wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork)



Bab-bab berikut membahas tentang sektor kehutanan, kelapa sawit, dan pertambangan secara berturut-turut; dengan menyoroti kepentingan ekonominya sementara memberi perhatian terhadap konsekuensi lingkungan dan sosial yang potensial dari perluasan yang tidak terkendali. Solusi praktis terhadap tantangan lingkungan yang diidentifikasi oleh bisnis di HoB ditawarkan kepada para produsen serta mereka yang memberikan sumberdaya dan membiayai bisnis di HoB. Sebagian kekhawatiran dapat ditangani relatif mudah dalam batas-batas laporan ini, namun sebagian lagi lebih rumit dan akan memerlukan keterlibatan yang berkesinambungan antara perusahaan, LSM dan pembuat peraturan untuk menjabarkan jawaban yang cocok – kami mengharapkan adanya kesempatan untuk kerja sama yang berkesinambungan ini. Solusi yang ditawarkan juga mempertimbangkan peranan penting yang dimainkan oleh para investor, konsumen dan LSM dalam membantu menyeimbangkan perekonomian yang menguntungkan dan berkelanjutan secara lingkungan dan sosial.

Bab ini secara terpisah menganalisa isu penebangan hutan alam dan perkebunan. Saat ini, Sserat kayu yang berasal dari sumber-sumber tersebut juga memasok industri kertas dan bubur kertas dalam skala kecil namun industri komoditi tersebut kian berkembang di Borneo di mana dan perkembangan dalam sektor ini turut ditinjau ulang. Bagian pertama bab ini memperhatikan tren dalam produksi, upaya pengurangan sumberdaya alam yang telah dilakukan telah mengubah industri ini, dan perkembangan produksi yang berkelanjutan. Bagian kedua bab ini memaparkan tantangan lingkungan dan sosial beserta solusi terkait sektor kehutanan. Bagian akhir menyimpulkan hasil dari kerja sama kami dengan para produsen yang merumuskan kasus bisnis untuk kehutanan yang berkelanjutan di Borneo.

“

**TERDAPAT KESEMPATAN BAIK  
UNTUK MANAJEMEN HUTAN  
YANG BERKELANJUTAN DI HOB.**

”

# BAB 2

## SOLUSI BISNIS UNTUK HUTAN YANG BERKELANJUTAN DI BORNEO



### Ringkasan

- Sektor kehutanan mengelola sebagian besar lahan dari sektor mana pun yang beroperasi di HoB, dan oleh sebab itu mempunyai kesempatan terbesar untuk penggunaan yang berkelanjutan, namun juga risiko terbesar bila tidak terdapat praktik yang baik.
- Penebangan hutan alam yang berkelanjutan adalah contoh yang baik bagaimana hutan yang masih ada dapat memberikan pendapatan jangka panjang sementara mempertahankan sebagian besar dari nilai hutan.
- Kawasan perkebunan meningkat di seluruh Borneo untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang akan kayu dan serat untuk pabrik kertas. Adalah penting bagi perluasan kapasitas pabrik untuk disesuaikan dengan peningkatan yang selaras dengan pengembangan sektor perkebunan yang berkelanjutan. Untuk menjamin agar pasokan dapat memenuhi kebutuhan tanpa memberi ancaman yang tidak signifikan pada hutan yang bernilai konservasi tinggi, maka perkebunan perlu direncanakan, dilaksanakan secara berkelanjutan dan ditanam sebelum pabrik bubur kertas (pulp) dibangun.
- Kebutuhan internasional untuk produk hutan yang berkelanjutan sedang meningkat, perusahaan anggota GFTN WWF memperdagangkan lebih dari USD 70 milyar hasil hutan setiap tahun, 40 % di antaranya bersertifikasi FSC, sekitar USD 28 milyar material FSC.

### Rekomendasi

- Kegiatan penebangan harus dihindari pada hutan bernilai konservasi tinggi, dan di tempat lain pengurangan dampak penebangan dan manajemen hutan yang berkelanjutan harus diterapkan untuk meminimalkan dampak lingkungan.
- Perkebunan tidak boleh menggantikan hutan alam yang bernilai tinggi, dan sebaliknya harus ditanam pada lahan tidur yang ada. Program “Perkebunan Generasi Baru” WWF dapat menyediakan dasar bagi manajemen perkebunan yang baik.
- Para investor, pedagang dan konsumen harus membantu mendorong manajemen yang berkelanjutan melalui pembiayaan dan alokasi sumberdaya untuk produksi bersertifikasi FSC.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat di bagian solusi:

Kegiatan	Solusi	Halaman
Penempatan dan perencanaan	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	31
	Penebangan - Konsesi Restorasi	32
	Perkebunan - Kawasan Pengolahan Lahan Pertanian yang Bertanggungjawab	33
Pengelolaan	Praktik Manajemen Spesies	34
	Sertifikasi	35
	Penebangan - Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi	36
	Perkebunan - Perkebunan Generasi Baru	37
Pembiayaan	Pembiayaan yang Bertanggungjawab	38
	Insentif Keuangan Baru	39
Pembeli	Mendorong Kebutuhan akan Produk Hutan yang Berkelanjutan	40
	Membeli Kertas yang Ramah Lingkungan	41

## Pendahuluan

Hutan-hutan Borneo menyediakan sumberdaya yang sangat berharga bagi pemerintah Indonesia, Malaysia dan Brunei. Penjualan kayu dan produk hutan lainnya telah memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi dan eksploitasi hutan telah membantu mengangkat banyak keluarga dari garis kemiskinan dalam dua dekade terakhir. Akan tetapi, tingkat penebangan yang tidak berkelanjutan, ditambah dengan kegiatan ilegal yang merata mencerminkan bahwa sumberdaya yang sangat berharga tersebut sedang menurun. Model baru tentang pemakaian hutan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjamin bahwa pemerintah, perusahaan dan masyarakat Borneo dapat terus mengandalkan sumberdaya hutannya untuk memberikan pendapatan tanpa mengurangi potensi pertumbuhan di masa depan.

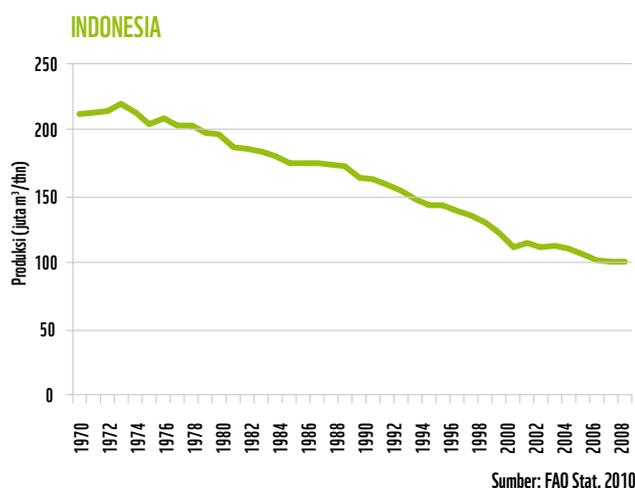
Deklarasi HoB mengakui bahwa hutan Borneo unik dan sangat berharga. Akan tetapi, adanya degradasi konsesi kayu yang terus-menerus di Borneo yang disebabkan oleh eksploitasi yang berlebihan memberikan tekanan yang meningkat pada hutan bernilai konservasi tinggi yang tersisa, yang kebanyakan terletak di dalam HoB. Sektor kehutanan mengelola sebagian besar lahan dari sektor mana pun yang beroperasi di HoB, dan oleh sebab itu merupakan kesempatan terbesar untuk penggunaan yang berkelanjutan, namun juga risiko terbesar bila tidak terdapat praktik yang baik. Untuk mewujudkan visi HoB untuk konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan, hutan di dalam HoB perlu dikelola secara hati-hati dan dilindungi dari penebangan liar dan yang tidak berkelanjutan. Sebagai bagian dari upaya ini, pengalihan ke manajemen hutan yang berkelanjutan, secara independen disertifikasi melalui FSC atau standar lain yang setara, akan menghasilkan kinerja lingkungan yang lebih baik dan memungkinkan pendapatan jangka panjang dari kawasan hutan dapat dipertahankan. Sebagaimana telah diperlihatkan di Sabah, pemerintah mempunyai peran penting dalam mendorong ke arah produksi yang lebih berkelanjutan, dan hal ini seharusnya digalakkan dan didorong oleh tindakan konsumen dan para penyandang dana.

## Produksi Kehutanan

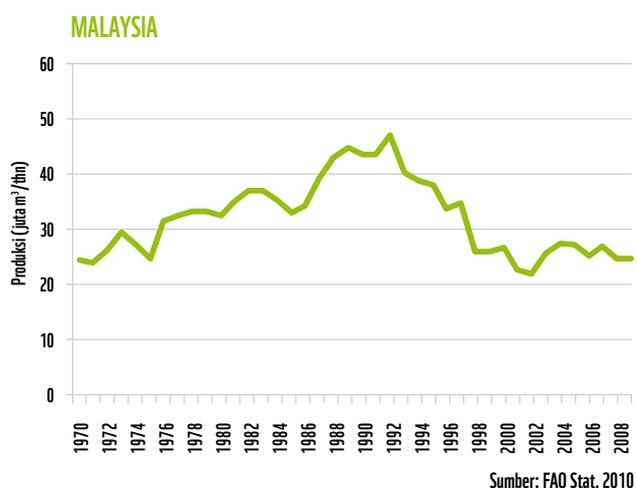
### Penebangan Hutan Primert

Perubahan-perubahan dalam produksi industri kayu Indonesia dan Malaysia mengilustrasikan kebutuhan akan peralihan mendesak ke model ekstraksi yang berkelanjutan. Gambar 1.1 dan 1.2 memperlihatkan produksi kayu bulat (roundwood)<sup>14</sup> di Indonesia dan Malaysia dari tahun 1970 sampai 2009.<sup>15</sup> Kedua negara telah mengalami pengurangan sebesar separuh dari produksi puncak mereka masing-masing. Produksi kayu bulat Indonesia telah menurun sejak awal tahun 1970-an dari lebih dari 200 juta m<sup>3</sup> menjadi sekitar 100 juta m<sup>3</sup> di tahun 2009. Produksi Malaysia terus meningkat selama tahun 1970-an dan 1980-an, namun sejak itu menurun dari hampir 50 juta m<sup>3</sup> ke sedikit di atas 25 juta m<sup>3</sup> di tahun 2009.

Di Brunei Studi Sumberdaya Hutan dan Perencanaan Strategis (1984) memprediksi defisit kayu yang akut sebelum tahun 1015, ketika campuran hutan dipterokarpa, sumber pasokan kayu utama negara tersebut, akan ditebang seluruhnya. Untuk menghindari hal ini, Departemen Kehutanan memotong setengah dari penebangan tahunan yang diizinkan dari 200.000 m<sup>3</sup> menjadi 100.000



2.1: PRODUKSI KAYU BULAT DI INDONESIA TAHUN 1970 SAMPAI 2009



GAMBAR 2.2: PRODUKSI KAYU BULAT DI MALAYSIA TAHUN 1970 SAMPAI 2009

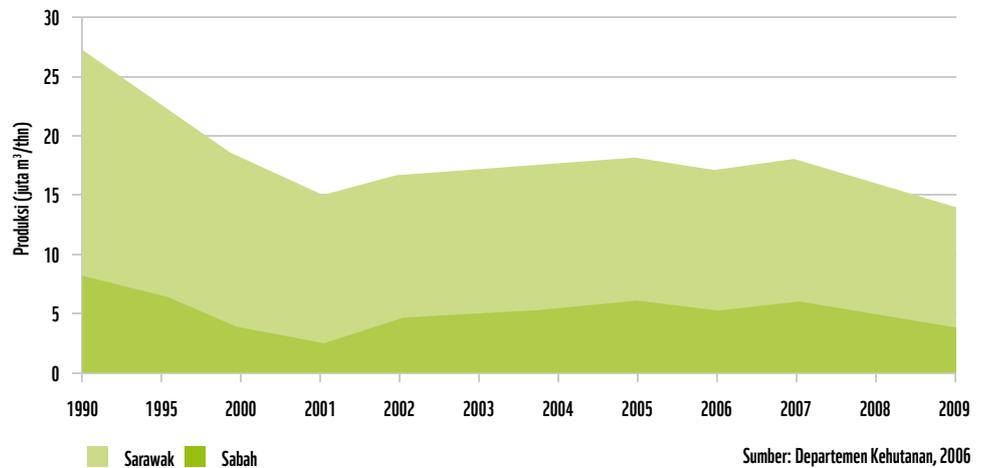
<sup>14</sup> Kayu dalam keadaan alamiahnya sebagaimana ditebang, atau sebaliknya dipanen, komoditas yang termasuk adalah kayu gergajian dan kayu lapis, kayu pulp, kayu bulat industrial lain (termasuk kayu penganjal) dan kayu bahan bakar.

<sup>15</sup> Produksi termasuk panen dari hutan perkebunan, akan tetapi ini dianggap hanya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan, kecuali menjelang akhir dari rangkaian waktu di mana produksi perkebunan mungkin bertanggungjawab atas perataan tren. Produksi ilegal mungkin tidak sepenuhnya diakui dalam angka-angka ini.

<sup>16</sup> FAO Stat; [www.forestry.gov.bn/stats\\_20.gif](http://www.forestry.gov.bn/stats_20.gif)

m<sup>3</sup> per tahun mulai tahun 1990. Sebagian dari hasil tindakan ini, produksi kehutanan Brunei telah mengikuti kecenderungan yang sama dengan yang terdapat di Malaysia dan Indonesia, namun dalam skala yang jauh lebih kecil. Produksi kayu gergajian misalnya meningkat dari 40.000 ton di tahun 1970 mencapai puncak sebesar 90.000 ton pada pertengahan tahun 1990-an, diikuti oleh penurunan menjadi 45.000 ton per tahun di tahun 2005.<sup>16</sup>

Pada tingkat negara, di Sabah dan Sarawak total produksi kayu log (sub-set dari produksi kayu bulat) di tahun 1990 adalah masing-masing 8,4 juta m<sup>3</sup> dan 18,9 juta m<sup>3</sup>, namun di tahun 2008 angka ini telah turun masing-masing menjadi 3,9 juta m<sup>3</sup> dan 10,1 juta m<sup>3</sup>.<sup>17</sup> Tren yang serupa terlihat di Kalimantan, misalnya, di Kalimantan Timur yang mewakili 55% dari Kalimantan, dan hampir sepertiga dari kawasan konsesi hutan Indonesia<sup>18</sup>, produksi kayu log dari hutan alam menurun dari 5,4 juta m<sup>3</sup> di tahun 1997, menjadi 1,7 juta m<sup>3</sup> di tahun 2008.<sup>19</sup>



GAMBAR 2.3: PENURUNAN PRODUKSI KAYU LOG DARI MANAJEMEN HUTAN ALAM DI SABAH DAN SARAWAK



GAMBAR 2.4: PENGANGKUTAN KAYU BULAT UNTUK PENGOLAHAN

<sup>17</sup> FDP, FD-Sabah, dan FD-Sarawak. Data tersedia di "Statistics on Commodities 2009"

<sup>18</sup> Tahun 2008 terdapat 6.581.712 ha konsesi hutan di Kalimantan Timur; 12.275.773 di seluruh Kalimantan, dan 26.169.813 ha di seluruh Indonesia. BPS, 2008.

<sup>19</sup> Kalimantan Timur dalam Angka, 1997 dan BPS Kalimantan Timur Dalam Angka, 2009

## Perkebunan Kayu

Sementara produksi dari hutan alam pada umumnya menurun yang terutama disebabkan oleh kelangkaan dan naiknya biaya panen pada kawasan yang tidak dapat diakses, produksi dari perkebunan telah meningkat dengan pesat dalam upaya untuk memenuhi permintaan. Perkebunan memiliki keunggulan dalam menyediakan pasokan yang dapat diperkirakan dengan biaya yang diketahui.

Sarawak secara khusus sedang melaksanakan kebijakan penanaman ulang secara ekstensif, dengan produksi kayu bulat dari perkebunan diperkirakan meningkat dari 2 juta m<sup>3</sup> antara tahun 2006 dan 2010 menjadi 15 juta m<sup>3</sup> antara tahun 2016 dan 2020.<sup>20</sup> Pasokan ini akan dicapai melalui penanaman tahunan seluas 375.000 ha per tahun sampai tahun 2020. Namun demikian, selama ini target-target tersebut belum selalu terpenuhi karena kesulitan mendapatkan tanah yang tersedia dan proses persetujuan pemerintah setempat yang lambat.<sup>21</sup>

Di Indonesia, perkebunan juga sudah mulai memberikan proporsi pasokan kayu yang lebih penting; dalam waktu 6 tahun sejak 1999 sampai 2005, produksi kayu dari perkebunan industrial naik dari 190.000 m<sup>3</sup> menjadi 12,8 juta m<sup>3</sup>. Kenaikan ini terutama berasal dari perkebunan di Sumatera, akan tetapi kawasan perkebunan sekarang ini sudah mulai berkembang juga di Kalimantan.<sup>22</sup>

Di Brunei, Departemen Kehutanan memulai program pembangunan perkebunan kayu gergajian di tahun 1990-an dengan tujuan untuk mengembangkan 30.000 ha perkebunan dengan tingkat pertumbuhan 1.000 ha per tahun. Diperkirakan bahwa pada saat dewasa perkebunan kayu gergajian akan menghasilkan 200.000 m<sup>3</sup> per tahun, kurang lebih setara dengan kebutuhan tahunan untuk industri kayu setempat.

## Pulp (bubur kertas) dan Kertas

Pada tingkat wilayah, pendorong utama kebutuhan akan pengembangan perkebunan dan serat kayu pada umumnya adalah industri pulp dan kertas. Cina berada di balik peningkatan kebutuhan akan pulp dan kertas, dengan impor naik lebih dari sepuluh kali lipat antara tahun 1995 dan 2005.<sup>23</sup> Kapasitas pabrik pulp di Indonesia telah diperluas untuk memenuhi kebutuhan ini, dengan kenaikan dari sekitar 1 juta ton di tahun 1990<sup>24</sup> menjadi lebih dari 7 juta ton per tahun di tahun 2008<sup>25</sup>. Akan tetapi, kebanyakan perluasan tersebut sampai saat ini terjadi di Sumatera karena pabrik kertas telah berkembang jauh lebih cepat daripada perkebunannya. Pertumbuhan ini datang bersamaan dengan biaya yang signifikan dalam segi cakupan hutan alam; CIFOR memperkirakan bahwa 70% pasokan kayu pulp telah dipenuhi melalui penebangan hutan alam.<sup>26</sup>

Di Borneo industri pulp relatif masih belum berkembang, namun perkembangan industri sudah diantisipasi secara meluas. Saat ini, terdapat pabrik kertas besar satu-satunya di Kalimantan Timur, Kertas Nusantara (dahulu Kiani Kertas), dengan kapasitas mengolah setengah juta ton pulp per tahun (dan 200.000 ton papan serat). Terdapat juga pabrik kertas yang lebih kecil, termasuk satu di Sabah yang baru saja mengembangkan kapasitasnya dari 180.000 ton menjadi 240.000 ton, dan dua buah di Sarawak yang masing-masing berkapasitas kurang dari 100.000 ton.<sup>27</sup>

“Rencana Pelaksanaan untuk Revitalisasi Industri Hutan” Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan yang signifikan dalam industri pulp, dengan kapasitas mencapai 16 juta ton sebelum tahun 2020, yang dicapai melalui investasi swasta dan pemerintah sebesar USD 15 milyar. Proposal dilaporkan sedang dalam pertimbangan untuk 8 pabrik pulp baru di Kalimantan. Kendati tidak mungkin semua ini akan dibangun, namun yang akan dibangun dapat menaikkan tekanan pada sisa hutan di Kalimantan<sup>28</sup> kecuali ada peraturan yang diberlakukan untuk menghentikan persetujuan bagi kapasitas pulp tambahan yang tidak dapat memperlihatkan pasokan yang berkelanjutan dan pemantauan rantai pasokan pulp.

Untuk menghindari hilangnya hutan alam yang terjadi di Sumatera, dan mengurangi tekanan pada hutan alam HoB, perkembangan kapasitas pabrik pulp perlu disesuaikan dengan kenaikan yang sepadan dalam volume serat dari perkebunan yang berkelanjutan. Secara kritis, untuk menjamin agar pasokan memenuhi kebutuhan tanpa memberi tekanan yang tidak perlu pada hutan alam, perkebunan perlu direncanakan dan ditanam sebelum pabrik pulp dibangun. Perkebunan tidak boleh menggantikan hutan alam, namun sebaliknya harus diolah pada lahan tidur yang ada. Lahan tidur adalah lahan yang tidak ada penggunaannya saat ini dan juga tidak ada penggunaan tanah yang ditentukan dengan jelas, dan lahan ini juga memiliki nilai konservasi rendah dan nilai karbon yang rendah.

<sup>20</sup> Malaysian National Timber policy (Kebijakan Kayu Nasional Malaysia) 2009-2020

<sup>21</sup> Malaysian National Timber policy (Kebijakan Kayu Nasional Malaysia) 2009-2020

<sup>22</sup> Kementerian Kehutanan (2006). Data Hutan Eksekutif, *Strategis* (2006); sebagaimana dikutip dalam A Roadmap for the Revitalisation of Indonesia's Forest Industry (Rencana Pelaksanaan untuk Revitalisasi Industri Hutan Indonesia)

<sup>23</sup> Meningkat dari 750.000 ton di tahun 1995 menjadi 7,2 juta ton di tahun 2005: UN Comtrade, 2007

<sup>24</sup> [www.pulpmillwatch.org/countries/indonesia/](http://www.pulpmillwatch.org/countries/indonesia/)

<sup>25</sup> CIFOR, Industri Pulp & Kertas Indonesia: Gambaran tentang Risiko dan Kesempatan 2008

<sup>26</sup> CIFOR, Industri Pulp & Kertas Indonesia: gambaran tentang risiko dan kesempatan, 2005

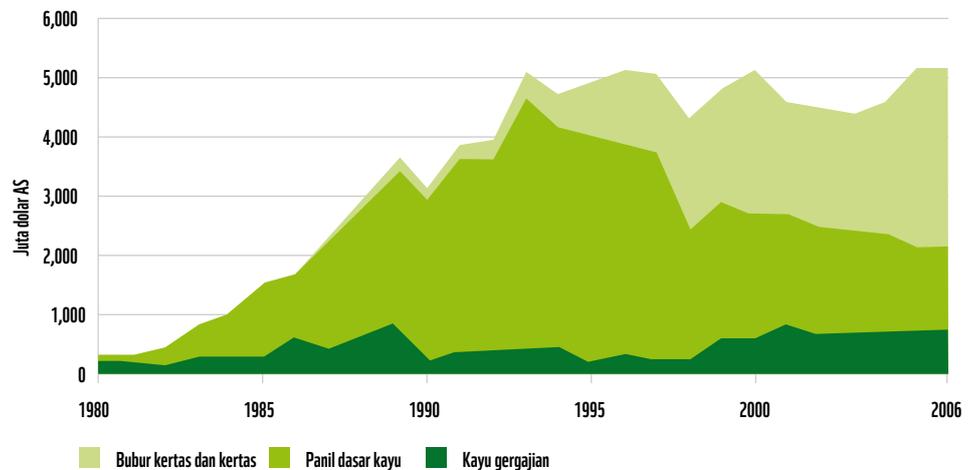
<sup>27</sup> CIRAD, Memenuhi Peningkatan Permintaan Cina akan Pulp Kayu, 2007

<sup>28</sup> Verchot et al. Reducing forestry emissions in Indonesia. (CIFOR, 2010). Kalimantan Selatan: Putra Adil Laksana; Kalimantan Timur: Kaltim Prima PGP, Sinar Mas; Kalimantan Tengah: Tranindo Sinar Utama; UFS; Kalimantan Barat: Korindo; Garunda Kalimantan; Karawang Ekawana.

## Pendapatan Industri

Sebagai bagian dari program perkebunan Sarawak, spesies akasia yang tumbuh dengan cepat saat ini sedang ditanam untuk memasok pabrik pulp baru. Misalnya, Sarawak Planted Forest Sdn Bhd akan memasok 3,2 juta kubik meter pulp kayu ke pabrik pulp berkapasitas 750.000 ton yang sedang direncanakan oleh Acacell Cellulose International Sdn Bhd di Bintulu. Selain itu, sebuah konsorsium Cina sedang merencanakan untuk menginvestasikan RM 3,3 milyar (sekitar USD 1 milyar) di Sarawak untuk membangun hutan tanaman seluas 200.000 ha untuk memasok pabrik pulp di daratan Cina.<sup>29</sup>

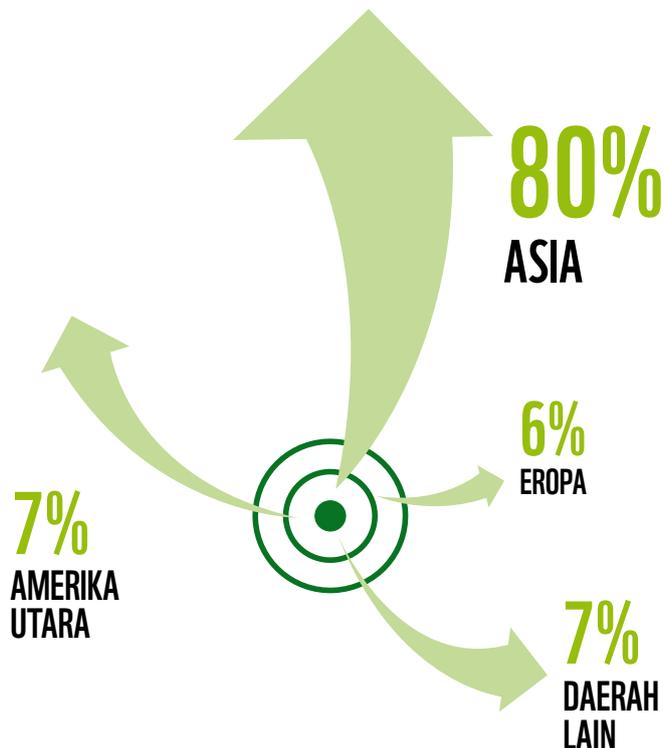
Kendati terdapat penurunan dalam produksi kayu, Indonesia dan Malaysia sudah mampu mempertahankan pendapatan ekspor kehutanan mereka. Hal ini dapat dicapai melalui diversifikasi industri; di Indonesia pulp dan kertas telah mengisi celah dalam penurunan ekspor kayu (Gambar 2.5), dan di Malaysia penjualan furnitur telah membantu mempertahankan pendapatan ekspor. Total penghasilan ekspor di Indonesia USD 6,7 milyar<sup>30</sup>, dan di Malaysia USD 6,8 milyar pada tahun 2008.<sup>31</sup>



Sumber: FAO, 2008

GAMBAR 2.5: NILAI EKSPOR PRODUK KAYU INDONESIA, 1980 SAMPAI 2006

Ekspor langsung dari Indonesia dan Malaysia pada umumnya adalah ke negara-negara Asia lainnya, dan kurang dari 6% ke Eropa.



<sup>29</sup> Wawancara dengan presiden dari Sarawak Chinese Chamber of Commerce and Industry, Sia Hiong Ngjein The Star, September 2010.

<sup>30</sup> FAO Stat, 2010

<sup>31</sup> Kebijakan Industri Kayu Nasional 2009-2020

GAMBAR 2.6: EKSPOR LANGSUNG PRODUK HUTAN DARI INDONESIA DAN MALAYSIA MENURUT TEMPAT TUJUAN

Produk hutan memberi andil 2,1% dalam Produk Domestik Bruto nasional Indonesia<sup>32</sup> dan 3% dalam PDB nasional Malaysia<sup>33</sup>; suatu proporsi yang relatif biasa saja mengingat mereka memiliki sumberdaya hutan yang kaya. Memang kedua negara ini sedang mencari nilai tambah yang lebih besar dari kegiatan kehutanan mereka. “Kebijakan Industri Perakayuan Nasional Malaysia” menetapkan rencana untuk pertumbuhan tahunan sebesar 6,4%, lebih dari dua kali lipat pendapatan sampai tahun 2020. Hal ini akan dicapai dengan peningkatan lebih lanjut dalam pengolahan hilir (pada dasarnya dari lantai kayu, venir lamina, kayu yang dilaminasi, mebel, dan produk joinery seperti pintu, jendela dan pencetak), sehingga mewakili 60% dari nilai dalam industri, naik dari 40% saat ini. Di Indonesia, mereka juga sedang melirik pada industri hilir, namun fokus dari strategi mereka adalah pada pasokan kayu, secara khusus dari pengembangan perkebunan.<sup>34</sup>



GAMBAR 2.7: KAYU BULAT DIMUAT KE KAPAL UNTUK DIEKSPOR

## Kehutanan dan Heart of Borneo

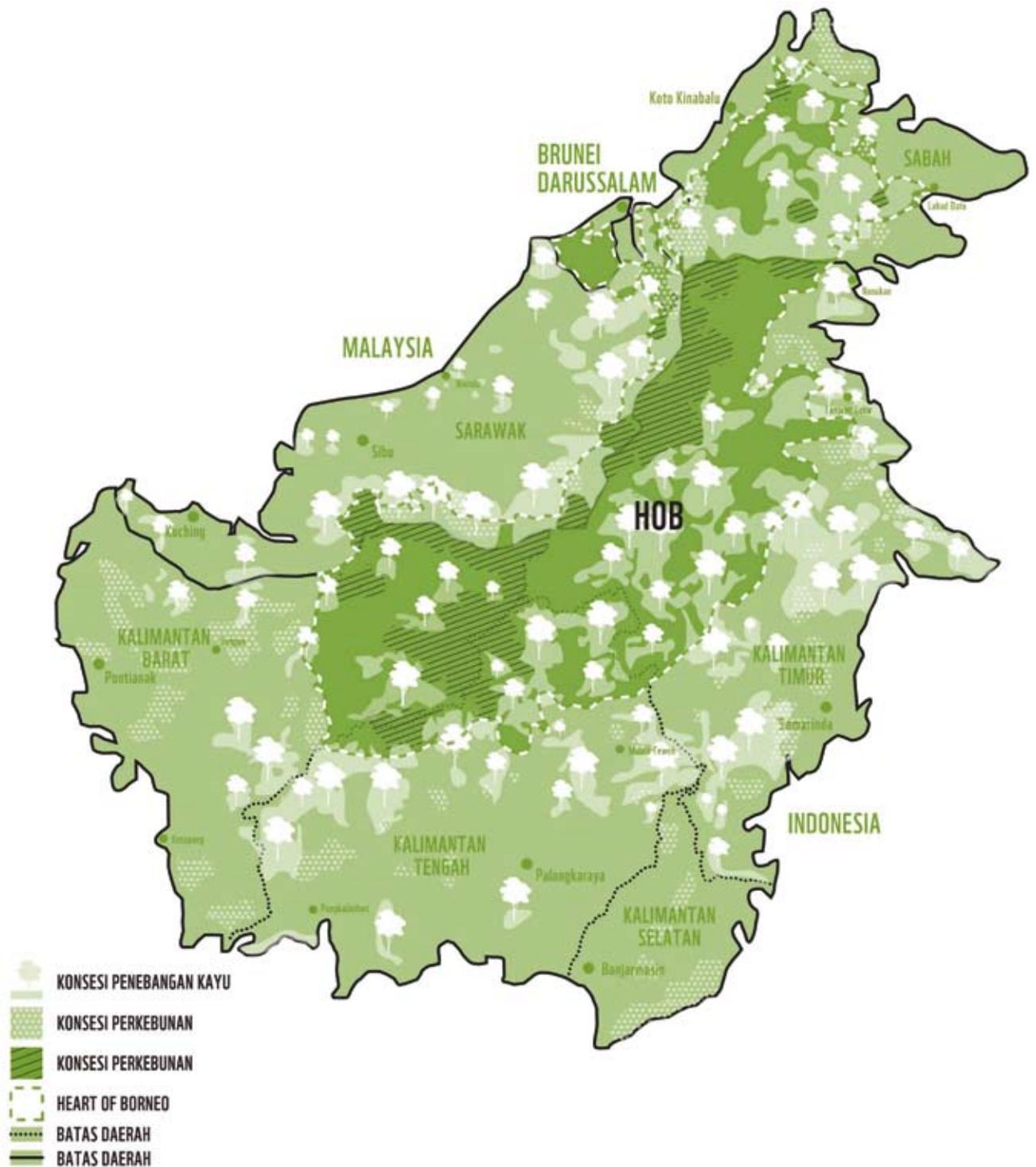
Menurunnya ketersediaan hutan utama sebagai sumber kayu memberikan tekanan meningkat pada sisa hutan yang masih utuh. Saat ini terdapat 5,8 juta ha konsesi penebangan kayu dan perkebunan di dalam HoB.<sup>35</sup> Untuk menjamin bahwa kegiatan-kegiatan ini tidak mengompromikan visi pemerintah untuk HoB maka sangat penting agar kegiatan tersebut dikelola secara berkelanjutan.

<sup>32</sup> BPS Pendapatan Nasional Indonesia, 2008

<sup>33</sup> Kebijakan Industri Kayu Nasional Malaysia 2009-2020

<sup>34</sup> Rencana Pelaksanaan Revitalisasi Industri Hutan Indonesia, 2007

<sup>35</sup> Malaysia 3,2 juta ha (Sumber: Sabah, presentasi Departemen Kehutanan Sabah, HSBC Forum, Juli 2010; Sarawak, Project Implementation Framework (PIF) Sarawak, Agustus 2009); Indonesia 2,6 juta ha (WWF data); Brunei 138.000 ha, (sumber: Feasibility Assessment Report for Financing the Heart of Borneo Landscape, hal 31)



**GAMBAR 2.8: PETA ILUSTRATIF KONSESI PENEBAHAN DAN PERKEBUNAN DI BORNEO**

Catatan: Peta ini memberikan perkiraan ilustratif dari lokasi dan luas konsesi berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum; ini tidak dimaksudkan sebagai suatu sajian yang akurat.

Di antara negara-negara bagian Borneo, Sabah saat ini memimpin dalam manajemen hutan yang berkelanjutan. Setelah penurunan dalam sumberdaya kayu alam yang tersedia, dan keprihatinan lingkungan yang berkembang, Departemen Kehutanan Sabah telah memberi mandat agar semua unit pengelolaan hutan harus disertifikasi secara independen sebelum tahun 2014, misalnya melalui FSC. Selain itu, negara ini telah mengenakan batasan yang lebih ketat terhadap penebangan tahunan yang diizinkan dan merekrut sebuah perusahaan independen untuk memantau seluruh kawasan manajemen hutan alam berdasarkan Pendekatan Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi (Reduced Impact Logging Approach). Saat ini terdapat lebih dari 270.000 ha konsesi penebangan yang dikelola secara berkelanjutan (yang disertifikasi FSC atau MTCC) di dalam wilayah Sabah pada HoB, dan sisa 1,5 juta ha di dalam area ini bermaksud mencapai jadwal tahun 2014 yang siap untuk disertifikasi. Sebagai hasil dari gerakan-gerakan menuju tingkat produksi yang berkelanjutan, produksi kayu bulat tahunan dari hutan alam kemungkinan akan sedikit menurun dalam waktu dekat, tetapi bila tujuan program ini dipenuhi, produksi yang berkesinambungan seharusnya benar-benar dapat dipertahankan dan terus memberikan nilai bagi pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam jangka panjang.<sup>36</sup>



GAMBAR 2.9: KAYU BERLABEL FSC

Di Sarawak rencana produksi dari hutan alam ditetapkan sama dengan tingkat saat ini sekitar 10 juta m<sup>3</sup> per tahun. Kebanyakan dari produksi ini kemungkinan besar akan dihasilkan dari 1,7 juta ha konsesi kayu yang aktif di dalam HoB.<sup>37</sup> Penerapan dari praktik yang berkelanjutan akan penting untuk menjamin bahwa tingkat produksi yang wajar dapat dipertahankan tanpa mengorbankan pasokan di kemudian hari dan pelaksanaan visi HoB. Untuk mencapai tujuan ini, WWF sedang membantu Ta Ann untuk berusaha mendapatkan sertifikasi FSC untuk konsesi mereka di Sarawak, mereka mengharapkan agar mereka merupakan perusahaan pertama di negara itu yang mendapatkan sertifikasi FSC.

Rencana pelaksanaan kehutanan Indonesia menekankan pada kebutuhan untuk sementara waktu menurunkan produksi hingga sumber kayu yang berkelanjutan yang cukup dapat disediakan. Saat ini terdapat 2,6 juta ha konsesi penebangan kayu di dalam perbatasan HoB di Indonesia. Pada bulan September 2010 Menteri Kehutanan mengeluarkan satu keputusan agar semua unit pengelola hutan di Indonesia sekarang harus dievaluasi berdasarkan Sistem Jaminan Legalitas Kayu Indonesia.

Beberapa perusahaan kehutanan swasta sudah melaksanakan praktik yang lebih berkelanjutan dan sebagian sedang mengarah ke sertifikasi resmi. Misalnya, Jaringan Perdagangan Hutan Global WWF (WWF's Global Forest Trade Network) sedang bekerjasama dengan 9 perusahaan kehutanan yang beroperasi di Borneo, yang mewakili lebih dari 1,3 juta ha konsesi penebangan kayu, dan 36 produsen dan eksportir di seluruh Indonesia dan Malaysia, untuk mendukung praktik penebangan yang berkelanjutan dan mengarah ke pengambilan sertifikasi FSC yang lebih banyak.<sup>38</sup> Walaupun terdapat bantuan ini, konsultasi mengindikasikan bahwa perkembangan ke arah sertifikasi bisa lambat, dalam sebagian kasus dibatasi oleh peraturan negara dan peraturan nasional yang bertentangan, atau kedudukan tetap jangka panjang yang tidak pasti.

<sup>36</sup> Kebijakan Industri Kayu Nasional 2009-2020

<sup>37</sup> Project Implementation Framework (PIF) Sarawak, 2009

<sup>38</sup> [http://gftn.panda.org/gftn\\_worldwide/asia/indonesia\\_ftn/](http://gftn.panda.org/gftn_worldwide/asia/indonesia_ftn/)

## Penebangan liar

Inisiatif baik pemerintah dan perusahaan yang semakin berminat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan kian terancam oleh kehutanan ilegal. Kantor PBB bidang Obat-obatan dan Kejahatan memperkirakan bahwa Indonesia kehilangan antara 1,6 dan 2,8 juta ha hutan setiap tahun karena pembabatan hutan secara ilegal.<sup>39</sup> Akan tetapi, penebangan liar diperkirakan semakin menurun; misalnya, perkiraan konsumsi kayu bulat ilegal oleh pabrik kertas hanya separuh antara 2002 dan 2005 dari 42,5 juta m<sup>3</sup> menjadi 20,3 juta m<sup>3</sup>.<sup>40</sup> Upaya pemerintah untuk menghentikan penebangan liar sudah pasti memberi andil dalam penurunan ini. Misalnya, di Sabah 245 kasus penebangan liar sedang diselidiki di tahun 2008 (193 orang ditangkap dan 106 dihukum penjara) dan 150 kendaraan disita.<sup>41</sup> Larangan ekspor kayu bulat yang berdiameter lebih dari 30 cm di Indonesia dan Malaysia juga diperkirakan telah memberikan andil terhadap penurunan penebangan liar.



UMBARA E. 10. KAYU ILEGAL DIATUR DI PERANGI SUNDA

Perjanjian internasional juga mendorong untuk pengendalian yang lebih besar pada rantai nilai hutan. Yang paling menonjol adalah undang-undang EU Forest Law Enforcement, Governance and Trade – FLEGT (Penegakan Hukum, Pengelolaan dan Perdagangan Hutan Uni Eropa), yang diberlakukan tahun 2013, bertujuan untuk menjamin bahwa tidak ada kayu yang masuk ke Uni Eropa yang berasal dari sumber ilegal. Undang-undang tersebut menetapkan perjanjian bilateral antara negara-negara yang memiliki hutan dan Uni Eropa untuk bekerjasama menegakkan penebangan liar. Perjanjian bilateral dengan Indonesia dan Malaysia difokuskan untuk meningkatkan harmonisasi undang-undang nasional dan regional, pembangunan kapasitas di Kementerian Kehutanan dan badan pemeriksa untuk memperbaiki manajemen kehutanan dan meningkatkan teknik-teknik yang berkelanjutan. Selain itu perjanjian bilateral menetapkan ketentuan bagi pemeriksaan oleh pihak ketiga terhadap izin kehutanan dan rantai nilai untuk menjamin legalitasnya.

## Ringkasan

<sup>39</sup> Angka dikutip dari Kementerian Kehutanan Indonesia - <http://www.unodc.org/unodc/en/frontpage/2010/June/illegal-logging-in-indonesia-the-link-between-forest-crime-and-corruption.html>

<sup>40</sup> Rencana Pelaksanaan Revitalisasi Industri Hutan Indonesia

<sup>41</sup> Laporan Tahunan Departemen Kehutanan Sabah 2008

# TANTANGAN DAN SOLUSI LINGKUNGAN DAN SOSIAL

Perkembangan dan pembangunan yang terus menerus di sektor kehutanan Borneo menuntut agar diberi perhatian yang lebih lagi pada keprihatinan akan lingkungan dan sosial, khususnya dengan kehadiran konsesi penebangan dan perkebunan di dalam HoB.

Praktik-praktik lingkungan yang lebih baik sedang diterapkan oleh perusahaan-perusahaan terkemuka yang juga melihat kesempatan pendapatan melalui manajemen yang baik terhadap risiko lingkungan. Negara, pemerintah nasional dan internasional, LSM, investor dan konsumen dapat juga membantu untuk mendorong perubahan, dan menyediakan bantuan teknis yang tepat, kerangka peraturan dan isyarat harga.

Tabel 2.1 Merangkum sebagian dari isu-isu lingkungan yang potensial yang bisa timbul akibat dari manajemen kegiatan kehutanan yang buruk.

Hilangnya habitat	<b>Penebangan Hutan Alam:</b>	Pembabatan memerlukan pemindahan secara menyeluruh ekosistem hutan, yang mengakibatkan penurunan yang penting dalam habitat dan nilai ekosistem. Dampak yang berhubungan dengan penebangan selektif tidak begitu merugikan, akan tetapi bisa signifikan bila dikelola dengan buruk.
	<b>Perkebunan:</b>	Perkebunan membutuhkan area yang luas, dan apabila habitat hutan alam diganti dengan monokultur maka ini akan menghasilkan keanekaragaman hayati dan manfaat layanan ekosistem yang sangat terbatas.
Emisi Karbon		Hutan Borneo merupakan penyerap karbon penting dunia; akan tetapi, penebangan hutan melepaskan karbon yang terserap.  Pembakaran sering digunakan untuk membuka hutan, yang bisa menyebabkan kebakaran hutan yang tidak bisa dikendalikan. Kebakaran di tahun 1997/8 membakar 9,7 juta ha lahan, yang melepaskan sejumlah besar karbon dioksida. <sup>42</sup> Perkebunan pada lahan yang terbuka hanya mengisolir sebagian kecil dari emisi ini.
Erosi tanah	<b>Penebangan Hutan Alam:</b>	Pembabatan mengakibatkan erosi tanah, dan penebangan selektif yang diterapkan secara buruk dapat mengakibatkan degradasi tanah yang serius. Hujan lebat dan angin menghilangkan lapisan atas tanah yang terpapar dan terganggu sehingga menyebabkan tanah tersebut kurang produktif untuk pertanian, dan berdampak serius bagi prospek regenerasi hutan di area tersebut.
	<b>Perkebunan:</b>	Tanpa manajemen yang tepat maka perkebunan akan mengalami erosi tanah dan degradasi tanah, terutama bila lahan yang luas dibuka dan kemudian tidak ditanami setelah itu.
Degradasi aliran air	<b>Penebangan Hutan Alam:</b>	Pembukaan daerah aliran sungai penutup hutan dapat menurunkan mutu aliran air, yang mengarah ke banjir bandang dan longsor lumpur hebat yang tidak dapat diperkirakan dan membahayakan pemukiman di hilir.
	<b>Perkebunan dan Operasi Pengolahan:</b>	Perkebunan sering menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Selain itu, aliran limbah dari pengolahan kertas dapat mengandung konsentrasi zat pemutih yang tinggi yang beracun bila tidak diperlakukan dengan tepat.  Zat tersebut dapat menyerap secara alamiah ke air bawah tanah, yang mempengaruhi pasokan air minuman bagi masyarakat setempat dan area perkotaan di hilir. Pemakaian air yang berlebihan dan penyimpangan aliran air dapat mengakibatkan kekurangan di tempat lain.
Isu-isu sosial		Alokasi konsesi penebangan dan perkebunan tidak selalu mempertimbangkan hak milik atas tanah penduduk pribumi dan masyarakat yang lain. Masyarakat ini mungkin memakai lahan tersebut untuk tanaman dan pohon buah, atau untuk kegiatan sosial. Pengembangan penebangan dan perkebunan bisa menyebabkan konflik dan pengambilalihan.

TABEL 2.1: ISU-ISU LINGKUNGAN YANG POTENSIAL DISEBABKAN OLEH MANAJEMEN KEHUTANAN YANG BURUK

Isu-isu yang disebutkan di atas dibahas dalam kotak solusi berikut. Ini menyoroti tindakan praktis yang tepat yang dapat diambil oleh pemangku kepentingan yang berbeda untuk mengurangi dampaknya dan dengan demikian risikonya. Selain itu, bagian solusi menunjukkan bagaimana WWF bisa membantu perusahaan dan pemerintah dengan baik untuk menerapkan praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

<sup>42</sup> <http://www.restorpeat.alterra.wur.nl/download/Fires%20in%20Indonesia%201997-2006%20Hotspots%20RSS.pdf> (dideteksi oleh NOAA, ATSR & MODIS)

### Apa masalahnya?

#### Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Hutan sangat berharga karena berbagai alasan; mengatur aliran air, mencegah banjir dan longsor, menyimpan karbon dan menyediakan habitat bagi spesies yang terancam punah. Menebang hutan yang mempunyai nilai konservasi tinggi (HCVF) mengurangi sumber-sumber dari nilai hutan ini dan pembabatan mengakibatkan hampir seluruh sumber tersebut hilang. Apabila kawasan yang bernilai tidak diidentifikasi dan dikelola dengan tepat maka kerugian ekonomi dan lingkungan dapat lebih banyak daripada keuntungan finansial jangka pendek.

### Apa yang Anda katakan kepada kami?

**Kebutuhan akan pelayanan yang lebih baik dan lebih cepat untuk mengidentifikasi dan mengelola HCVF** – penilaian akan HCVF dapat menjadi proses yang lambat di Borneo karena kurangnya tenaga penilai, dan terdapat kebutuhan akan pedoman manajemen khusus industri yang lebih baik.

**Kerjasama untuk konservasi** – Koridor satwa liar dan inisiatif konservasi perlu direncanakan pada level lanskap yang memerlukan kerjasama multi-pemangku kepentingan yang berpotensi rumit.

**Membatasi akses** – HCVF biasanya berada di area terpencil; membatasi akses dari pelaku skala kecil dan ilegal dapat menyebabkan konflik dan menjadi padat sumberdaya.

### Solusi dan petunjuk

Penyebaran hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF) perlu dipertimbangkan sebelum mengalokasikan konsesi kehutanan dan jauh sebelum pembukaan hutan dan penanaman. Dalam situasi di mana fragmentasi habitat tidak dapat dihindari, maka koridor satwa liar yang menghubungkan hutan-hutan yang difragmentasi harus diatur dan dipelihara untuk memungkinkan migrasi dan menjamin ketahanan hidup populasi. Pedoman WWF dan FSC mengizinkan penebangan dengan dampak yang dikurangi di HCVF namun secara tegas menganjurkan agar penanaman hutan yang baru tidak menggantikan hutan primer atau area lainnya yang diperlukan untuk memelihara atau meningkatkan HCVF.

Lihat: [www.hcvnetwork.org](http://www.hcvnetwork.org) untuk alat dan pedoman terkini untuk identifikasi dan manajemen HCVF

Lihat: [www.wwf.or.id/berita\\_fakta/publications/?13160/Panduan-Identifikasi-Kawasan-Bernilai-Konservasi-Tinggi-di-Indonesia](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/publications/?13160/Panduan-Identifikasi-Kawasan-Bernilai-Konservasi-Tinggi-di-Indonesia) untuk alat HCVF Indonesia

Lihat: [www.wwf.org.my/media\\_and\\_information/publications\\_main/?9920/HCVF-Toolkit](http://www.wwf.org.my/media_and_information/publications_main/?9920/HCVF-Toolkit) untuk alat HCVF Malaysia.

## Apa masalahnya?

### Khusus penebangan – Konsesi Restorasi

Degradasi hutan merupakan permasalahan serius di Borneo. Konsesi yang tidak aktif dapat menjadi tempat penebangan ilegal dan pelanggaran perbatasan. Hilangnya nilai karena degradasi kemudian bisa menyebabkan hutan menjadi lahan tidur dan terlantar; kurangnya manajemen yang tepat dan pembatasan akses dalam kasus demikian dapat menyebabkan degradasi hingga mencapai titik di mana hutan tidak dapat dipulihkan kembali dan kawasan tersebut menjadi tanah mati.

Di Kalimantan misalnya terdapat sekitar 34 konsesi yang meliputi area seluas 3,2 juta ha yang dianggap berisiko tinggi karena ketidakaktifan.<sup>43</sup> Konsesi dapat menjadi tidak aktif karena beberapa alasan:

- Konsentrasi tinggi dari kayu bernilai rendah, konsentrasi rendah dari spesies yang paling berharga;
- Akses yang buruk atau bentuk permukaan tanah yang sulit dengan tanjakan yang curam sehingga menyebabkan pemanenan tidak ekonomis; dan
- Masalah pihak ketiga misalnya yang terkait dengan pelanggaran batas (secara legal dan ilegal) untuk jenis kegiatan lain (pertambangan, perkebunan atau pemukiman).

**Butuh keahlian teknis** – Restorasi hutan memerlukan pengetahuan teknis yang lebih daripada operasi penebangan dan oleh sebab itu perusahaan butuh dukungan.

Untuk menangani masalah lahan tidur dan konsesi yang ditinggalkan, pemerintah Indonesia memperkenalkan jenis konsesi hutan yang baru pada tahun 2008, “Konsesi Restorasi” (Peraturan Menteri Kehutanan No. P61/Menhut-II/2008). Jenis konsesi ini dirancang untuk melindungi konsesi yang terlantar sehingga bisa dipulihkan sampai pada titik di mana konsesi tersebut dapat menghasilkan kayu. Seringkali konsesi ini berdekatan dengan konsesi yang masih aktif sehingga memudahkan bagi perusahaan untuk membatasi akses, memantau restorasinya, dan selanjutnya memulai kegiatan penebangan. Dua dari konsesi seperti ini telah diberi izin di Indonesia dan 12 izin sedang menunggu. Jaringan Perdagangan dan Kehutanan Global WWF (GFTN) dengan giat membantu para ahli kehutanan Indonesia untuk melokalisir dan mengelola konsesi restorasi. GFTN mempunyai target untuk membantu 2 juta ha konsesi hutan yang terlantar untuk disetujui untuk mendapatkan status restorasi sebelum tahun 2015.

Program akan mencakup:

1. Identifikasi situs potensial yang membutuhkan pengelolaan hutan restorasi
2. Evaluasi terhadap sensitivitas sosial setempat
3. Promosi dan pemasaran untuk memungkinkan dukungan bagi konsesi restorasi
4. Fasilitasi perusahaan yang mencari konsesi restorasi di kawasan tersebut
5. Pengembangan model bisnis
6. Pengembangan skema untuk mengelola seluruh sisa konsesi hutan yang saat ini terlantar dengan tujuan untuk menghindari degradasi dan penebangan hutan lebih lanjut.

Program yang komprehensif ini harus mengembalikan kesehatan dari stok yang masih ada sehingga dapat dipergunakan di kemudian hari sebagai hutan produksi.

Anggota GFTN, PT. Alas Kusuma Group dan PT. Sumalindo masing-masing telah memohon konsesi yang terlantar yang bersebelahan dengan konsesi penebangan mereka yang ada. Begitu mutu hutan telah dikembalikan, maka hal ini bisa cocok untuk praktik penebangan berkelanjutan yang mendatangkan penghasilan.

Pembiayaan konsesi restorasi masih menjadi tantangan paling besar, karena izinnya mempunyai biaya yang sama dengan izin ekstraktif lainnya. Oleh sebab itu insentif finansial penting untuk menjamin keberhasilan konsesi restorasi.



GAMBAR 2.11: LOKAKARYA GFTN

<sup>43</sup> WWF, analisis yang tidak diterbitkan, Solusi bagi konsesi yang mati dan terlantar di Indonesia

## Khusus tentang perkebunan – Area pengolahan lahan pertanian yang bertanggungjawab

### What's the issue?

Sama halnya terdapat kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, juga terdapat banyak lahan yang tersedia, khususnya di Kalimantan, yang relatif memiliki nilai konservasi rendah biasanya karena sudah sangat terdegradasi oleh kegiatan di masa lalu dan kemudian dilerantarkan. Lahan tidur ini dalam banyak hal dapat dipakai untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan perkebunan kehutanan tanpa imbal balik lingkungan yang serius begitu hak kepemilikan atas tanah dan hak penguasaan lahan telah diklarifikasi.

Di masa lalu, sebagian konsesi perkebunan hutan yang telah diberikan untuk lahan hutan belum ditanami setelah pembukaan hutan. Adalah penting agar lahan yang terdegradasi atau terbuka seperti ini diberi prioritas untuk perkebunan baru.

**Para pembuat peraturan memainkan peranan penting** – “Pemerintah pusat dan daerah perlu menjelaskan dan menyelaraskan rencana tata ruang dan pedoman bagi alokasi lahan.”

**Diperlukan kompensasi yang cukup** – “Apabila kami diberi konsesi, insentif apa yang tersedia untuk kami kalau tidak menggunakannya?” - Lahan pengganti yang cocok harus disediakan manakala konsesi hutan dikembalikan dan dukungan untuk relokasi akan diperlukan.

**Akses yang lebih baik** – “Banyak area ini mempunyai hubungan transportasi yang buruk, dan lebih mahal untuk mencapai pabrik.” - Daya tarik lahan tidur yang ada untuk digunakan sebagai perkebunan kehutanan dapat ditingkatkan dengan menyediakan infrastruktur yang lebih baik dan akses ke pasar.

### Apa yang Anda katakan kepada kami?

### Solusi dan petunjuk

Alokasi lahan merupakan kewenangan pemerintah, itulah sebabnya mengapa WWF bekerja keras dengan pemerintah di Indonesia dan Malaysia untuk mendukung perencanaan penggunaan lahan yang baik dengan mempertimbangkan nilai dari hutan yang masih ada.

#### 1) Penggunaan lahan tidur

Area dengan nilai konservasi rendah dan lahan tidur dapat menyediakan tempat yang ideal bagi perkebunan baru apabila hak kepemilikan atas tanah dan hak penguasaan lahan telah diklarifikasi.

Sebagai bagian dari upaya WWF untuk mendukung pertumbuhan industri kehutanan yang berkelanjutan, kami telah mengembangkan suatu perangkat penilaian untuk membantu mengidentifikasi kawasan yang berpotensi untuk pengolahan yang bertanggungjawab, termasuk yang:

- Memiliki nilai konservasi rendah;
- Memiliki simpanan karbon rendah;
- Telah menyelesaikan isu tentang penguasaan lahan; dan
- Memiliki tujuan penggunaan lahan dalam rencana tata ruang nasional dan daerah.

Mekanisme ini dikembangkan untuk tanaman energi namun kami bertujuan untuk terus mengembangkannya agar dapat digunakan bagi tanaman perkebunan lainnya serta menggabungkannya dengan perangkat penilaian HCVF yang kami miliki untuk memberikan informasi tingkat tinggi yang bermanfaat tentang kawasan dengan nilai konservasi tinggi dan rendah di seluruh lanskap yang penting bagi WWF.

Lihat: [www.ecofys.com/com/publications/documents/EcofysRCAMethodologyv1.0.pdf](http://www.ecofys.com/com/publications/documents/EcofysRCAMethodologyv1.0.pdf)

Alat penilaian penguasaan lahan yang cepat dari World Agroforestry Centre (ICRAF) juga menyediakan informasi lebih lanjut tentang bagaimana menilai masalah-masalah penguasaan lahan dalam kedudukan suatu perkebunan.

Lihat: [www.worldagroforestry.org/sea/projects/tulsea/inrmttools/RaTA](http://www.worldagroforestry.org/sea/projects/tulsea/inrmttools/RaTA)

#### 2) Land Swaps

Satu inisiatif yang berpotensi berdampak tinggi adalah bekerja dengan pemerintah dan bisnis untuk bertukar konsesi dari lahan hutan bernilai tinggi ke lahan tidur bernilai rendah. Jika hal ini dapat diterima oleh sektor bisnis, masyarakat dan pemerintah maka terdapat potensi untuk mengalokasikan ratusan ribu hektar lahan hutan saat ini, sementara tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang terkait dengan industri perkebunan hutan. Terdapat kemungkinan bahwa simpanan karbon yang signifikan yang terkait dengan land swaps dapat dikonversi ke kredit karbon dan digunakan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat dan sektor bisnis atas biaya yang timbul akibat land swaps tersebut.

WWF sedang berusaha untuk mengidentifikasi area percontohan dan koalisi penerapan secepatnya, silahkan mengunjungi situs web kami untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.

#### 3) Lihat solusi HCVF di atas untuk pedoman bagaimana mengidentifikasi dan mengelola HCVF

## Praktik Manajemen Spesies

### Apa masalahnya?

Borneo merupakan tempat tinggal bagi sebagian besar spesies paling karismatik dunia, seperti gajah kerdil (pygmy elephant), orang utan dan badak. Terdapat 511 spesies yang terancam punah dalam Daftar Merah IUCN di Borneo yang akan semakin menurun bila tidak dilaksanakan pengelolaan yang cermat.<sup>44</sup>

Konflik dapat terjadi antara industri kehutanan dan spesies-spesies tersebut yang telah menyebabkan publikasi negatif internasional yang signifikan bagi industri tersebut ini di Indonesia dan Malaysia.

### Apa yang Anda katakan kepada kami?

**Satwa dapat menyebabkan kerusakan** - Sebagian satwa yang terdapat di Borneo dapat memakan atau menginjak tunas pohon yang menyebabkan gangguan pada kegiatan perkebunan dan mendatangkan biaya bagi operator.

**Ketahanan lingkungan dan sosial** - Konsultasi mengindikasikan bahwa hak masyarakat setempat harus merupakan prioritas; WWF setuju bahwa kesejahteraan manusia harus merupakan prioritas utama namun juga menegaskan bahwa dengan pengelolaan spesies yang baik maka manusia dan binatang dapat hidup bersama dengan nyaman dan masyarakat setempat serta binatang dapat memperoleh manfaat.

**Proses multi-pemangku kepentingan** - konservasi spesies membutuhkan pertimbangan pada tingkat lanskap yang memerlukan kerjasama antara pemilik lahan.

### Solusi dan petunjuk

WWF telah mengembangkan perangkat dan pelatihan bagi perusahaan yang memiliki spesies penting di dalam dan di sekitar konsesi penebangan dan perkebunan mereka. Solusi ini dapat membantu mengurangi dampak perkebunan pada spesies utama serta menghindari konflik dengan satwa yang dapat berdampak finansial tinggi bagi pemilik perkebunan; misalnya, dengan melakukan tindakan pencegahan untuk mengurangi kemungkinan satwa besar menyebabkan kerusakan pada perkebunan.

Lihat: [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork) untuk tautan ke sumber pengelolaan spesies khusus.

WWF Indonesia melalui GFTN-IND memiliki program kolaborasi yang baik untuk mendukung pengelolaan spesies. Misalnya, WWF, dan Fauna and Flora International, telah bekerjasama dengan PT SJM di konsesi Rongga-Perai mereka untuk melaksanakan penilaian HCVF dan mengembangkan rencana pengelolaan spesies, WWF akan menerapkan pelajaran dari kegiatan ini untuk membantu perusahaan lain.

<sup>44</sup> [www.iucn.com](http://www.iucn.com)

## Apa masalahnya?

## Apa yang Anda katakan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Sertifikasi

Sektor kehutanan di Borneo telah menerima publisitas internasional yang cukup negatif karena dampak yang kelihatan pada hutan tropis Borneo. WWF mengakui bahwa banyak perusahaan kehutanan ingin menjalankan bisnisnya secara bertanggungjawab dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungan. The Forest Stewardship Council dibentuk lebih dari 15 tahun yang lalu dan telah bekerja bersama dengan industri ini serta LSM sosial dan lingkungan untuk mengembangkan sejumlah dasar dan kriteria yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk menjamin bahwa mereka mencapai keseimbangan tersebut dan untuk membuktikan ini kepada para pemangku kepentingan mereka, termasuk pembeli, pembuat peraturan dan penyandang dana. WWF memperkirakan bahwa hampir 10% perdagangan global untuk kayu bulat industrial mempunyai sertifikasi FSC dan bahwa lebih dari 26% dilindungi oleh salah satu dari skema sertifikasi tersebut (misalnya FSC, PEFC dll).

**Kapasitas teknis** - "Badan sertifikasi menetapkan standar yang ketat yang sulit dipenuhi di lapangan." - Diperlukan bantuan untuk penerapan teknik-teknik baru yang membutuhkan pengetahuan spesialis untuk membantu produsen memenuhi pedoman dari badan sertifikasi.

**Diperlukan insentif yang lebih besar** - "Mengubah praktik manajemen dan memasukkan faktor-faktor keberlangsungan adalah mahal." "Pasar Eropa kecil dibandingkan pasar Asia."

WWF mengusulkan pemakaian sistem sertifikasi FSC atau standar yang setara. Indonesia dan Malaysia memiliki skema sertifikasi nasional, LEI dan MTCC. Skema-skema ini mempunyai hubungan erat dengan FSC untuk memperkuat kondisi dan proses mereka dan mendapatkan pengakuan internasional yang lebih luas, dan dengan demikian premi harga yang lebih besar. Sebuah penilaian WWF memperlihatkan bahwa sementara kayu FSC dari Borneo dapat mencapai premi harga 10% sampai 15%, premi untuk MTCC hanya sekitar 1% sampai 5%.<sup>45</sup>

Pedoman lingkungan dalam standar sertifikasi utama termasuk persyaratan untuk pengelolaan konsesi penebangan yang baik, misalnya melalui Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi (Reduced Impact Logging). Untuk perkebunan, bimbingan disediakan untuk membantu para ahli perkebunan tentang isu-isu seperti manajemen tanah dan erosi, pemakaian pupuk kimia dan pestisida, pengendalian saluran dan limbah, dan perlindungan aliran air dan fitur-fitur sekeliling lainnya.

Ada banyak cara di mana perusahaan kecil dan besar dapat mengakses dukungan untuk menuju ke arah sertifikasi berkelanjutan:

- GFTN WWF memberikan dukungan untuk menciptakan rencana langkah demi langkah untuk mendapatkan sertifikasi FSC, lihat: [www.gftn.panda.org](http://www.gftn.panda.org)
- TheBorneo Initiative memberikan hibah bagi perusahaan yang ingin mendaftar pada rencana ikatan waktu menuju sertifikasi FSC, lihat: [www.theborneoinitiative.org](http://www.theborneoinitiative.org)
- The Forest Trust (TFT) bergerak di bidang kehutanan dan pabrik, membantu perusahaan dan masyarakat untuk menerapkan praktik-praktik keberlanjutan dan sistem pelacakan kayu yang kuat. TFT membimbing para mitra untuk mencapai verifikasi legalitas pihak ketiga yang independen dan sertifikasi untuk standar FSC dan membantu membawa produk kayu yang bertanggungjawab ke pasar dengan menghubungkan pembeli, pemasok dan produsen yang bertanggungjawab. Di pulau Borneo, TFT saat ini sedang membantu para manajer dari lebih dari 550.000 ha hutan produksi untuk memperbaiki praktik manajemen hutan dan untuk mencapai legalitas dan sertifikasi berkelanjutan. TFT bekerja dengan hutan alam, perkebunan kayu dan rantai pasokan untuk kayu dan pulp dan kertas, lihat: [www.tft-forests.org/product-groups/page.asp?p=6283](http://www.tft-forests.org/product-groups/page.asp?p=6283)

### STUDI KASUS - SFI MEMPEROLEH SERTIFIKASI

#### Permasalahan

SFI adalah bagian dari perusahaan multinasional yang besar dan diharuskan mengelola usahanya sesuai dengan standar internasional tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan bersama dengan penyediaan keuntungan yang adil bagi para investornya.

#### Tanggapan

SFI merekrut TFT untuk meninjau berbagai opsi mereka untuk memenuhi persyaratan mereka, dan menyimpulkan bahwa sertifikasi melalui FSC yang paling cocok untuk memenuhi sasaran tanggungjawab korporat mereka dan juga akan memberikan akses bagi mereka ke pasar yang diproteksi untuk produk hutan berkelanjutan.

#### Hasilnya

Dengan bantuan TFT, operasi SFI dibandingkan dengan standar Kayu yang Dikontrol FSC (FSC Controlled Wood - CW) dan ditemukan beberapa kelemahan atau celah. Secara khusus, untuk mencapai sertifikasi SFI harus memastikan bahwa operasinya memberikan perlindungan yang tepat bagi hutan bernilai konservasi tinggi (HCVF). Karena kekurangan keahlian dan sumberdaya sendiri untuk menyelesaikan survei HCVF, maka SFI meminta bantuan dari WWF Malaysia untuk melakukan hal ini untuk mereka. WWF, menggunakan tenaga ahli mereka sendiri bersama dengan tenaga dari Musium Sabah, University Malaysia Sabah, Yayasan Sabah, dan Pusat Penelitian Hutan Departemen Kehutanan Sabah, mampu menghasilkan sebuah laporan yang memenuhi persyaratan FSC-CV untuk HCVF. Kerjasama yang baik dari karyawan dan kontraktor memungkinkan celah lain untuk ditutup dan pada bulan Februari 2010 SFI diberikan sertifikat FSC-CW untuk jangka waktu 5 tahun oleh SmartWood, badan sertifikasi dari Aliansi Hutan Tropis yang berbasis di AS.

<sup>45</sup> WWF, 2007 Modal Alam, Membiayai Sertifikasi Hutan di Malaysia

## Khusus tentang penebangan – Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi (Reduced Impact Logging - RIL)

### Apa masalahnya?

Praktik pengelolaan hutan yang buruk menyebabkan kerusakan yang tidak perlu terjadi bagi hutan di sekitarnya dan juga mengurangi tingkat regenerasi dan pada akhirnya pendapatan di masa depan. Penebangan dengan Dampak yang Dikurangi (RIL) adalah kumpulan teknik pemanenan yang mengurangi kerusakan terhadap hutan di sekitarnya sebesar separuh<sup>46</sup>, dan mengurangi emisi karbon<sup>47</sup>, sehingga memungkinkan pemanenan periodik dan pendapatan dari kehutanan yang berkelanjutan.

RIL memerlukan kegiatan persiapan untuk memastikan bahwa operasi pemanenan selanjutnya efisien dan meminimalkan kerusakan hutan. Kegiatan pra-panen mencakup pengumpulan informasi tentang lokasi pohon yang bernilai, yang digunakan, bersama dengan pengetahuan HCVF dan area sensitif (misalnya tanah miring), untuk menghasilkan rencana pemanenan yang menyeluruh. Operasi pemanenan itu sendiri bisa meliputi teknik lain untuk mengurangi kerusakan pada hutan, misalnya dengan memotong tumbuhan merambat yang terhubung, dan mengurangi jumlah tapak peluncur untuk menarik pohon yang ditebang.

### Apa yang Anda katakan kepada kami?

**Diperlukan insentif** - penebangan dengan dampak yang dikurangi bisa lebih mahal dan sulit untuk diterapkan dalam jangka pendek. "Sebagian perusahaan menyebutnya Reduced Income Logging (Penebangan dengan Pendapatan yang Dikurangi) karena dampaknya pada hasil/keuntungan"

**Pandangan jangka panjang** - izin kehutanan jangka pendek dan penguasaan lahan yang tidak pasti mengurangi daya tarik RIL terhadap pilihan yang lebih intensif. "Mengapa kami harus memikirkan untuk melestarikan pendapatan jangka panjang sementara kami hanya bisa mendapatkan izin jangka pendek"

### Solusi dan petunjuk

WWF bekerjasama dengan pemerintah Indonesia untuk meminta izin konsensi yang lebih panjang untuk membuat investasi dalam manajemen berkelanjutan jangka panjang lebih menarik.

RIL bisa digabungkan dengan program sertifikasi yang memungkinkan perusahaan mengakses pasar untuk menawarkan premi harga bagi produk-produk berkelanjutan (lihat solusi Sertifikasi di atas). Pada tahun 2006 PT. Sumalindo Lestari Jaya II menerima sertifikasi FSC untuk unit hutan produksi alam mereka seluas 267.600 ha di Kalimantan Timur, suatu proses di mana mereka harus memperlihatkan kemampuan mereka yang secara konsisten mempraktikkan RIL.

Untuk saran dan informasi mengenai organisasi RIL seperti GFTN WWF dan The Tropical Forest Foundation bisa dilihat di:

[www.gftn.panda.org](http://www.gftn.panda.org)

[www.tropicalforestfoundation.org](http://www.tropicalforestfoundation.org)

Untuk mengetahui lebih jauh tentang biaya dan manfaat potensial cobalah alat penghitung biaya RIL:

[www.blueoxforestry.com/rilsim](http://www.blueoxforestry.com/rilsim)

<sup>46</sup> Marsh et al., Reduced Impact Logging: A Pilot Project in Sabah, Malaysia, CIFOR, 1996

<sup>47</sup> Putz et al., Improved tropical forest management for carbon retention, PLoS Biology, 2008

## Apa masalahnya?

## Apa yang Anda katakan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Khusus tentang perkebunan— Proyek Perkebunan Generasi Baru (New Generation Plantation Project)

Perkebunan yang dirancang atau dikelola secara buruk dapat mengancam hak atau kehidupan penduduk setempat dan mendegradasi ekosistem yang berharga, namun WWF yakin bahwa produksi yang bertanggungjawab dapat memberi sumbangan positif bagi pembangunan ekonomi dan sosial setempat.

Perkebunan Generasi Baru adalah hutan tanaman yang:

- Mempertahankan integritas ekosistem;
- Melindungi area yang memiliki nilai konservasi tinggi;
- Dikembangkan melalui proses partisipasi pemangku kepentingan yang efektif; dan,
- Menyumbang dalam pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja.

**Mengubah praktik** - “Sulit melakukan perubahan dari praktik yang sudah terbukti berhasil bila kita tidak merasa yakin bahwa alternatif lain bisa sama menguntungkan.”

WWF sedang mempromosikan praktik manajemen terbaik untuk perkebunan kayu pulp (pulpwood) dan kayu melalui New Generation Plantations Project (NGPP).

Proyek tersebut menghimpun perusahaan, pemerintah dan pihak-pihak terkait dalam pasar dari seluruh dunia, termasuk perusahaan Sabahan: SFI dan Departemen Kehutanan Sabah. NGPP menanggapi kebutuhan yang berkembang untuk pemahaman yang lebih baik tentang peran yang dapat dimainkan oleh perkebunan dalam lanskap hutan, dengan mengumpulkan contoh dari perkebunan yang dikelola dengan baik dan ditempatkan dengan tepat, sebagai fitur kunci dari lanskap hutan yang sehat, beragam dan multi-fungsi, yang selaras dengan konservasi keanekaragaman hayati dan kebutuhan manusia.

Lihat situs web NGPP [www.newgenerationplantations.com](http://www.newgenerationplantations.com) untuk makalah riset yang telah dikembangkan oleh proyek ini yang secara langsung merespons kebutuhan yang diangkat oleh perusahaan-perusahaan perkebunan yang terlibat.

Makalah-makalah ini mencakup:

- Keterlibatan pemangku kepentingan;
- Integritas ekosistem; dan
- Hutan bernilai konservasi tinggi.

Pedoman Sukarela tentang Pengelolaan Hutan yang Ditanami yang Bertanggungjawab (Voluntary Guidelines on the Responsible Management of Planted Forests) dari FAO lebih jauh memberikan sumber yang bermanfaat bagi para manajer perkebunan: [www.fao.org/docrep/009/j9256e/j9256e00.HTM](http://www.fao.org/docrep/009/j9256e/j9256e00.HTM)



GAMBAR 2.12: PERKEBUNAN YANG DIPELIHARA DENGAN BAIK

## Pembiayaan yang Bertanggungjawab

### Apa masalahnya?

Perusahaan kayu harus memberi jawaban kepada investor dan pemegang saham mereka dan memperlihatkan bahwa dana mereka dipakai dengan baik. Banyak dampak lingkungan yang potensial dari penebangan dan perkebunan yang dapat dicegah melalui penerapan praktik manajemen yang baik dan para investor dapat memberikan sumber pendorong yang penting untuk menerapkan praktik ini.

### Apa yang Anda katakan kepada kami?

**Insentif berlaku bagi perusahaan yang lebih besar** - Perusahaan besar yang mencari investasi, khususnya dari bank-bank dan investor internasional, mendapati kriteria peminjaman yang bertanggungjawab sebagai insentif penting untuk bertindak; 35% mencatat akses ke keuangan merupakan motivasi penting bagi keberlangsungan.

**Pemberi pinjaman setempat kurang memberikan perhatian** - investor dan pemberi pinjaman bisnis yang lebih kecil sering kurang perhatian pada keberlanjutan dan operator yang lebih kecil memiliki akses yang kurang ke berbagai bentuk pembiayaan sehingga kriteria pembiayaan tidak memberikan insentif yang kuat.

### Solusi dan petunjuk

Sebagian bank utama yang aktif di wilayah Borneo memiliki kebijakan yang mencegah investasi dalam operasi yang tidak berkelanjutan dan mendorong investasi dalam bisnis kayu yang berkelanjutan.

WWF telah membuat pedoman yang terperinci untuk membantu lembaga keuangan mengembangkan dan menerapkan kebijakan investasi dan pembiayaan kayu yang bertanggungjawab, lihat di: <http://assets.panda.org/downloads/wwfinvestmentpol7oct03final.pdf>

The World Business Council for Sustainable Development (Dewan Usaha Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan) dan PricewaterhouseCoopers juga membuat alat untuk menginformasikan pembiayaan kegiatan yang bertanggungjawab yang berdampak pada hutan: [www.pwc.co.uk/pdf/forest\\_finance\\_toolkit.pdf](http://www.pwc.co.uk/pdf/forest_finance_toolkit.pdf)

Pedoman selanjutnya tersedia melalui: UNEP Finance Initiative (Inisiatif Keuangan UNEP), UN Principles for Responsible Investment (Prinsip-prinsip bagi Investasi yang Bertanggungjawab PBB), dan Equator Principles.

## Apa masalahnya?

## Apa yang Anda katakan kepada kami? Solusi dan petunjuk

### Insentif Finansial Baru

Hutan menyediakan jasa ekosistem yang berharga bagi masyarakat; akan tetapi, perusahaan swasta sering tidak mempertimbangkan nilai-nilai ini ketika membuat keputusan menebang hutan atau membatasnya untuk perkebunan, yang mengakibatkan kerugian bersih terhadap nilai tersebut bagi masyarakat. Insentif finansial baru sedang dikembangkan dan diterapkan untuk mendorong pertimbangan yang lebih luas mengenai nilai hutan publik oleh sektor swasta.

Insentif finansial baru termasuk pembayaran untuk jasa ekosistem, pembayaran untuk kredit karbon yang dihasilkan melalui Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) dan proyek Clean Development Mechanism (CDM), serta mengakses premi harga melalui badan sertifikasi.

Program-program REDD+, misalnya, mengarahkan pembayaran kepada ahli perkebunan yang mengurangi emisi karbon mereka dari penebangan hutan alam, baik melalui manajemen hutan yang berkelanjutan, penebangan dengan dampak yang dikurangi, atau restorasi dan konservasi hutan. REDD+ saat ini beroperasi melalui pasar karbon sukarela, akan tetapi, upaya sedang dilakukan untuk memberlakukan mekanisme internasional untuk REDD+, dengan tujuan untuk mendapatkan arus uang yang lebih besar. Untuk sementara waktu, sebuah perjanjian bernilai USD 1 milyar antara Norwegia dan Indonesia sedang berusaha untuk melakukan penundaan pembukaan hutan baru antara 2011 dan 2013. Bagaimana dana ini akan dialokasikan kepada manajer hutan saat ini sedang dibicarakan. REDD+ bisa membantu untuk membuat FSC/RIL lebih menarik secara finansial jika mekanisme yang ketat yang menambahkan pendapatan manajemen hutan berkelanjutan dengan pendapatan kredit karbon dapat dikembangkan.

**Insentif finansial** – LSM dan pemerintah perlu membantu para produsen untuk mempelajari tentang insentif finansial baru yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya. “Ahli kehutanan tradisional tidak biasa dibayar untuk tidak menebang pohon!”

WWF sedang bekerjasama dengan tiga pemerintah HoB untuk membantu mereka memahami nilai hutan HoB dan juga bagaimana membiayai pelaksanaan Deklarasi HoB secara berkelanjutan. Di bulan Oktober 2001 ketiga pemerintah meluncurkan penilaian pembiayaan yang berkelanjutan untuk HoB. Ini menggarisbawahi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia untuk mendukung perusahaan, pemerintah dan masyarakat untuk mencapai Deklarasi HoB, lihat situs web kami untuk keterangan lebih lanjut.

Terdapat keuntungan yang nyata dari insentif finansial baru bagi operator kehutanan. Misalnya, ada sejumlah proyek rintisan REDD+ di Borneo. Proyek Konservasi Ramba Raya meliputi 91.000 ha di Kalimantan Tengah dan saat ini menjual kredit karbon melalui pasar sukarela ke Gazprom Marketing & Trading. Area tersebut dibeli oleh InfiniteEARTH untuk mencegah pembukaan hutan.

Proyek Ramba Raya adalah contoh “konservasi murni”, akan tetapi, proyek-proyek REDD+ bisa beroperasi bersama dengan manajemen hutan berkelanjutan. Misalnya, proyek INFAPRO di Sabah sedang merehabilitasi 25.000 ha hutan yang terdegradasi, dan juga menjual kredit karbon melalui pasar sukarela. Menyusul restorasi, hutan tersebut akan dikelola secara berkelanjutan untuk produk kayu dan produk hutan lainnya. Ia juga bertindak sebagai penahan dampak bagi Area Konservasi Danum Valley yang bersebelahan.

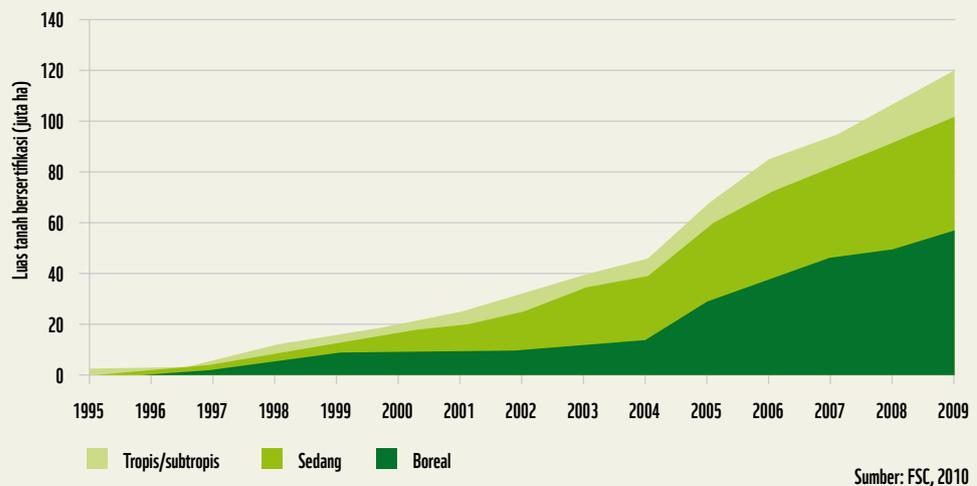
WWF mempunyai sejumlah inisiatif yang sedang berjalan untuk membantu para produsen, investor dan pembuat peraturan mengakses insentif finansial yang baru. WWF AS juga merupakan mitra dalam The Natural Capital Project - proyek ini telah mengembangkan alat yang disebut InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-Offs), suatu alat yang membantu memetakan dan menilai jasa yang disediakan oleh alam. Kami sedang bekerjasama dengan ketiga pemerintah HoB untuk menggunakan alat ini di HoB. Hasilnya akan menarik bagi pembuat kebijakan pemerintah dan juga perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat di: [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork)

## Apa permasalahannya?

### Mendorong Permintaan akan Produk Hutan Berkelanjutan

Ada kesadaran yang meningkat di antara konsumen akan dampak lingkungan dan sosial negatif yang potensial yang berhubungan dengan produk hutan yang dihasilkan secara tidak berkelanjutan. Akibatnya, permintaan untuk produk yang berasal dari sumber yang berkelanjutan telah meningkat secara signifikan selama 15 tahun terakhir. Perusahaan anggota GFTN WWF memperdagangkan lebih dari USD 70 milyar produk hutan setiap tahun, 40% di antaranya bersertifikasi FSC; diperkirakan USD 28 milyar material FSC. Diperkirakan bahwa dari data saat ini tentang kehutanan bersertifikat FSC sekarang sudah mencapai lebih dari 120 juta hektar (Gambar 2.13). Akan tetapi, untuk mendorong terus berkembangnya sertifikasi FSC, diperlukan premi harga yang sebaliknya membutuhkan agar permintaan akan material bersertifikasi FSC terus meningkat paling tidak sesuai dengan kenaikan dalam pasokan.



GAMBAR 2.13: KAWASAN HUTAN BERSERTIFIKASI FSC

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Kurangnya informasi pasar** – Informasi tentang permintaan akan kayu bersertifikasi dan premi potensial perlu disampaikan pada rantai pasokan kepada produsen setempat. “Premi harga hanya tersedia bagi perusahaan yang terintegrasi secara vertikal, perusahaan kecil mempunyai insentif lebih sedikit untuk mendapatkan sertifikasi.”

**Kurangnya permintaan di pasar utama** – Cina dan wilayah lain di Asia (kecuali Jepang dan Australia) saat ini tampaknya kurang begitu peduli dengan asal dari pasokan. “Produksi yang bersertifikasi kebanyakan untuk Eropa, tetapi ini hanya sebagian kecil dari keseluruhan pasar.”

## Solusi dan petunjuk

WWF yakin bahwa manajemen yang berkelanjutan atas hutan alam bisa menjadi cara yang penting untuk menjaga tegaknya hutan dan bahwa perkebunan kayu yang dikelola secara berkelanjutan, di tempat yang tepat, dapat menghilangkan tekanan pada hutan. WWF sedang bekerja keras untuk memastikan bahwa permintaan akan kayu yang berkelanjutan terus meningkat untuk menjaga dan meningkatkan insentif untuk mendapatkan sertifikasi.

Misalnya, seluruh perusahaan anggota GFTN telah berkomitmen untuk mencari sumberdaya kayu yang 100% berkelanjutan dan bersertifikasi FSC. Lihat: [www.gftn.panda.org](http://www.gftn.panda.org) untuk informasi lebih lanjut.

WWF juga mengakui perlunya berbuat lebih banyak lagi untuk mendorong pasar Asia membeli produk hutan yang berkelanjutan dan sekarang kami mempunyai program yang aktif untuk melakukan hal itu di ke dua negara. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangannya silakan kunjungi: [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork)

Apa permasalahannya?

Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

Solusi dan petunjuk

## Membeli Kertas yang Ramah Lingkungan

Konsumsi kertas yang berkembang memerlukan peningkatan dalam area perkebunan kayu pulp. Para konsumen dan distributor kertas dapat membantu pemakaian metoda produksi yang berkelanjutan melalui pencarian sumber kertas yang ramah lingkungan.

**Permintaan adalah kunci** - "Kecuali pembeli menetapkan permintaan untuk kertas bersertifikasi maka tidak ada insentif untuk memproduksinya, terutama mengingat harga yang terkait dengan itu."

Untuk mengurangi jejak lingkungan dari produksi kertas dan konsumsi kertas, WWF telah mengembangkan satu situs 'paper toolbox' untuk membimbing produsen kertas serta pembeli kertas individu maupun perusahaan: [wwf.panda.org/how\\_you\\_can\\_help/live\\_green/at\\_the\\_office/reducing\\_paper/paper\\_toolbox/](http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/at_the_office/reducing_paper/paper_toolbox/)

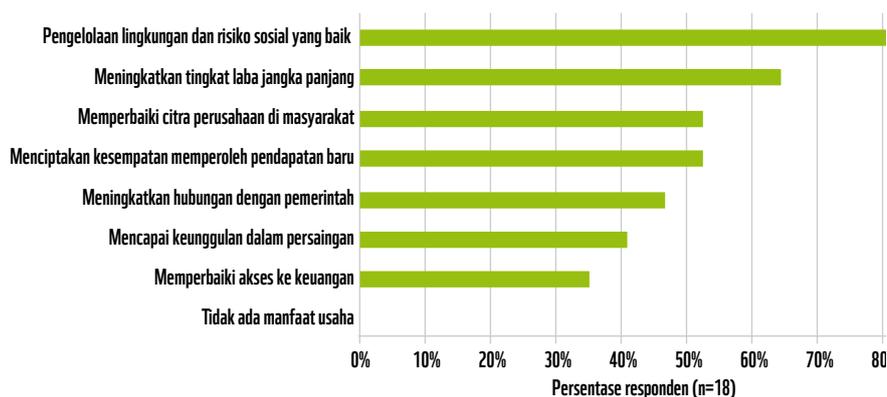
Kami juga menerbitkan "Paper Guide" untuk membantu pembeli kertas dan konsumen akhir untuk menerapkan pendekatan yang bertanggungjawab secara lingkungan dan sosial dalam mencari sumber kertas: [http://assets.panda.org/downloads/wwf\\_paper\\_guide.pdf](http://assets.panda.org/downloads/wwf_paper_guide.pdf)

Selain itu, 'WWF Paper Scorecard' merupakan alat praktis yang membantu pembeli kertas untuk menilai jejak lingkungan dari kertas yang mereka beli, dan memungkinkan produsen kertas yang bertanggungjawab untuk memperlihatkan apa yang mereka lakukan untuk meminimalkan dampak lingkungan yang negatif dari produk kertas yang mereka jual: [wwf.panda.org/how\\_you\\_can\\_help/live\\_green/at\\_the\\_office/reducing\\_paper/paper\\_toolbox/tools\\_for\\_paper\\_buyers/wwf\\_paper\\_scorecard/](http://wwf.panda.org/how_you_can_help/live_green/at_the_office/reducing_paper/paper_toolbox/tools_for_paper_buyers/wwf_paper_scorecard/)

## Kasus bisnis untuk kehutanan yang berkelanjutan di Borneo

Kasus bisnis untuk mengurangi penebangan hutan dan memperbaiki praktik lingkungan semakin diakui di tingkat nasional dan internasional berdasarkan nilai yang diberikan oleh ekosistem yang masih utuh bagi masyarakat.

Pada tingkat perusahaan individual kasus bisnis untuk praktik yang berkelanjutan bisa lebih rumit. Berbagai tantangan, sering dikaitkan dengan biaya dan kapasitas teknis, telah diidentifikasi oleh para produsen dan ini dibahas pada bagian sebelumnya. Sekalipun terdapat tantangan, manfaat bisnis dari perbaikan praktik lingkungan semakin diakui oleh sebagian perusahaan perkebunan di Borneo.



GAMBAR 2. 14: MANFAAT DARI PRAKTIK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG BAIK DILAPORKAN OLEH PERUSAHAAN KEHUTANAN DI BORNEO

Gambar 2. 14 didasarkan pada wawancara dan survei dengan 18 responden dari perusahaan kehutanan yang beroperasi di Sabah, Sarawak dan Kalimantan. Sebanyak 82% dari kelompok ini mengidentifikasi manajemen risiko lingkungan dan sosial yang baik sebagai manfaat dari kegiatan yang berkelanjutan, sementara dua pertiga (65%) dari responden berpendapat bahwa kegiatan yang berkelanjutan akan memperbaiki profitabilitas mereka dalam jangka panjang. Lebih dari separuh (53%) merasa bahwa perusahaan mereka akan mendapat manfaat dari citra publik yang lebih baik dan sebagian lagi mengatakan kesempatan untuk mendapatkan sumber pendapatan baru sebagai alasan untuk mengejar praktik yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam kotak solusi pada halaman sebelumnya; dari permintaan yang meningkat akan produk hutan bersertifikasi FSC dan dana internasional yang baru untuk menghindari penggundulan hutan; sampai ke penegakan yang diperketat atas peraturan yang ada dan persyaratan pembiayaan yang baru dari pemberi pinjaman; banyak faktor muncul bersama-sama untuk memperkuat kasus bisnis untuk kehutanan yang berkelanjutan di Borneo.



Bagian pertama dari bab ini membahas tentang produksi kelapa sawit, konsumsi dan ekspor di Borneo dan meletakkan ini dalam konteks perkembangan akhir-akhir ini pada industri kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia, memperhatikan implikasinya bagi HoB. Bagian kedua bab ini memperluas analisa ini untuk secara khusus membahas dampak lingkungan dan sosial terkait dengan produksi kelapa sawit, tantangan dalam mengejar praktik yang lebih berkelanjutan yang diidentifikasi oleh produsen kelapa sawit di Borneo, dan mengusulkan solusi praktis terhadap tantangan ini. Bagian akhir menyimpulkan hasil dari keterlibatan kami dengan para produsen untuk menyimpulkan kasus bisnis bagi kelapa sawit yang berkelanjutan di Borneo.



**PERMINTAAN AKAN KELAPA SAWIT  
YANG BERKELANJUTAN SEDANG  
MENGUBAH PASAR.**



# BAB 3

## SOLUSI BISNIS UNTUK KELAPA SAWIT YANG BERKELANJUTAN DI BORNEO



- Industri kelapa sawit di Borneo telah mengalami pertumbuhan pesat, dan terus berkembang untuk memenuhi permintaan dunia yang meningkat. Produksi kelapa sawit Indonesia dan Malaysia mencapai 85% dari pasokan global dan produksi di Borneo tahun 2008 mencapai 16,5 juta ton, mewakili lebih dari sepertiganya.
- Perkebunan kelapa sawit membutuhkan konversi penggunaan lahan secara keseluruhan; apabila konsesi ditempatkan pada area yang mempunyai nilai konservasi tinggi maka hal itu dapat mengakibatkan kehilangan yang signifikan dalam nilai ekosistem. Tantangan bagi visi pemerintah yang diabadikan dalam Deklarasi Heart of Borneo (HoB) adalah untuk menjamin agar dengan meningkatnya area yang ditanami, perlindungan yang cukup harus diberikan bagi HoB.
- Pendapatan di masa depan dari industri ini dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan, dengan berkonsentrasi pada peningkatan produktivitas, terutama di antara pengusaha kecil, memperluas perkebunan pada lahan tidur dan mengembangkan industri pengolahan hilir untuk menambah nilai tanpa menambah tekanan untuk mengonversikan hutan alam.

### Rekomendasi

- Perencana pemerintah harus bertujuan untuk menjamin konsesi tidak dialokasikan pada area yang memiliki nilai paling tinggi di HoB, akan tetapi pada lahan tidur atau lahan dengan nilai konservasi rendah.
- Peralihan ke produksi yang berkelanjutan, disertifikasi secara independen melalui Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO), akan menghasilkan kinerja lingkungan yang lebih baik pada perkebunan yang ada dan yang baru.
- Para investor, pedagang dan konsumen harus membantu mendorong manajemen yang berkelanjutan melalui pembiayaan dan pencarian sumberdaya untuk produksi yang bersertifikasi.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada bagian solusi:

Kegiatan	Solusi	Halaman
Penempatan dan perencanaan	Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi	55
	Kawasan Pengolahan yang Bertanggungjawab	56
Pengelolaan	Praktik Pengelolaan Spesies	57
	Sertifikasi RSPO	58
	Meningkatkan Produktivitas Petani Kecil	59
Pembiayaan	Keuangan yang Bertanggungjawab	60
	Insentif Finansial Baru	61
Pembeli	Mendorong Permintaan akan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan	62

## Pendahuluan

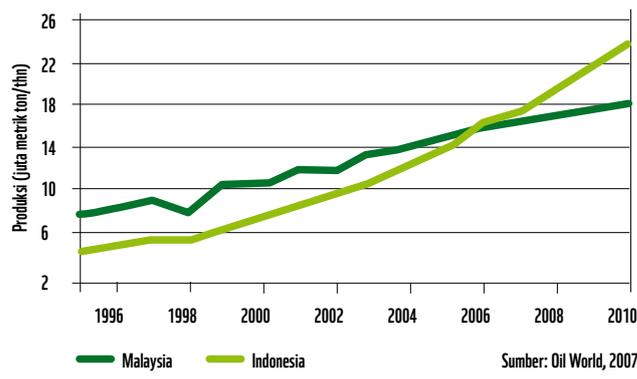
Perkebunan kelapa sawit mendominasi bagian terbesar dari lanskap Borneo. Terdapat lebih dari 3,6 juta ha perkebunan kelapa sawit di seluruh Borneo, kebanyakan dari lahan ini sebelumnya adalah hutan tropis dataran rendah. Tanpa adanya perencanaan dan peraturan yang tepat, perluasan kelapa sawit dapat mengancam integritas HoB. WWF mengakui bahwa industri ini terus menjadi penyumbang terbesar bagi perkembangan ekonomi dan sosial masyarakat di Borneo. Akan tetapi, terdapat kesadaran yang meningkat akan biaya lingkungan dan ekonomi yang ditimbulkan oleh konservasi area yang bernilai konservasi tinggi. Potensi biaya perluasan kelapa sawit ini dapat dihindari akan tetapi ini akan memerlukan penerapan luas praktik yang berkelanjutan, bersama dengan perubahan dalam peraturan dan cara bagaimana pemerintah nasional dan regional membagi serta mengalokasikan lahan.

Dengan demikian, tantangan bagi visi pemerintah yang diringkas dalam Deklarasi HoB adalah untuk menjamin bahwa karena produsen berusaha memperluas kawasan dalam perkebunan, maka nilai dari hutan HoB harus dipertahankan melalui konservasi dan penggunaan yang berkelanjutan. Yang paling penting adalah rencana pemerintah harus bertujuan untuk menjamin bahwa konsesi tidak dialokasikan pada kawasan yang mempunyai nilai paling tinggi, dan bahwa kegiatan perkebunan baru dan yang ada baik yang besar maupun yang kecil diatur secara efektif. Selain itu, peralihan ke produksi yang berkelanjutan, disertifikasi secara independen melalui Round Table for Sustainable Palm Oil (RSPO), akan menghasilkan kinerja lingkungan yang lebih baik pada perkebunan yang ada dan yang baru. Juga terdapat peran yang kuat dari pembeli kelapa sawit untuk memberikan insentif bagi perubahan, melalui permintaan yang lebih besar akan produk RSPO ketimbang kelapa sawit yang tidak berkelanjutan, dan bagi penyanggah dana untuk mendorong praktik yang lebih baik melalui penerapan kriteria investasi yang berkelanjutan.

## Produksi Kelapa Sawit

Kelapa sawit diperkenalkan di Borneo oleh orang Belanda dan Inggris pada abad ke-sembilan belas. Hanya setelah akhir abad kedupuluh produksi beralih dari lahan petani rakyat ke perkebunan komersial berskala besar. Secara khusus industri ini telah mengalami pertumbuhan yang sangat luar biasa dalam dua dekade terakhir.<sup>48</sup> Indonesia dan Malaysia menghasilkan lebih dari 85% pasokan kelapa sawit dunia, menghasilkan hampir 40 juta ton per tahun dari lebih dari 10 juta hektar (ha) dalam pengolahan.<sup>49</sup>

Produksi kelapa sawit di Borneo pada tahun 2008 mencapai 16,5 juta ton, mewakili lebih dari sepertiga total produksi gabungan Indonesia dan Malaysia (Tabel 1).<sup>50</sup> Sejak tahun 2000 total kawasan yang ditanami di Borneo telah meningkat sekitar 5% per tahun di Malaysia dan 9% per tahun di Indonesia<sup>51</sup> mencapai 3,6 juta ha di tahun 2008<sup>52</sup>.



GAMBAR 3. 1: PRODUKSI MINYAK KELAPA SAWIT DI INDONESIA DAN MALAYSIA

<sup>48</sup> Oil World, 2010

<sup>49</sup> Oil Palm Industry Economic Journal, 2003

<sup>50</sup> MPOB, 2009

<sup>51</sup> Majalah Komersial Indonesia, November 2009

<sup>52</sup> BPS Kalimantan, 2009; MPOB, Statistik mengenai Komoditas, 2009; Departemen Pertanian Sarawak, 2009

Negara	Produksi (ton)			Area (ha)
	2006	2007	2008	2008
Kalimantan Barat	557,000	520,000	523,000	410,000
Kalimantan Tengah	6,300,000	6,400,000	6,400,000	712,000
Kalimantan Timur	1,400,000	2,000,000	1,700,000	410,000
Kalimantan Selatan	360,000	430,000	435,000	190,000
Sarawak	1,500,000	1,600,000	1,800,000	740,000
Sabah	5,400,000	5,600,000	5,700,000	1,200,000
Total	15,517,000	16,550,000	16,558,000	3,662,000

Sumber: BPS Kalimantan, 2009; MPOB Statistics on Commodities, 2009; Sarawak Department of Agriculture, 2009

TABEL 3.1: PRODUKSI KELAPA SAWIT REGIONAL DI BORNEO

Industri kelapa sawit merupakan bagian penting dalam ekonomi nasional Indonesia dan Malaysia, masing-masing mewakili 4,5%<sup>53</sup> dan 3,2%<sup>54</sup> dari PDB. Kelapa sawit juga memberikan sumber yang signifikan untuk lapangan kerja bagi banyak penduduk miskin di pedesaan Indonesia dan Malaysia yang mempekerjakan lebih dari 3 juta di Indonesia<sup>55</sup> dan 1,5 juta di Malaysia<sup>56</sup>. Perkembangan lebih lanjut dalam kelapa sawit memberikan potensi yang berkesinambungan bagi pembangunan ekonomi dan sosial, akan tetapi bila keprihatinan tentang lingkungan tidak ditangani secara memadai, maka biaya yang terkait dengan degradasi lingkungan pada akhirnya dapat lebih besar daripada manfaat dari produksi kelapa sawit.



GAMBAR 3.2: PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI BORNEO

### Konsumsi dan ekspor

Total konsumsi dalam negeri Indonesia kurang lebih 5 juta ton per tahun, sekitar seperempat dari produksi minyak kelapa sawit tahunannya.<sup>57</sup> Malaysia memakai sekitar 2 juta ton.<sup>58</sup> Konsumsi domestik ini terdiri dari pemakaian untuk minyak goreng, produk makanan, kosmetik, oleo-chemical dan produksi biodiesel.

<sup>53</sup> Kementerian Riset dan Teknologi, 2010

<sup>54</sup> Model Ekonomi Baru untuk Malaysia, 2010

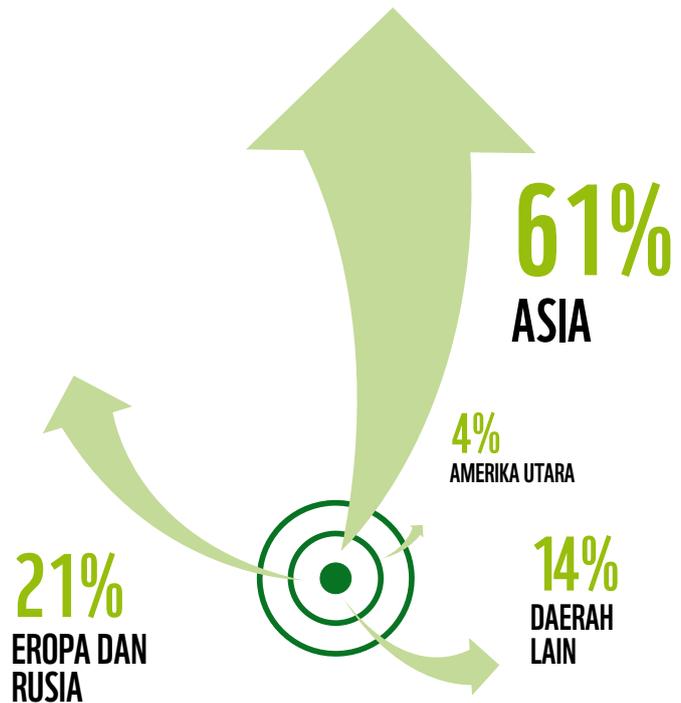
<sup>55</sup> Strategi kelapa sawit Kelompok Bank Dunia, 2010

<sup>56</sup> East Coast Economic Region Development Council, 2010

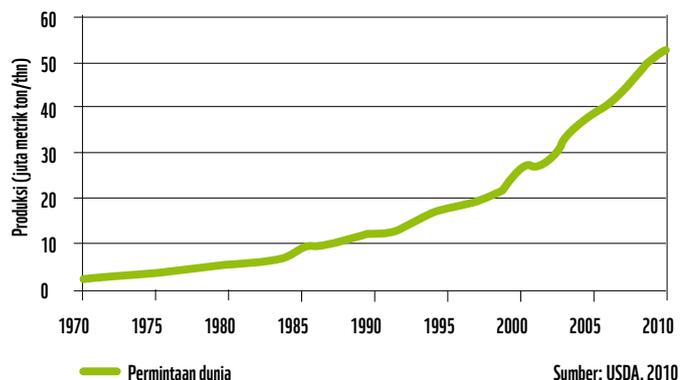
<sup>57</sup> Majalah Komersial Indonesia, November 2009

<sup>58</sup> Global oils and fats business magazine, October 2010

Sementara konsumsi dalam negeri meningkat, mayoritas produksi minyak kelapa sawit di Indonesia dan Malaysia masih diekspor. Pasar ekspor utama adalah Asia, yang mewakili lebih dari 60% ekspor dan hanya sedikit di atas seperempat diekspor ke pasar-pasar yang lebih tua di Eropa dan Amerika (lihat Gambar 3.3). Cina, India dan Pakistan kemungkinan akan tetap menjadi penggerak yang dominan dalam pertumbuhan ekspor kelapa sawit Indonesia dan Malaysia. Permintaan global akan kelapa sawit diperkirakan akan terus meningkat dan kelapa sawit sudah menjadi sumber devisa yang signifikan, yang menghasilkan pendapatan ekspor USD 12,4 milyar<sup>59</sup> di Indonesia dan USD 14 milyar<sup>60</sup> di Malaysia.



GAMBAR 3.3: TUJUAN EKSPOR KELAPA SAWIT DARI INDONESIA DAN MALAYSIA



GAMBAR 3.4: PERMINTAAN DUNIA AKAN KELAPA SAWIT

<sup>59</sup> Hatta Rajasa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, diwawancara di Bali, 2009

<sup>60</sup> MPOB, Statistik tentang Komoditas, 2009

## Produksi dan pembangunan infrastruktur

Indonesia dan Malaysia mengakui bahwa pertumbuhan eksponensial dari permintaan akan kelapa sawit tidak memperlihatkan tanda penurunan dan pemerintah sedang berusaha membangun posisi mereka di pasar. Model Ekonomi Baru Menuju 2020 Malaysia memperkirakan pertumbuhan tahunan sebesar 13,7%, dari peningkatan pada area yang ditanami, hasil yang lebih baik, dan kapasitas yang lebih besar bagi industri penyulingan hilir. Rencana Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pengolahan CPO Indonesia juga mengharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dari produksi kelapa sawit dengan meningkatkan kapasitas pengolahan dan penyulingan. Produktivitas yang lebih baik dan pembangunan yang lebih luas dalam pengolahan hilir adalah cara yang penting di mana industri kelapa sawit bisa meningkatkan pendapatan dan nilai tambah tanpa menambah tekanan pada hutan HoB.

### Menambah nilai

Sebagai bagian dari hal ini, di Indonesia pemerintah sedang merencanakan lima kluster industrial baru, termasuk tiga yang berfokus pada pembangunan industri kelapa sawit.<sup>61</sup> Mereka bertujuan untuk mengurangi ekspor minyak kelapa sawit mentah, dan meningkatkan eksor hilir, dan dengan demikian meningkatkan nilai tambah produksi. Salah satu dari kluster ini akan berada di Kalimantan Timur, dan yang lain di Riau dan Sumatera Utara. Pemerintah mengarahkan sebagian dari stimulus fiskal mereka ke arah pembangunan ini, dan secara aktif mencari investasi swasta, menawarkan berbagai insentif untuk mendorong rencana tersebut.

Demikian pula di Sabah, kluster kelapa sawit di Lahad Datu, Sandakan, dan Kimanis terus berkembang dan membuat diversifikasi, termasuk penyulingan bernilai USD 50 juta yang akan dibangun oleh Mewah Group.<sup>62</sup> Sarawak, Bintulu dan Tanjong Manis di Divisi Mukah telah diidentifikasi sebagai lokasi potensial untuk kluster karena kedekatannya ke pelabuhan laut dalam. Selanjutnya, pemerintah Malaysia sedang merencanakan peningkatan yang signifikan dalam kapasitas penyulingan sebagai bagian dari kluster kelapa sawit yang baru dalam Wilayah Ekonomi Pantai Timur di Johor, Semenanjung Malaysia yang bernilai USD 35 juta, yang akhirnya dapat mengolah minyak kelapa sawit mentah dari seluruh Malaysia. Pembangunan nasional seperti ini akan bertindak untuk menggerakkan permintaan dan pertumbuhan yang terus menerus di sektor kelapa sawit dan meningkatkan tekanan pada penggunaan lahan di HoB. Hal ini juga dapat lebih diperburuk oleh perkembangan internasional dan pasar baru, termasuk pertumbuhan pesat pasar biodiesel. Misalnya, saat ini terdapat 20 pabrik biofuel (bahan bakar hayati) yang beroperasi di Malaysia, termasuk 3 di Sabah. Sebanyak 91 izin telah disetujui untuk pembangunan pabrik biodiesel, akan tetapi hanya 7 yang saat ini sedang dalam pembangunan.<sup>63</sup> Selain itu, Nestle Oil membuka penyulingan biodiesel terbesar dunia di Singapura di bulan November 2010, yang didukung oleh Singapore Economic Development Board (Badan Pembangunan Ekonomi Singapura).



GAMBAR 3.5: PENYIMPANAN KELAPA SAWIT SETELAH PENGOLAHAN PRIMER

### Produktivitas yang lebih baik

Termasuk dalam rencana pemerintah untuk investasi dalam infrastruktur kelapa sawit adalah proposal untuk jaringan jalan baru dan yang lebih baik. Hal ini penting karena infrastruktur transportasi yang buruk merupakan salah satu hambatan bagi peningkatan produktivitas – biji kelapa sawit perlu diolah dalam waktu dua hari sejak dipanen, kalau tidak maka buahnya akan mulai membusuk sehingga mengurangi hasilnya. Namun infrastruktur transportasi yang meningkat bisa menjadi pedang bermata dua bagi area yang rentan; di satu sisi perbaikan jalan bisa meningkatkan produktivitas, sehingga mengurangi tekanan untuk konversi hutan baru, namun di sisi lain, jalan baru dapat membuka area yang sebelumnya tidak dapat diakses untuk pengembangan. Jika jalan baru menghasilkan perbaikan akses ke hutan primer maka ini dapat mengarah ke peningkatan pelanggaran batas dan penebangan liar.

<sup>61</sup> Menteri Perindustrian Mohamad S. Hidayat, diwawancara di Jakarta Post, Agustus 2010.

<sup>62</sup> Pengumuman perusahaan, Agustus 2010

<sup>63</sup> USDA Foreign Agricultural Service, Malaysia Biofuels Annual, 2010



**GAMBAR 3.6: AKSES PENTING UNTUK MENJAMIN HASIL PANEN MENCAPI FASILITAS PENGOLAHAN**

Peningkatan produktivitas adalah suatu mekanisme penting yang melaluinya perkembangan permintaan dapat, paling tidak sebagian, dipenuhi tanpa memperluas area yang ditanami. Bersama-sama dengan akses ke fasilitas pengolahan, produktivitas dapat ditingkatkan dengan memberikan bantuan kepada petani kecil. Komisi Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan bahwa produktivitas petani kecil adalah sekitar 2,5 ton per ha, dibandingkan dengan 4,1 ton per ha pada perkebunan swasta yang besar. Perbedaan ini kebanyakan disebabkan oleh mutu bibit petani kecil dan teknik pengolahannya. Perkebunan petani kecil adalah umum di Indonesia dan di Kalimantan petani kecil mewakili sekitar 25% dari area yang ditanami.<sup>64</sup> Petani kecil masing-masing mewakili 5% dan 11% dari area kelapa sawit di Sarawak dan Sabah.<sup>65</sup> Kedua negara sedang berusaha untuk meningkatkan produktivitas melalui dana bantuan penanaman kembali kepada petani kecil untuk bibit yang berkualitas (termasuk varietas yang dimodifikasi secara genetika yang berproduksi tinggi yang sedang dikembangkan) dan penanaman kembali secara strategis perkebunan yang sudah menua.<sup>66</sup> Mendukung petani kecil untuk meningkatkan produksi dan membantu dalam pengurangan dampak lingkungan memberikan potensi yang signifikan untuk mengurangi tekanan konversi pada hutan.



**GAMBAR 3.7: PENANAMAN KEMBALI PADA PERKEBUNAN INDUSTRIAL MEMAKSIMALKAN PENGGUNAAN LAHAN**

Bersamaan dengan upaya untuk meningkatkan produktivitas, baik Indonesia maupun Malaysia sedang meningkatkan total area yang ditanami mereka. Misalnya, Third Industrial Master Plan (Rencana Induk Industrial Ketiga) Malaysia berusaha mencapai 2,7 juta ha ditanam sebelum tahun 2020, peningkatan sebesar 800.000 ha dari tahun 2008. Masih lebih ambisius lagi, Sarawak bermaksud memiliki 2 juta ha perkebunan sebelum tahun 2015, suatu peningkatan sebesar 1,3 juta dari tahun 2008.<sup>67</sup> Pertumbuhan ini diharapkan terjadi di luar HoB, karena saat ini Sarawak tidak mempunyai konsesi untuk perkebunan kelapa sawit di dalam HoB. Di pihak lain, konsesi kelapa sawit yang baru di Kalimantan, khususnya Kalimantan Barat, telah dialokasikan di dalam batas-batas HoB. Terdapat 1.600.000 ha konsesi di dalam HoB; 770.000 ha konsesi aktif di Sabah,<sup>68</sup> dan 830.000 ha konsesi aktif dan yang baru dialokasikan di Kalimantan,<sup>69</sup> ini merupakan suatu ancaman yang signifikan terhadap integritas ekologi HoB.

## Perluasan perkebunan

<sup>64</sup> BPS Kalimantan Tengah Dalam Angka 2009

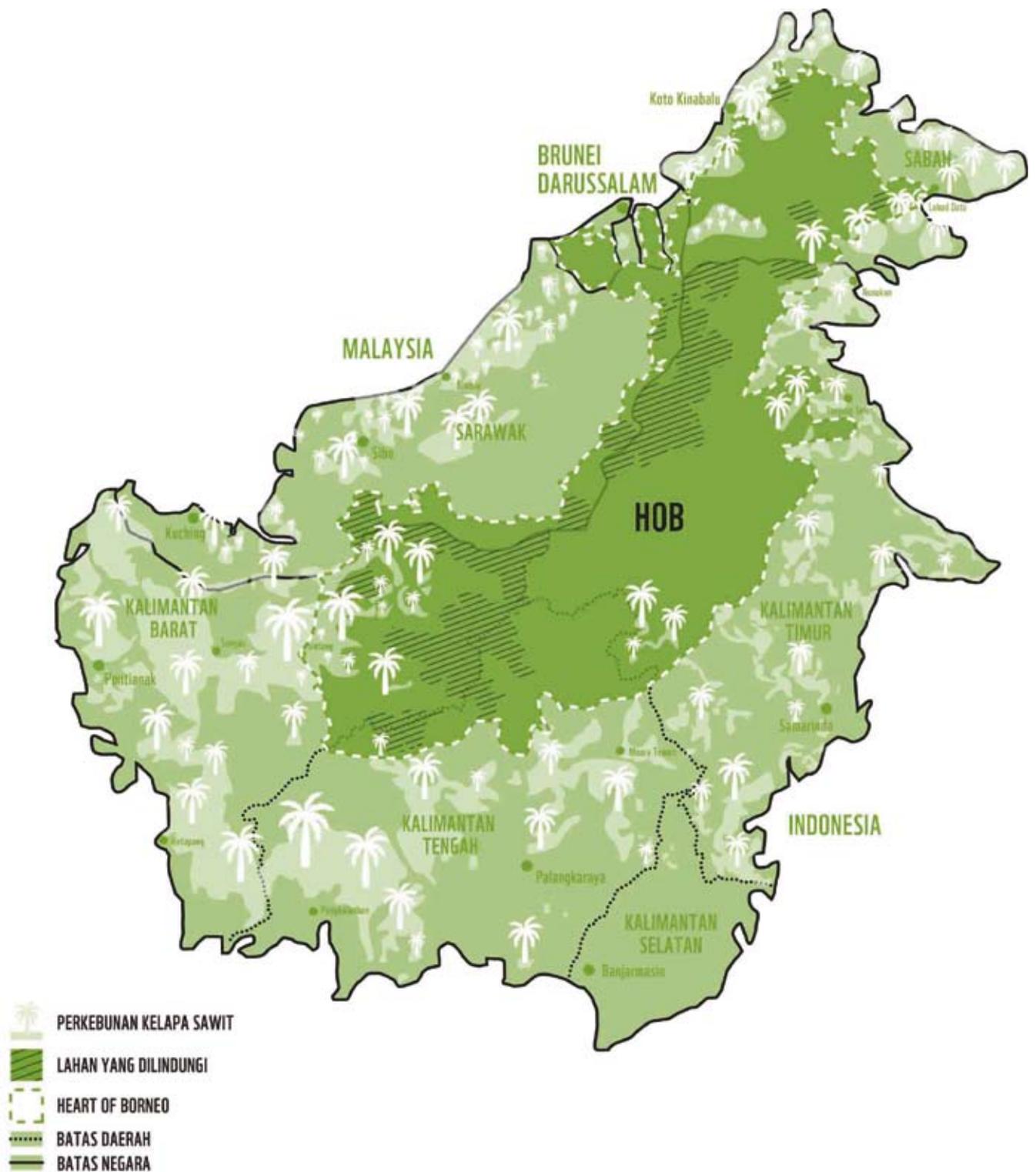
<sup>65</sup> MPOB, Statistik tentang Komoditas 2009

<sup>66</sup> Kelapa sawit mulai menghasilkan buah setelah sekitar 5 tahun, mencapai produksi puncak pada umur 8 sampai 11 tahun, setelah itu produktivitas mulai menurun.

<sup>67</sup> Menteri Pengembangan Pertanian Dr James Masing, 2007

<sup>68</sup> MPOB, 2009; perkebunan dianggap berada di dalam HoB bila terletak di dalam salah satu dari 16 kota di wilayah HoB Sabah.

<sup>69</sup> Kementerian Pertanian dan Dinas Pertanian (tingkat Kota/Kabupaten) dan survei lapangan perusahaan Kelapa Sawit WWF 2008



**GAMBAR 3.8: PETA ILUSTRATIF DARI KONSESI KELAPA SAWIT DI BORNEO**

Catatan: Peta ini memberikan perkiraan ilustratif lokasi dan luas konsesi berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum; perkiraan ini bukanlah merupakan suatu sajian yang akurat.

## Perkembangan dalam Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

RSP0 adalah suatu inisiatif multi-pemangku kepentingan yang melalui industri, penyandang dana dan LSM telah bersama mengembangkan prinsip dan kriteria yang sangat dibutuhkan untuk menjabarkan kelapa sawit yang berkelanjutan. Hal ini menjamin agar pemangku kepentingan utama seperti para pembeli internasional dan LSM mempunyai mekanisme untuk mendukung industri kelapa sawit yang berkelanjutan. RSP0 merupakan suatu skema sertifikasi sukarela, yang memberikan pedoman lingkungan dan sosial yang harus dipatuhi oleh para penandatangan, dan ini dapat membantu meminimalkan dampak lingkungan dari kelapa sawit di HoB. Sertifikasi memungkinkan para produsen mengakses pasar untuk kelapa sawit yang berkelanjutan dan secara potensial untuk mencapai premi harga. Para produsen telah mengutarakan keprihatinan bahwa premi saat ini rendah dan mungkin kemungkinan besar tidak mencukupi untuk menutupi biaya sertifikasi RSP0. Akan tetapi, kondisi tersebut ini diharapkan akan meningkat secara signifikan karena permintaan akan kelapa sawit bersertifikasi RSP0 meningkat.

Perkebunan RSP0 yang pertama disertifikasi pada tahun 2008, dan sejak itu keanggotaan telah berkembang dengan pesat. Produksi RSP0 diperkirakan akan mencapai 3,5 juta ton di tahun 2010, 7,5% dari total produksi dunia.<sup>70</sup> Di Borneo, saat ini terdapat 145.000 ha perkebunan bersertifikasi RSP0<sup>71</sup> dan 12.000 ha di antaranya berada di dalam batas-batas HoB<sup>72</sup>. Sebagian besar dijalankan oleh produsen internasional besar seperti Wilmar and Sime Derby dengan pasar signifikan di negara-negara barat. Akan tetapi, RSP0 mempunyai gugus tugas khusus yang bekerja untuk membawa sertifikasi RSP0 kepada petani kecil dan kelompok masyarakat.

<sup>70</sup> [www.rspo.eu](http://www.rspo.eu)

<sup>71</sup> 25.000 ha di Sarawak (Wilmar) dan 120.000 ha di Sabah (Wilmar, KLK, IOI Group, Sime Darby)

<sup>72</sup> [www.rspo.eu](http://www.rspo.eu)

## Ketika penurunan mutu lingkungan menjadi fakta ekonomi

Meskipun ada prospek yang menjanjikan bagi permintaan di masa depan dan pentingnya industri kelapa sawit untuk menyediakan lapangan kerja di pedesaan dan mendatangkan pendapatan ekspor, perluasan yang terus-menerus yang melibatkan pembukaan hutan yang bernilai konservasi tinggi mengakibatkan biaya lingkungan dan ekonomi yang tinggi.

Analisa baru-baru ini memperlihatkan bahwa biaya ekonomi dan sosial dari hilangnya jasa lingkungan yang berharga (seperti penyediaan air bersih, pengendalian erosi dan penampungan karbon) lebih banyak daripada keuntungan ekonomi jangka pendek dari pembukaan area yang bernilai konservasi tinggi dan konversi ke penggunaan lahan alternatif. Nilai bagi masyarakat dari hutan hujan tropis yang masih utuh telah diperkirakan sebesar rata-rata lebih dari USD 6.000 per hektar per tahun<sup>73</sup>, dibandingkan dengan keuntungan swasta sekitar USD 2.100 per hektar per tahun<sup>74</sup> dari perkebunan kelapa sawit dewasa. Sementara perkebunan kelapa sawit yang dikelola dengan baik dapat menyediakan jasa yang serupa untuk hutan, misalnya pengendalian erosi, perkebunan tidak dapat memberikan jasa lain termasuk nilai budaya dan nilai estetika, simpanan karbon yang sebanding atau jasa penyaringan air.

Dalam jangka menengah dan jangka panjang, dampak terhadap produsen dari hilangnya gizi dan erosi tanah, hilangnya pasokan air bersih dan gangguan iklim setempat yang disebabkan oleh penebangan hutan berskala besar dapat menyebabkan penurunan produktivitas dan dalam beberapa hal runtuhnya ekosistem, yang mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang signifikan. Sebagai contoh, sejak tahun 1950-an hingga akhir abad tersebut Cina secara signifikan menguras hutan alamnya untuk memenuhi kenaikan permintaan akan kayu. Dalam prosesnya, jasa ekosistem kunci seperti perlindungan daerah aliran sungai dan konservasi tanah sangat dipertaruhkan. Hal ini mencapai puncaknya pada tahun 1997 ketika kekeringan yang sangat parah menyebabkan jangkauan yang lebih rendah dari Yellow River mengering sampai 267 hari, yang mengancam pengguna air industrial, pertanian dan pemukiman. Kemudian, di tahun 1998, banjir bandang besar terjadi di hampir semua bantaran sungai besar, yang menghancurkan wilayah, dan mengakibatkan hilangnya nyawa yang cukup signifikan, pemindahan jutaan keluarga, dan menyebabkan kerugian sekitar USD 30 milyar.<sup>75</sup>

Oleh sebab itu harus diadakan mekanisme yang mengakui nilai sosial keseluruhan dari hutan, termasuk jasa yang berharga yang disediakan oleh sisa hutan yang masih utuh bagi perkebunan kelapa sawit yang ada. Diperlukan suatu perubahan dalam struktur insentif yang saat ini berpihak pada konversi hutan. Ini bukan berarti akhir dari perluasan kelapa sawit di Borneo, namun harus mendorong realokasi konsesi kelapa sawit baru ke area yang kurang bernilai (misalnya lahan yang sudah tidak digarap) dan mendorong praktik lingkungan yang lebih baik pada perkebunan yang ada untuk menjamin bahwa setiap manfaat tidak dikalahkan oleh kerugian bagi masyarakat.

Mengalihkan perkebunan ke lahan tidur bisa menjadi solusi yang sama-sama menguntungkan. Konservasi terhadap sisa hutan yang masih tegak mempertahankan nilai dari jasa ekosistem hutan dan dengan menanam pada lahan tidur maka dimungkinkan untuk memperbaiki mutu lingkungan lahan tersebut bersamaan dengan menghasilkan pendapatan kelapa sawit. WWF sedang merencanakan untuk menguji hal ini dari segi lingkungan, sosial dan ekonomi pada proyek Kutai Barat di Kalimantan Timur.

Bisnis tidak perlu menghadapi tantangan dari peralihan ke ekonomi hijau sendiri. Seluruh ahli waris dari jasa ekosistem perlu bekerja-sama untuk melindungi sisa hutan Borneo; dana internasional harus disediakan untuk mengakui jasa yang disediakan secara internasional (misalnya penyimpanan karbon), dan diperlukan tindakan dari pemerintah nasional dan negara untuk menyebarkan kembali insentif dan mendukung bisnis yang terkena pengaruh.

<sup>73</sup> The Economics of Ecosystems and Biodiversity, UN, 2010

<sup>74</sup> Koh, L.P., Wilcove D.S. (2007) Cashing in palm oil for conservation. Nature 448, 993-994.

<sup>75</sup> Sun et al. The long march of green: The chronicle of returning agricultural land to forests in China, China Modern Economics Press, 2002, as reference in TEEB for Business, 2010.

# TANTANGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL SERTA SOLUSINYA

Rencana pemerintah untuk lebih menggerakkan perluasan kelapa sawit dan pembangunan industri di Borneo menuntut agar perhatian yang lebih diberikan pada keprihatinan akan lingkungan dan sosial, khususnya mengingat kehadiran perkebunan di dalam HoB.

Praktik lingkungan yang lebih baik sedang diterapkan oleh perusahaan terkemuka yang juga melihat kesempatan memperoleh pendapatan dan manfaat melalui manajemen risiko lingkungan yang baik. Pemerintah negara, nasional dan internasional, LSM, investor dan konsumen dapat juga membantu menggerakkan perubahan, dan menyediakan bantuan teknis yang tepat, kerangka peraturan dan isyarat harga.

Tabel 3.2 menguraikan sebagian dari isu lingkungan kunci yang potensial yang dapat timbul karena pemilihan lokasi yang tidak tepat atau manajemen perkebunan kelapa sawit yang buruk.

Hilangnya habitat	Konversi terhadap kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan pada akhirnya diganti dengan perkebunan kelapa sawit mengakibatkan berkurangnya habitat dan hilangnya 80-90% spesies; yang kebanyakan mungkin asli atau terancam punah. <sup>76</sup> Habitat orang utan menurun 39% antara tahun 1992 sampai 2002. <sup>77</sup>
Emisi karbon	Hutan Borneo merupakan penampung karbon yang penting bagi dunia; penebangan hutan melepaskan karbon tersebut menyebabkan perubahan iklim global.
Pembakaran	Meskipun penggunaannya ilegal di seluruh Borneo pembakaran masih digunakan untuk membuka hutan. Pada tahun 1997/8 api membakar 9,7 juta ha lahan, dan melepaskan sejumlah besar karbon dioksida dan kebakaran masih bisa parah; yang terakhir di bulan Mei 2010. <sup>78</sup>
Degradasi tanah	Penebangan hutan, kebakaran hutan dan drainase tanah gambut memaparkan tanah tersebut pada erosi tanah. Jika tanah dibiarkan tidak digarap, atau tidak dikelola secara efektif, erosi tanah dan degradasi lahan bisa terjadi, terutama pada tanah miring. Hujan lebat dan angin menghilangkan lapisan tanah atas sehingga menjadikan tanah tersebut kurang produktif untuk pertanian, dan mengurangi kesempatan untuk regenerasi hutan. Hal ini dapat meningkatkan frekuensi dan kehebatan banjir bandang yang tidak diperkirakan dan mengancam kehidupan, infrastruktur dan lingkungan.
Degradasi daerah aliran sungai	Perkebunan kelapa sawit seringkali menggunakan pupuk kimia dan pestisida. Pemakaian yang tidak tepat dapat mengakibatkan mengalirnya polusi ke aliran sungai dan mengontaminasi air bawah tanah melalui pelindian (leaching). Hal ini kemudian dapat mencemari air minum bagi penduduk di bagian hilir dan secara negatif mempengaruhi satwa air dan hasil perikanan. Irigasi yang tidak tepat dan peralihan aliran sungai dapat juga mengakibatkan kekurangan air.
Isu-isu sosial	Alokasi konsesi kelapa sawit tidak selalu mempertimbangkan hak atas tanah tradisional dari penduduk asli dan masyarakat lain. Masyarakat ini mungkin menggunakan lahan tersebut untuk tanaman dan pohon buah-buahan, atau untuk kegiatan sosial. Perluasan perkebunan dapat menyebabkan konflik dan pemindahan.

TABEL 3.2: ISU LINGKUNGAN YANG POTENSIAL DISEBABKAN OLEH LOKASI YANG TIDAK TEPAT ATAU MANAJEMEN PERKEBUNAN KELAPA SAWIT YANG BURUK

Isu-isu di atas dibahas dalam kotak solusi berikut. Ini menyorot tindakan praktis yang tepat yang dapat diambil oleh berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi dampaknya dan oleh sebab itu mengurangi risiko bisnis. Selain itu, solusi tersebut mengidentifikasi bagaimana WWF dapat membantu perusahaan dan pemerintah untuk menerapkan dengan baik praktik-praktik yang lebih berkelanjutan.

<sup>76</sup> WWF, Borneo: Treasure Island at Risk, 2005

<sup>77</sup> Husson S. et al: The Status Of The Orang-utan In Indonesia; Report to the Orang-utan Foundation, UK, 2003

<sup>78</sup> <http://www.restorpeat.alterra.wur.nl/download/Fires%20in%20Indonesia%201997-2006%20Hotspots%20RSS.pdf> (dideteksi oleh NOAA, ATSR & MODIS)

### Apa permasalahannya?

#### Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi

Hutan sangat berharga karena berbagai alasan; mengatur aliran air, mencegah banjir dan tanah longsor, menyimpan karbon dan menyediakan habitat bagi spesies yang terancam punah. Apabila kawasan yang bernilai konservasi tinggi tidak diidentifikasi dan dikelola maka kerugian ekonomi dan lingkungan yang disebabkan oleh konversi lahan tersebut untuk kelapa sawit dapat lebih mahal daripada manfaatnya.

Perkebunan baru harus juga menghindari tanah gambut yang kaya karbon dan hutan rawa. Sekitar 50% dari perkebunan luas yang baru direncanakan di Asia Tenggara terdapat di kawasan tanah gambut<sup>79</sup>. Menurut Wetlands International, ini merupakan masalah khusus di Sarawak di mana perluasan perkebunan yang pesat kebanyakan pada tanah gambut.<sup>80</sup> Hingga baru-baru ini drainase "gambut dalam" (lebih dari 3 meter) dilarang di Indonesia. Akan tetapi, keputusan Menteri Indonesia baru-baru ini mengurangi proteksi ini dengan menyatakan bahwa konversi dan drainase gambut berkedalaman lebih dari 3 meter sekarang diizinkan bila 70 persen atau lebih dari area tersebut berkedalaman kurang dari 3 meter. Alasan utama atas perubahan itu adalah untuk mengalokasikan lebih banyak lahan untuk kelapa sawit.<sup>81</sup> Perkembangan ini mau tidak mau akan mempunyai konsekuensi bagi perubahan iklim global.

Di masa lampau, sebagian konsesi kelapa sawit yang telah diberikan untuk lahan hutan belum ditanami setelah pembukaan hutan. Misalnya, di Kalimantan Barat, pemerintah daerah telah mengeluarkan izin untuk mencadangkan 2 juta ha lahan hutan untuk perkebunan kelapa sawit sejak 2002 tetapi hanya 350.000 ha dari konsesi tersebut yang akhirnya ditanami, dan sisanya dibiarkan tidak diolah setelah pohon-pohon ditebang.<sup>82</sup> Adalah penting agar lahan yang terdegradasi atau dibuka seperti ini diberi prioritas untuk perkebunan baru.

### Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Pembuat peraturan mempunyai peran penting** – "Pemerintah pusat dan daerah perlu mengklarifikasikan dan menyelaraskan rencana tata ruang dan pedoman bagi alokasi lahan."

**Perlu layanan yang lebih baik dan lebih cepat untuk mengidentifikasi dan mengelola Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVA)** - penilaian HCVA bisa merupakan proses yang lambat di Borneo karena kurangnya tenaga penilai, dan terdapat kebutuhan untuk pedoman manajemen khusus industri yang lebih baik.

**Kerjasama untuk konservasi** - Koridor satwa liar dan inisiatif konservasi perlu direncanakan pada tingkat lanskap yang membutuhkan kerjasama dari multi-pemangku kepentingan yang rumit.

**Membatasi akses HCVA** - HCVA seringkali berada di area yang relatif terpencil; membatasi akses dari pelaku skala kecil dan ilegal dapat menyebabkan konflik dan menjadi padat sumber.

### Solusi dan petunjuk

HCVA perlu diidentifikasi sebelum alokasi konsesi dan jauh sebelum pembukaan hutan dan penanaman. Dalam situasi di mana habitat terbagi, koridor satwa liar yang menghubungkan hutan yang dipecahkan harus dibuat dan dipelihara untuk memungkinkan migrasi dan menjamin kemampuan bertahan populasi. Pedoman WWF dan RSPO secara ketat merekomendasikan agar perkebunan kelapa sawit baru tidak menggantikan hutan primer atau area lain yang diperlukan untuk mempertahankan atau meningkatkan HCVF.

Lihat: [www.hcvnetwork.org](http://www.hcvnetwork.org) untuk alat dan pedoman terkini untuk identifikasi dan manajemen HCVA

Lihat: [www.wwf.or.id/berita\\_fakta/publications/?13160/Panduan-Identifikasi-Kawasan-Bernilai-Konservasi-Tinggi-di-Indonesia](http://www.wwf.or.id/berita_fakta/publications/?13160/Panduan-Identifikasi-Kawasan-Bernilai-Konservasi-Tinggi-di-Indonesia) untuk peralatan HCVA Indonesia

<sup>79</sup> Hooijer et al. 2006. Peat-CO2; CIFOR, 2009; The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia. 2009. Makalah no. 51.

<sup>80</sup> Status hutan rawa gambut di Malaysia, Agustus 2009, Wetlands International

<sup>81</sup> Dampak dari peningkatan permintaan akan bahan bakar hayati terhadap emisi karbon dioksida dari lahan gambut, Wetland International; keterangan tentang Keputusan: Peraturan Menteri Pertanian nomor: 14/Permentan/PL.110/2/2009

<sup>82</sup> Indonesian Commercial Newsletter, November 2009

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Kawasan pengolahan yang bertanggungjawab

Sama halnya terdapat kawasan hutan dengan nilai konservasi tinggi, terdapat juga banyak lahan, khususnya di Kalimantan, yang relatif mempunyai nilai konservasi rendah; biasanya karena telah terdegradasi dengan hebat oleh kegiatan sebelumnya dan kemudian ditinggalkan. Dalam banyak hal lahan ini dapat digunakan untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan sosial dari pengembangan perkebunan kelapa sawit tanpa pertukaran lingkungan yang serius begitu hak kepemilikan atas tanah dan hak penguasaan lahan telah diklarifikasi.

Di masa lampau, sebagian konsesi perkebunan yang telah diberikan untuk lahan hutan belum ditanami setelah pembukaan hutan. Adalah penting agar lahan tidur atau dibuka seperti ini diberi prioritas untuk perkebunan kelapa sawit baru.

**Pembuat peraturan mempunyai peran penting** - "Pemerintah pusat dan daerah perlu mengklarifikasikan dan menyelaraskan rencana tata ruang dan pedoman bagi alokasi lahan."

**Diperlukan kompensasi yang cukup** - "Bila kami diberi konsesi, insentif apa yang ada untuk kami kalau tidak menggunakannya?" - Lahan pengganti yang cocok harus disediakan bilamana konsesi hutan dikembalikan dan bantuan untuk relokasi akan diperlukan.

**Akses yang lebih baik** - "Banyak daerah ini mempunyai hubungan transportasi yang buruk, dan lebih mahal untuk mencapai pabrik." - Daya tarik lahan tidur yang ada untuk digunakan sebagai hutan tanaman dapat ditingkatkan dengan menyediakan infrastruktur dan akses ke pasar yang lebih baik.

Alokasi lahan merupakan kewenangan pemerintah, itulah sebabnya WWF bekerja keras dengan pemerintah di Indonesia dan Malaysia untuk mendukung perencanaan penggunaan lahan yang baik yang mempertimbangkan nilai dari hutan yang masih tegak.

#### 1) Penggunaan lahan tidur

Kawasan dengan nilai konservasi rendah dan lahan tidur, dapat menjadi lokasi yang cocok untuk perkebunan baru jika hak kepemilikan atas tanah dan hak penguasaan lahan telah diklarifikasi.

Sebagai bagian dari upaya WWF untuk mendukung pertumbuhan industri biofuel (bahan bakar hayati) yang berkelanjutan kami mendukung Ecofys dalam mengembangkan suatu alat untuk membantu mengidentifikasi kawasan yang mungkin cocok untuk pengolahan perkebunan yang bertanggungjawab, termasuk yang:

- Memiliki nilai konservasi rendah;
- Mempunyai penampungan karbon yang rendah;
- Telah menyelesaikan masalah penguasaan lahan; dan
- Mempunyai tujuan penggunaan lahan yang tepat dalam rencana tata ruang nasional dan daerah.

Mekanisme ini dikembangkan untuk tanaman energi dan dijadikan percontohan di Kalimantan Barat. Kami bertujuan untuk terus mengembangkan alat ini untuk menjadikannya relevan bagi tanaman perkebunan lain serta menggabungkannya dengan perangkat HCVA untuk memberikan informasi tingkat tinggi yang bermanfaat pada kawasan yang bernilai konservasi tinggi dan rendah di seluruh lanskap yang penting bagi WWF.

Lihat: [www.ecofys.com/com/publications/documents/EcofysRCAMethodologyv1.0.pdf](http://www.ecofys.com/com/publications/documents/EcofysRCAMethodologyv1.0.pdf)

Perangkat penilaian penguasaan lahan cepat (rapid tenure assessment tool) dari The World Agroforestry Centre (ICRAF) menyediakan informasi lebih lanjut tentang bagaimana menilai isu-isu penguasaan lahan pada tempat kedudukan perkebunan.

Lihat: [www.worldagroforestry.org/sea/projects/tulsea/inrmttools/RaTA](http://www.worldagroforestry.org/sea/projects/tulsea/inrmttools/RaTA)

#### 2) Land Swaps

Satu inisiatif dengan potensi dampak yang tinggi adalah bekerja dengan pemerintah dan bisnis untuk mengalihkan konsesi lahan hutan bernilai tinggi ke lahan tidur bernilai rendah. Jika hal ini bisa diterima oleh bisnis, masyarakat dan pemerintah maka terdapat potensi untuk mendapatkan ratusan ribu hektar lahan hutan yang dialokasikan saat ini, sementara tetap mempertahankan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan yang terkait dengan industri perkebunan hutan. Terdapat kemungkinan bahwa simpanan karbon yang signifikan yang terkait dengan pertukaran ini dapat dikonversi ke kredit karbon dan digunakan untuk memberi kompensasi kepada masyarakat dan bisnis untuk biaya yang timbul yang terkait dengan pertukaran tersebut.

WWF saat ini sedang terlibat dalam diskusi untuk mengidentifikasi area percontohan dan koalisi penerapan secepatnya, silahkan kunjungi situs web kami untuk informasi lebih lanjut.

3) Lihat solusi HCVA di atas untuk pedoman bagaimana mengidentifikasi dan mengelola HCVA

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Praktik Pengelolaan Spesies

Borneo merupakan tempat tinggal bagi sebagian spesies paling karismatik dunia, seperti gajah kerdil (pygmy elephant), orang utan dan badak. Terdapat 511 spesies yang terancam punah dalam Daftar Merah IUCN di Borneo yang akan semakin menurun bila tidak ada pengelolaan yang hati-hati.<sup>83</sup>

Konflik yang mungkin terjadi diperkirakan antara industri kelapa sawit dan sebagian spesies paling karismatik Borneo dan yang telah menyebabkan publisitas negatif internasional yang signifikan bagi industri ini di Indonesia dan Malaysia.

**Satwa dapat menyebabkan kerusakan** – Sebagian jenis satwa yang terdapat di Borneo bisa memakan atau menginjak tunas kelapa sawit yang menyebabkan gangguan pada kegiatan perkebunan dan mendatangkan biaya bagi operator.

**Ketahanan lingkungan dan sosial** – Konsultasi mengindikasikan bahwa hak masyarakat setempat harus merupakan prioritas; WWF setuju bahwa kesejahteraan manusia harus merupakan prioritas utama namun juga menegaskan bahwa dengan pengelolaan spesies yang baik maka manusia dan binatang dapat hidup bersama dengan nyaman dan masyarakat setempat serta satwa dapat memperoleh manfaat.

**Proses multi-pemangku kepetingan** – Konservasi spesies membutuhkan pertimbangan pada tingkat lanskap yang memerlukan kerjasama antara para pemilik lahan.

Perangkat dan pelatihan tersedia bagi perusahaan yang memiliki spesies penting di dalam dan di sekitar perkebunan kelapa sawit mereka. Solusi ini dapat membantu mengurangi dampak perkebunan pada spesies utama serta menghindari konflik satwa yang bisa mahal bagi pemilik perkebunan; misalnya, dengan melakukan tindakan untuk mengurangi kemungkinan satwa besar menyebabkan kerusakan pada perkebunan.

Misalnya lihat di: [www.rspo.org/files/reSumber\\_centre/HEC%20BMP%20guide%20v1.0%2020050729.pdf](http://www.rspo.org/files/reSumber_centre/HEC%20BMP%20guide%20v1.0%2020050729.pdf) untuk pedoman mengelola konflik manusia-gajah di sekitar perkebunan kelapa sawit.

[http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/OU\\_BMT\\_report.pdf](http://rafflesia.wwf.or.id/library/admin/attachment/books/OU_BMT_report.pdf) untuk pedoman mengelola konflik manusia-orangutan di sekitar perkebunan kelapa sawit.

[wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork) untuk tautan ke sumber manajemen spesies khusus lebih lanjut.

Studi kasus di bawah ini menunjukkan bagaimana PPB Oil Palms Berhad (PPBOP) telah berhasil membuat koridor satwa liar. Ini adalah praktik yang efektif untuk menghubungkan habitat yang dipecah-pecahkan dan menyediakan saluran bagi migrasi satwa liar.

### STUDI KASUS – PPB OIL PALMS BERHAD MELAKUKAN PROYEK MANAJEMEN RIPARIAN

#### Permasalahan

Sungai Segawa mengalir melalui perkebunan Sabahmas bersertifikasi RSPo milik PPB Oil Palms Berhad's (PPBOP) di Lahad Datu. Sungai dan wilayah ripariannya menyediakan habitat penting bagi lebih dari 150 kera bekantan, suatu spesies endemik. Sungai itu juga mendukung sebagian masyarakat di hilir.

#### Tanggapan

Sebagai pengakuan atas pentingnya wilayah riparian, PPBOP sedang menginvestasikan RM3 juta untuk memulai proyek manajemen riparian berkolaborasi dengan Departemen Kehutanan Sabah. Zona penahan yang resmi adalah 20 meter, dan sebagai bagian dari komitmen keberlanjutan mereka, PPBOP memperluas zona ini dengan tambahan 30 meter. Untuk tujuan itu, mereka sedang menanam 150.000 pohon di sepanjang 47 km bentangan zona riparian yang meliputi total 382 hektar dan menyediakan koridor bagi satwa liar ke Tabin Forest Reserve (Hutan Lindung Tabin).

#### Hasilnya

Tambahan habitat menghubungkan wilayah sungai dan hutan lindung diharapkan memberi manfaat bagi kera bekantan dan satwa liar lain yang hidup di area yang berdekatan. Juga diharapkan agar hal ini akan memberikan pemahaman penelitian pada rehabilitasi riparian di tropika.

<sup>83</sup> [www.iucn.com](http://www.iucn.com)

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Sertifikasi RSPO

Banyak perusahaan kelapa sawit ingin menjalankan usahanya secara bertanggungjawab dan seimbang dengan masyarakat dan lingkungan. RSPO telah bekerjasama dengan industri ini, bersama dengan LSM sosial dan lingkungan, untuk mengembangkan suatu perangkat prinsip dan kriteria yang dapat dipakai oleh perusahaan untuk menjamin bahwa mereka mencapai keseimbangan itu dan dapat memperlihatkannya kepada investor dan pelanggan mereka.

**Produsen yang lebih kecil dirugikan** - Responden dari operator kecil hulu saja mengusulkan agar setiap premi dari penjualan produksi yang bersertifikasi diraih oleh pedagang hilir dan tidak diteruskan kepada produsen lokal.

**Kapasitas teknis** - "Perusahaan besar memiliki sumberdaya yang lebih besar untuk dibaktikan bagi perubahan praktik, produsen yang lebih kecil dirugikan."

**Diperlukan tanggapan yang adil dari LSM** - Perusahaan kami mengalami peningkatan incaran LSM sejak kami mengejar sertifikasi RSPO."

Sertifikasi ke RSPO mengindikasikan bahwa suatu produsen kelapa sawit sedang membahas tentang tantangan lingkungan besar yang terkait dengan produksi. Lihat kotak solusi tentang "Menggerakkan permintaan akan kelapa sawit yang berkelanjutan" di bawah ini untuk informasi lebih lanjut mengenai peningkatan permintaan yang tinggi akan sertifikasi RSPO dari pembeli kelapa sawit.

Contoh pedoman RSPO:

- Untuk membahas isu-isu terkait dengan degradasi tanah dan daerah aliran sungai RSPO menyarankan agar perusahaan menghindari pengolahan pada lahan yang kemungkinan besar terkena erosi, termasuk lereng curam, tebing sungai dan tanah gambut; ini harus diidentifikasi selama proses analisa mengenai dampak lingkungan.
- Pembakaran untuk membuka lahan harus selalu dihindari.
- Praktik manajemen yang direkomendasikan yang menjaga atau memperbaiki kesuburan tanah dan akhirnya menjamin keberlangsungan produktivitas perkebunan termasuk penerasan (terracing) tanah, tanaman penutup, pemeliharaan jalan, pemantauan integritas tanah.
- Penggunaan bahan kimia dapat dikurangi melalui penggunaan alternatif organik, seperti biji-bijian dan hasil samping limbah, dan manajemen hama terpadu dapat mengurangi penggunaan pestisida.
- Kolam perlakuan dan penahan dampak vegetatif dapat dipakai untuk mengurangi aliran dan polusi aliran air dan waktu irigasi yang optimal dan irigasi-tetes pada persemaian membantu meminimalkan pemakaian air.
- Potensi konflik sosial pada masyarakat atau tanah asli perlu diidentifikasi dan persetujuan tanpa paksaan atas dasar informasi awal (Free Prior and Informed consent) dari kelompok tersebut diberikan sebelum alokasi konsesi. Perkebunan hanya diperbolehkan jika produsen mempunyai kepemilikan yang sah atau hak pakai, dan bila hal ini tidak disanggah oleh masyarakat setempat dengan tuntutan yang dapat diperlihatkan.

Lihat: [www.rspo.org](http://www.rspo.org) untuk informasi lanjut mengenai RSPO.

Tim ahli Kelapa Sawit WWF di lapangan di Borneo juga dapat memberikan nasihat dan dukungan, silahkan hubungi kami melalui email: [borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org)

Organisasi lain yang menawarkan dukungan bagi perusahaan yang ingin mendapatkan sertifikasi RSPO termasuk:

- The Forest Trust (TFT): Menyesuaikan pengetahuan tentang manajemen hutan dan keahlian rantai pasokan, TFT sedang berusaha untuk membawa perubahan positif bagi industri kelapa sawit. Hadir di perkebunan dan pabrik, staff TFT membawa dukungan teknis untuk meningkatkan praktik manajemen dan standar untuk memenuhi pedoman pembelian yang bertanggungjawab oleh para pembeli dan memenuhi standar RSPO. Lihat <http://www.tft-forests.org/product-groups/page.asp?p=6277>
- Pro Forest and Wild Asia: Stepwise Support Programme (SSP) dari ProForest and Wild Asia adalah salah satu program bantuan global pertama yang secara khusus dirancang untuk sektor kelapa sawit. ProForest and Wild Asia memiliki tujuan yang sama untuk mendorong keberlanjutan dalam pertanian melalui gabungan pelatihan, pengembangan kebijakan, penilaian lapangan dan audit rantai pasokan. Lihat: <http://www.wildasia.org/main.cfm/stepwise>

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Meningkatkan Produktivitas Petani Kecil

Petani kecil mewakili bagian yang signifikan dari produksi kelapa sawit di Borneo, misalnya mereka mengelola sampai dengan 25% dari area yang ditanami di Kalimantan. Akan tetapi, petani kecil pada umumnya mempunyai produktivitas yang lebih rendah, sering karena kualitas bibit yang lebih rendah dan praktik produksi yang kurang efisien. Komisi Kelapa Sawit Indonesia memperkirakan bahwa produktivitas petani kecil adalah sekitar 2,5 ton per ha, dibandingkan dengan 4,1 ton per ha pada perkebunan swasta yang besar. Meningkatkan produktivitas petani kecil tidak hanya akan memberikan pendapatan yang lebih besar bagi masyarakat pedesaan akan tetapi akan mengurangi tekanan lebih jauh dalam peningkatan area yang ditanam.

**Petani kecil dirugikan** – “Sulit bagi petani kecil untuk mendapatkan sertifikasi, namun kami membutuhkan bantuan teknis untuk memperbaiki produktivitas kami.”

RSPO memiliki gugus tugas yang didedikasikan untuk mendorong minat petani kecil dalam proses RSPO. Upaya sedang dilakukan untuk membuat standar dan prosedur untuk memungkinkan petani kecil mendapatkan sertifikasi, dan untuk menimbulkan kesadaran di antara para petani kecil akan potensi manfaat dari RSPO. Suatu “Protokol untuk Sertifikasi Kelompok” juga sedang dikembangkan sehingga sejumlah petani kecil dapat bekerja bersama untuk mencapai sertifikasi, memperbaiki efisiensi dari proses untuk semua yang berkepentingan.

Lihat di [www.rspo.org](http://www.rspo.org) untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini.

WWF juga mulai bekerjasama dengan petani kecil di Indonesia untuk membantu mereka mendapatkan sertifikasi RSPO, lihat situs web kami untuk keterangan lebih lanjut.

Upaya lain untuk mendukung petani kecil termasuk:

- Wild Asia sedang berusaha untuk membuat model yang praktis dan dapat diterapkan untuk mendorong produksi kelapa sawit yang berkelanjutan untuk bisnis perkebunan kecil dan petani kecil. Melalui lokakarya pelatihan dan dukungan nasihat, proyek tersebut bertujuan untuk menciptakan model dukungan bagi bisnis kecil dan petani kecil yang dipengaruhi oleh pabrik RSPO yang beroperasi di dekat mereka.
- Princes Rainforest Project baru-baru ini menerbitkan suatu laporan yang menganjurkan agar perbaikan produktivitas dapat dihubungkan dengan pembayaran untuk Reduced Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+): <http://www.rainforestsos.org/wp-content/uploads/pdfs/REDD-and-Agriculture-Proposed-Solutions-from-Private-Sector.pdf>

## Apa permasalahannya?

### Keuangan yang Bertanggungjawab

Perusahaan kelapa sawit harus memberi jawaban kepada investor dan penyandang dana mereka untuk memperlihatkan bahwa dana digunakan dengan baik dan bahwa kegiatan mereka tidak akan mengakibatkan para penyandang dana menghadapi risiko atau perhatian yang tidak diharapkan dari para aktivis dan media. Banyak isu lingkungan yang secara potensial disebabkan oleh perkebunan kelapa sawit dapat dihindari melalui penerapan praktik manajemen yang terbaik (yang sebagian disebutkan dalam kotak solusi di atas) dan kami tahu bahwa investor dapat memberikan sumber dorongan yang penting untuk menerapkan praktik terbaik ini.

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Insentif dibuat untuk produsen lebih besar** - produsen lebih besar yang mencari investasi, khususnya dari bank dan investor internasional mendapati bahwa kriteria pemberian pinjaman yang bertanggungjawab merupakan insentif penting untuk bertindak; 25% mencatat bahwa akses ke keuangan merupakan motivasi penting untuk keberlanjutan.

**Pemberi pinjaman setempat kurang perhatian** - investor dan pemberi pinjaman bisnis yang lebih kecil seringkali kurang memperhatikan aspek keberlanjutan dan operator yang lebih kecil memiliki akses rendah ke berbagai bentuk pembiayaan sehingga kriteria pembiayaan tidak memberikan insentif yang kuat.

## Solusi dan petunjuk

Buku Pegangan Keuangan yang Berkelanjutan:

Sejumlah bank utama telah bergabung dengan RSPO; termasuk International Finance Corporation, Rabobank, Standard Chartered Bank, WestLB AG, Credit Suisse, ANZ Banking Group, dan HSBC. Anggota diharuskan mematuhi Kode Etik RSPO dan mengarahkan investasinya sesuai dengan kode etik tersebut.

WWF telah membuat buku pegangan praktis untuk membantu lembaga keuangan mengembangkan dan menerapkan kebijakan investasi dan pembiayaan kelapa sawit yang bertanggungjawab: [http://assets.panda.org/downloads/the\\_palmoil\\_financing\\_handbook.pdf](http://assets.panda.org/downloads/the_palmoil_financing_handbook.pdf)

The World Business Council for Sustainable Development (Dewan Usaha Dunia untuk Pembangunan yang Berkelanjutan) dan Pricewaterhouse Coopers membuat perangkat untuk menginformasikan pembiayaan yang bertanggungjawab bagi kegiatan yang berdampak pada hutan: [www.pwc.co.uk/pdf/forest\\_finance\\_toolkit.pdf](http://www.pwc.co.uk/pdf/forest_finance_toolkit.pdf)

## Apa permasalahannya?

### Insentif Finansial Baru

Hutan menyediakan jasa ekosistem yang berharga bagi masyarakat; akan tetapi, pemerintah dan perusahaan swasta sering tidak mempertimbangkan nilai-nilai tersebut ketika mengalokasikan konsesi dan membuat keputusan menebang hutan untuk perkebunan, dan hal ini dapat mengakibatkan kerugian bersih terhadap nilai-nilai tersebut bagi masyarakat. Jenis insentif finansial yang baru sedang dikembangkan untuk membantu pelaku swasta untuk mempertimbangkan nilai publik ini dan ini dapat memberikan sumber pendapatan tambahan bagi perusahaan kelapa sawit untuk mendukung kegiatan yang berkelanjutan. Sebagian besar inisiatif-inisiatif tersebut sedang dikembangkan, terdapat momentum yang cukup baik di dalamnya serta prospek pertumbuhan yang baik.

Misalnya, pasar karbon saat ini menyediakan pembayaran untuk emisi karbon yang dikurangi melalui Clean Development Mechanism - CDM (Mekanisme Pembangunan Bersih) dari EU Emissions Trading Scheme (Skema Perdagangan Emisi Uni Eropa). Selain itu, sebuah mekanisme sedang dikembangkan untuk menyediakan pembayaran untuk Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+) dan ini dapat memberi kesempatan bagi perusahaan kelapa sawit untuk mendapatkan penghasilan bila mereka dapat memperlihatkan (sesuai dengan metodologi yang sedang dikembangkan) bahwa mereka membantu untuk mengurangi emisi

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Insentif finansial** - LSM dan pemerintah perlu membantu para produsen untuk mempelajari tentang insentif finansial baru yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya.

“Bila perusahaan kami melindungi “kepentingan publik” kami perlu tahu bagaimana kami akan diberi penghargaan atau kompensasi untuk itu”

## Solusi dan petunjuk

WWF sedang bekerjasama dengan tiga pemerintah HoBb untuk membantu mereka memahami nilai hutan HoB dan juga bagaimana membiayai pelaksanaan Deklarasi HoB secara berkelanjutan. Di bulan Oktober 2010 ketiga pemerintah meluncurkan penilaian pembiayaan yang berkelanjutan untuk HoB. Kegiatan tersebut menggarisbawahi sumber-sumber pembiayaan yang tersedia untuk mendukung perusahaan, pemerintah dan masyarakat untuk mencapai Deklarasi HoB, lihat situs web kami untuk keterangan lebih lanjut.

Terdapat keuntungan yang nyata dari insentif finansial baru bagi produsen kelapa sawit. Misalnya, produsen kelapa sawit besar di Sabah sedang mengembangkan suatu proyek CDM di salah satu pabrik kelapa sawit mereka<sup>85</sup>. Proyek ini diharapkan untuk dapat mencegah emisi karbon setara 130,000 ton selama 7 tahun melalui perlakuan air limbah dan produksi biogas, pada harga karbon saat ini, ini bisa bernilai lebih dari USD 2 juta.<sup>86</sup>

WWF mempunyai sejumlah inisiatif yang sedang berjalan untuk membantu para produsen, investor dan pembuat peraturan mengakses insentif finansial yang baru. WWF AS juga merupakan mitra dalam The Natural Capital Project - proyek ini telah mengembangkan alat yang disebut InVEST (Integrated Valuation of Ecosystem Services and Trade-Offs), suatu alat yang membantu memetakan dan menilai jasa yang disediakan oleh alam. Kami sedang bekerjasama dengan ke tiga pemerintah HoB untuk menggunakan alat ini di HoB. Hasilnya akan menarik bagi pembuat kebijakan pemerintah dan juga perusahaan.

Untuk informasi lebih lanjut silakan lihat di [wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork)

Proyek Princes Rainforest juga baru-baru ini menerbitkan dua laporan tentang bagaimana sektor kelapa sawit dapat memperoleh manfaat dari kredit REDD+ di masa depan melalui pertukaran konsesi yang diberikan pada lahan tidur atau melalui keuntungan produktivitas. Proposal ini masih pada tahap awal namun dapat memberikan alternatif kesempatan pendapatan yang menarik bagi perusahaan kelapa sawit di masa depan.

<http://www.rainforestsos.org/wp-content/uploads/pdfs/REDD-and-Agriculture-Proposed-Solutions-from-Private-Sector.pdf>

<sup>85</sup> UNFCCC (CDM-SSC-PDD)

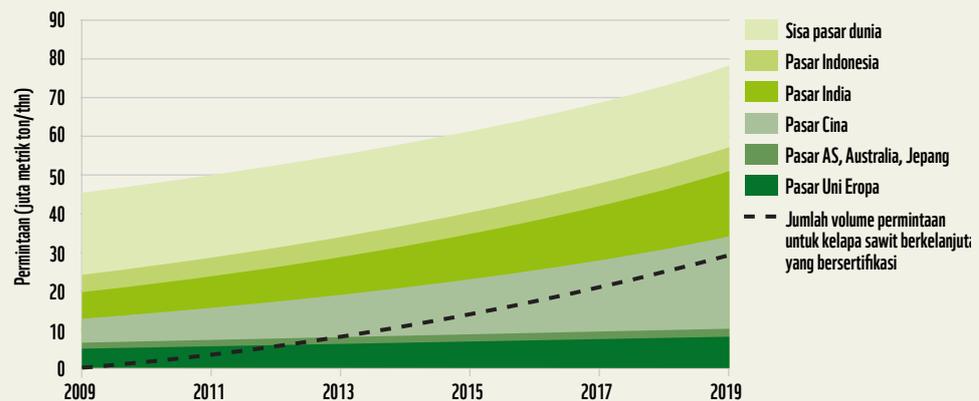
<sup>86</sup> 26/11/2010: harga CER Euro 12,26 (Bluenext.eu) = circa USD 16 \* 130.000 CERs = USD 2,08 juta (tidak didiskon)

## Apa permasalahannya?

### Mendorong Permintaan akan Kelapa Sawit yang Berkelanjutan

Sertifikasi RSPO menjawab banyak keprihatinan yang diangkat oleh konsumen mengenai potensi dampak produksi kelapa sawit terhadap lingkungan. Akan tetapi, produsen menghadapi masalah pembiayaan dalam mendapatkan sertifikasi RSPO dan perlu diberi kompensasi dengan premi harga untuk mendorong perluasan RSPO yang berkesinambungan. Produsen telah menyatakan bahwa premi harga saat ini rendah dan terbatas pada pasar tertentu dan oleh sebab itu penting agar permintaan akan kelapa sawit bersertifikasi RSPO terus meningkat paling tidak sesuai dengan peningkatan dalam pasokan.

Permintaan untuk kelapa sawit yang berkelanjutan meningkat dengan pesat, dan RSPO telah memperkirakan bahwa permintaan dapat mencapai 30 juta ton sebelum tahun 2019 (Gambar 3.9).



Sumber: Verburg, presentation given to RSPO board, Düsseldorf, October, 2010

GAMBAR 3.9: PERKIRAAN PERMINTAAN AKAN KELAPA SAWIT, DAN PROPORSI PERMINTAAN UNTUK KELAPA SAWIT BERSERTIFIKAT.

Perkiraan kenaikan ini sebagian didasarkan pada komitmen tegas dari sejumlah perusahaan besar dan peritel untuk secara eksklusif mencari sumber kelapa sawit yang berkelanjutan; misalnya, Walmart telah berkomitmen untuk hanya menggunakan kelapa sawit bersertifikat RSPO dalam produk-produk bermerek Walmart sebelum tahun 2015 dan komitmen serupa telah dibuat oleh Nestle, Proctor & Gamble, Unilever, dan Kraft untuk menyebutkan beberapa di antaranya. Selain itu, Belanda, importir dan eksportir kelapa sawit terbesar Eropa (sekitar 2 juta ton per tahun), adalah negara pertama yang berkomitmen untuk hanya mencari sumber kelapa sawit dari produsen yang bersertifikasi untuk industri nasionalnya sebelum tahun 2015.<sup>87</sup>

Sementara pasar Amerika dan Eropa semakin menuntut kelapa sawit dari sumber yang berkelanjutan, pasar di bagian dunia lainnya, terutama Asia, sampai saat ini tidak begitu peduli dengan sumber asal pasokan. Mengingat dominasi Asia dalam menggerakkan kenaikan produksi kelapa sawit, menyebarkan kesadaran dan tuntutan untuk produk yang berkelanjutan di pasar ini akan merupakan suatu tantangan yang penting.

**Diperlukan insentif yang lebih besar** - "Mengubah praktik manajemen dan menyatukan faktor keberlanjutan adalah mahal"  
"Lagipula pasar Eropa relatif kecil dibandingkan dengan pasar Asia tetapi kelapa sawit bersertifikasi tidak dihargai lebih mahal"

Sertifikasi RSPO merupakan persyaratan yang meningkat dari merek, peritel dan penyandang dana utama internasional, termasuk semua yang mendaftar sebagai anggota RSPO. WWF menganjurkan agar pembeli kelapa sawit mencari sumber 100% dari kelapa sawit bersertifikasi RSPO dan WWF berusaha keras untuk menjamin bahwa permintaan untuk kelapa sawit RSPO terus menguat.

- Kartu skor (scorecard) pembeli: Tekanan konsumen di Eropa dan Amerika mendorong pengambilan produk yang berkelanjutan oleh para peritel. Pada tahun 2009 WWF menerbitkan kartu skor peritel dan merek di Eropa yang membeli kelapa sawit RSPO, kartu skor ini bertujuan untuk mengakui dan memberi penghargaan bagi pelaku yang baik serta mendorong yang lain untuk mengikutinya. Pasar memperlihatkan peningkatan tajam dalam permintaan pada bulan setelah peluncuran kartu skor ini.
- Bekerja dengan pasar Asia: WWF memahami bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk mendorong pasar Cina dan India untuk membeli minyak yang berkelanjutan dan saat ini WWF mempunyai program aktif untuk melakukan hal tersebut di kedua negara. Untuk mengetahui lebih jauh tentang perkembangannya silahkan kunjungi situs web kami:

<sup>87</sup> Manifesto of the Task Force Sustainable Palm Oil, Netherlands, 2010

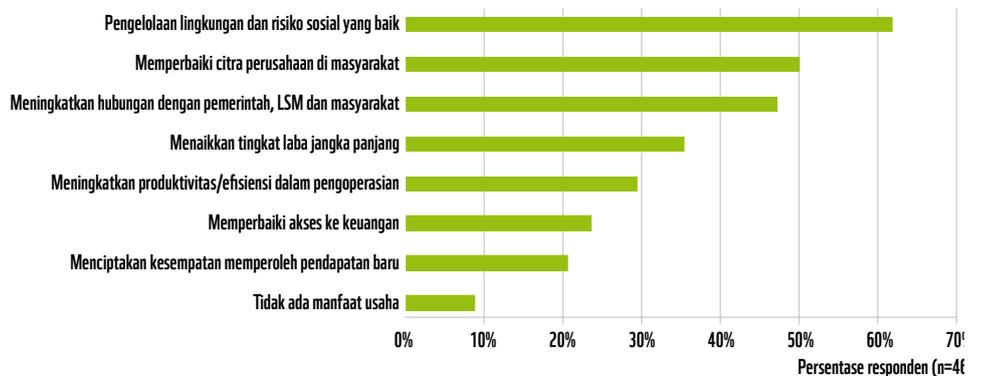
- **Kemitraan Perusahaan:** Di seluruh dunia, “Inisiatif Transformasi Pasar” WWF bertujuan untuk bekerjasama dengan 100 merek dan peritel utama yang paling berpengaruh yang pembelinya mempunyai kekuatan terkonsentrasi yang signifikan untuk mempengaruhi ribuan rantai pasokan dan produsen individual. Kami sedang membentuk kemitraan di banyak negara dengan perusahaan terkemuka yang ingin melampaui standar minimum dan mengembangkan serta menerapkan praktik terbaik dalam pencarian sumber komoditas yang berkelanjutan. Misalnya kemitraan kami dengan peritel dari Inggris, Marks & Spencer, menyebabkan perusahaan tersebut menerapkan kebijakan pencarian sumber kelapa sawit berkelanjutan 100%. Kami juga telah dipakai oleh Wal-Mart, peritel terbesar dunia, yang baru-baru ini mengeluarkan komitmen untuk mencari sumber kelapa sawit yang berkelanjutan 100% untuk produk merek mereka sendiri sebelum tahun 2015.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program ini serta informasi bagi pembeli kelapa sawit silakan lihat di [http://wwf.panda.org/what\\_we\\_do/footprint/agriculture/palm\\_oil/solutions/responsible\\_purchasing/](http://wwf.panda.org/what_we_do/footprint/agriculture/palm_oil/solutions/responsible_purchasing/)

### Kasus bisnis untuk kelapa sawit yang berkelanjutan di Borneo

Kasus bisnis untuk mengurangi penebangan hutan dan memperbaiki praktik lingkungan semakin diakui di tingkat nasional dan internasional berdasarkan nilai yang diberikan oleh ekosistem yang masih utuh bagi masyarakat.

Pada tingkat perusahaan individual kasus bisnis untuk praktik yang berkelanjutan bisa lebih rumit. Berbagai tantangan, sering dikaitkan dengan biaya dan kapasitas teknis, telah diidentifikasi oleh para produsen dan ini dibahas dalam bagian sebelumnya. Sekalipun terdapat tantangan, manfaat bisnis dari perbaikan praktik lingkungan semakin diakui oleh sebagian perusahaan kelapa sawit di Borneo.



**GAMBAR 3. 10: MANFAAT DARI PRAKTIK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG BAIK SEBAGAIMANA DILAPORKAN OLEH PRODUSEN KELAPA SAWIT DI BORNEO**

Gambar 3.10 didasarkan pada wawancara dan survei dengan 46 responden dari perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di seluruh negara di Borneo. Sebanyak 62% dari kelompok ini mengidentifikasi manajemen risiko lingkungan dan sosial yang baik sebagai manfaat dari kegiatan yang berkelanjutan sementara 50% dari responden berpendapat bahwa perusahaan mereka akan mendapat manfaat dari citra publik yang baik. Lebih dari sepertiga (35%) dari responden berpendapat bahwa kegiatan yang berkelanjutan akan memperbaiki profitabilitas mereka dalam jangka panjang dan 29% menyatakan bahwa kenaikan produktivitas atau efisiensi operasional lainnya sebagai alasan untuk mengejar praktik yang berkelanjutan.

Selanjutnya, sebagaimana disebutkan dalam kotak solusi pada halaman sebelumnya, dari permintaan yang meningkat untuk kelapa sawit bersertifikat RSPD dan dana internasional yang baru untuk menghindari penggundulan hutan; sampai ke penegakan yang diperketat terhadap peraturan yang ada dan persyaratan pembiayaan yang baru dari pemberi pinjaman; banyak faktor muncul bersama-sama untuk memperkuat kasus bisnis untuk kelapa sawit yang berkelanjutan di Borneo.

Bagian pertama bab ini terutama difokuskan pada penambangan batu bara, menganalisa produksi, konsumsi dan tren ekspor serta perkembangan terkini dan potensi implikasi dari hal-hal tersebut bagi HoB. Fokusnya adalah batu bara karena ini adalah sub-sektor pertambangan terbesar di Borneo dan terus memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan, dengan implikasi penting bagi HoB dan iklim global. Tren dan perkembangan di sub-sektor lain juga dibahas secara singkat. Bagian kedua pasal ini memperluas analisa ini untuk secara khusus melihat dampak lingkungan dan sosial terkait dengan pertambangan, dan mempertimbangkan beberapa tantangan dan solusi terkait dengan pengadopsian lebih banyak praktik yang berkelanjutan. Bagian akhir menyimpulkan hasil dari keterlibatan kami dengan para perusahaan tambang untuk menyimpulkan kasus bisnis bagi pertambangan yang berkelanjutan di Borneo.



“

**PERATURAN YANG JELAS  
DAN PENAMBANGAN YANG  
BERTANGGUNGJAWAB  
AKAN MEMBANTU  
MEMPERTAHANKAN MODAL  
ALAM HOB.**

”

# BAB 4

## SOLUSI BISNIS UNTUK PERTAMBANGAN YANG BERTANGGUNGJAWAB DI BORNEO



### Ringkasan

- Pemerintah Indonesia dan Malaysia sedang mempertimbangkan untuk meningkatkan produksi tambang mereka dari deposit di Borneo, terutama batubara. Terdapat lebih dari 1.100.000 ha konsesi batu bara di dalam HoB, dari jumlah ini, 980.000 ha masih pada tahap penelitian atau eksplorasi, yang mengindikasikan pertumbuhan potensial di masa depan, dan dampak dari industri ini pada HoB.
- WWF yakin bahwa karena emisi karbon batu bara yang tinggi, pemakaiannya sebagai sumber energi harus dikurangi secara signifikan di masa mendatang. Akan tetapi, dalam jangka pendek WWF mengakui bahwa batu bara akan tetap menjadi sumber energi yang penting dan relatif murah bagi negara-negara berkembang.
- Penambangan batu bara dan emas liar mempunyai dampak sosial dan lingkungan yang signifikan, serta konsekuensi ekonomi bagi pemerintah dan kegiatan yang legal. Pemerintah nasional dan regional perlu terus menghalangi penambangan liar, sementara berusaha untuk menyediakan alternatif mata pencarian bagi masyarakat miskin pedesaan yang terlibat.

### Rekomendasi

- Peraturan yang jelas dan penegakan hukum yang efektif diperlukan di seluruh wilayah. Misalnya, menjamin agar persyaratan undang-undang untuk Analisa Mengenai Dampak Lingkungan dan reklamasi lahan ditegakkan secara konsisten.
- Upaya yang diperketat diperlukan untuk mengendalikan penambangan liar. Contoh khusus adalah perlunya mengurangi pemakaian air raksa oleh penambang emas liar dan melindungi mereka dari efek negatif terhadap kesehatan.
- Perusahaan pertambangan harus mengidentifikasi hutan bernilai konservasi tinggi sebelum memulai operasi penambangan dan memastikan tersedianya rencana pengelolaan yang cukup untuk melindungi nilai dari kawasan selama operasi penambangan dan setelah operasi selesai.
- Rehabilitasi tambang perlu direncanakan secara logistik dan keuangan jauh sebelum dimulainya operasi penambangan.

Informasi lebih lanjut dapat dilihat pada bagian solusi:

Kegiatan	Solusi	Halaman
Penempatan dan perencanaan	Hutan Bernilai Konservasi Tinggi	74
	Evaluasi Dampak Lingkungan	76
Pengelolaan	Pemakaian air raksa	77
	Rehabilitasi Tambang	78
Pembiayaan	Keuangan yang Bertanggungjawab	79
	Insentif Finansial Baru	80

## Pendahuluan

Pertambangan telah memberi sumbangan penting bagi pembangunan ekonomi Borneo, memberikan pendapatan ekspor, lapangan kerja dan sumberdaya untuk pembangkit tenaga listrik. Akan tetapi, dampak lingkungan dari pertambangan juga sudah sangat hebat dan ada pengakuan yang berkembang bahwa kesinambungan pembangunan ekonomi di Borneo akan bergantung pada perbaikan yang signifikan dalam praktik lingkungan dan sosial oleh perusahaan dan individu yang beroperasi di sana. Selanjutnya, kebanyakan pertambangan di Borneo adalah untuk batu bara; batu bara yang terbakar merupakan kontributor yang signifikan pada perubahan iklim yang menambah tekanan lingkungan dan sosial di Borneo dan di seluruh dunia.

Pertambangan di Borneo dilakukan oleh penambang tradisional sejak abad ke delapanbelas. Penambangan komersial berskala besar dimulai menyusul survei geologis oleh Belanda di awal abad kedua puluh dan sejak itu telah berkembang dengan pesat. Pada tahun-tahun belakangan ini, pemerintah Malaysia dan Indonesia telah menyatakan minat untuk memperluas produksi batu bara berskala besar di Borneo. Dengan demikian, tantangan bagi visi pemerintah untuk konservasi dan pemaknaan yang berkelanjutan yang diabadikan dalam Deklarasi HoB adalah untuk menjamin bahwa karena produsen mengalihkan perhatian mereka pada deposit di dalam HoB, agar dilakukan perencanaan tata ruang yang hati-hati, dan dibuat peraturan yang baik dan/atau ditegakkan secara ketat dan konsisten.

Akan tetapi, dalam banyak hal penambang skala kecil memberikan tantangan yang lebih besar bagi para pembuat peraturan ketimbang operator besar karena kegiatan mereka lebih banyak dan mereka sering terpecah di seluruh area yang tidak dapat diakses. Perlu mengambil langkah untuk menjamin bahwa akses dan kegiatan skala kecil, serta penambang liar dikendalikan secara efektif.

## Sektor pertambangan batu bara di Borneo

### Produksi

Produksi batu bara tahunan di Indonesia telah berkembang dengan pesat pada dekade terakhir menjadi lebih dari 250 juta ton. Angka ini saat ini diperkirakan akan terus bertumbuh sekitar 4-6% per tahun, mencapai 316 juta ton di tahun 2014.<sup>88</sup> Sebagian besar dari pertumbuhan ini datang dari Kalimantan, yang memiliki 53% dari 4.300 juta ton cadangan batu bara Indonesia yang dapat diambil.<sup>89</sup> Sebagian dari cadangan ini berada di dalam HoB, sesungguhnya sudah ada isyarat kegiatan; terdapat lebih dari 1.100.000 ha konsesi batu bara di dalam HoB, dari jumlah ini, 980.000 ha masih dalam tahap penelitian atau eksplorasi.<sup>90</sup> Hal ini memberikan indikasi tentang potensi pertumbuhan industri ini, dan perannya di masa depan untuk mengelola lahan di dalam HoB di Indonesia. Akan tetapi, ini tidak termasuk kegiatan penambangan liar, yang juga signifikan.

Industri batu bara Malaysia hampir seluruhnya berada di Sarawak. Berbeda dengan Indonesia, industri ini relatif tidak berkembang dan menghasilkan sedikit di atas 1 juta ton per tahun yang memasok 6 pembangkit listrik.<sup>91</sup> Akan tetapi, Departemen Mineral dan Geologi memperkirakan bahwa Malaysia memiliki cadangan sebesar 1.724 milyar ton dan kebanyakan berada di Sarawak (80%) dan Sabah (19%).<sup>92</sup> Sebagian dari cadangan ini berada di area yang sensitif secara lingkungan di dalam HoB, misalnya Lembah Maliau (dinominasikan untuk menjadi Situs Warisan Dunia) dan cadangan hutan Danum Valley di Sabah keduanya dianggap terletak di atas deposit yang signifikan.

Brunei juga memiliki deposit batu bara yang cukup banyak, namun sejak penutupan Brooketon Colliery tahun 1924 Brunei tidak mempunyai tambang yang aktif. Tidak ada rencana pemerintah untuk mengembangkan sumberdaya batu bara Brunei, walaupun beberapa eksplorasi sedang dilakukan untuk memperbarui perkiraan cadangan yang diketahui. Negara ini memiliki sumberdaya minyak dan gas yang kaya dan dari sumber inilah negara ini menghasilkan seluruh listriknya dan sedang giat mengeksplorasi cadangan-cadangan baru untuk mempertahankan pasokan ini.

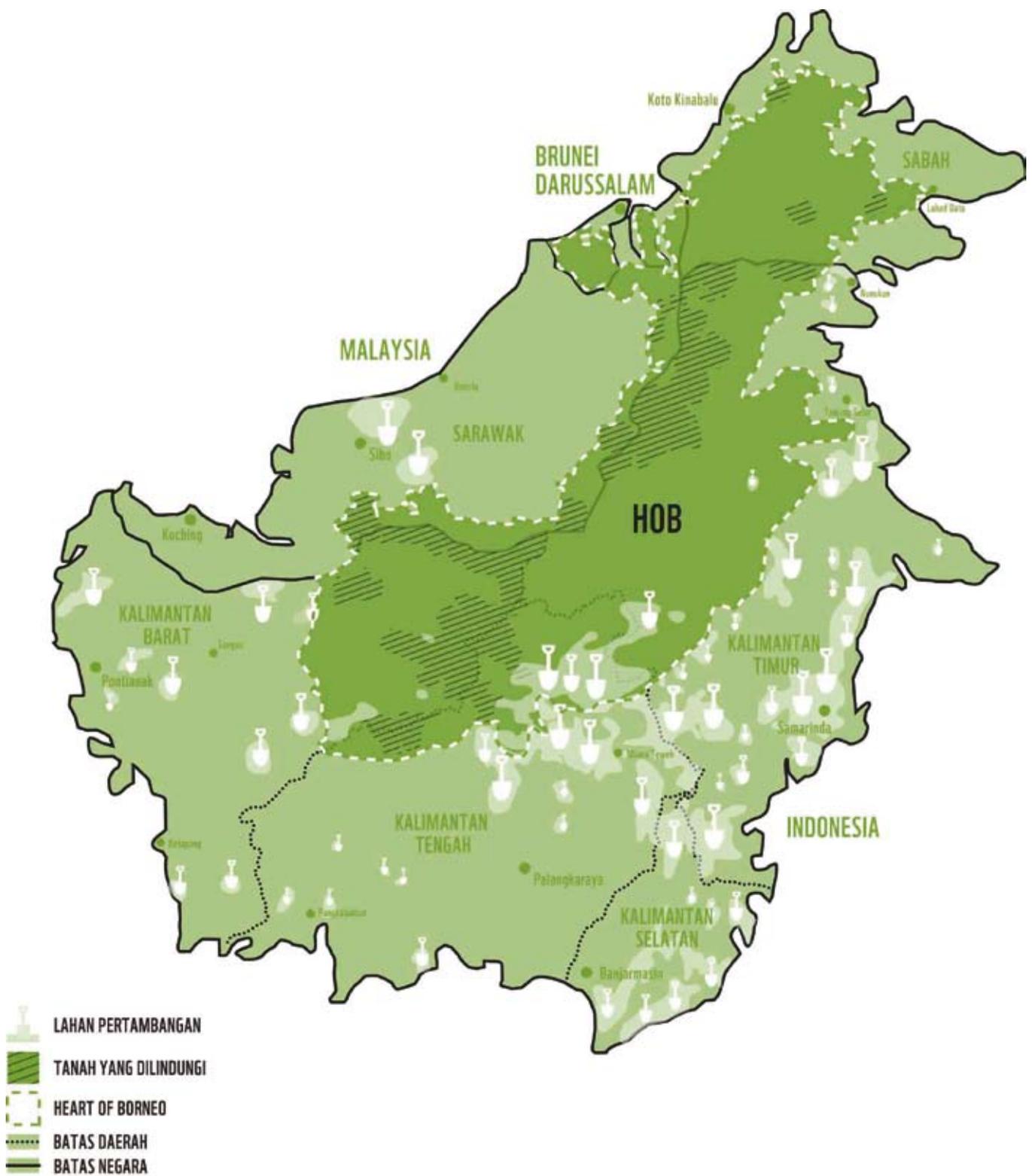
<sup>88</sup> Business Monitor International, Laporan Pertambangan Indonesia kuartal 3, 2010

<sup>89</sup> Innovation Energy Environment, 2010

<sup>90</sup> Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral Indonesia, 2008.

<sup>91</sup> Laporan Industri Pertambangan Malaysia 2008

<sup>92</sup> Departemen Mineral dan Geosciences, Malaysia, 2010

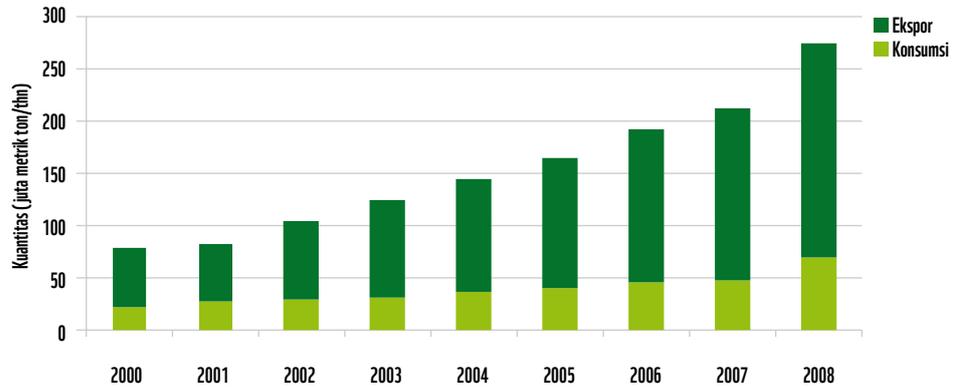


GAMBAR 4.1: PETA ILUSTRATIF KONSESI PERTAMBANGAN DI KALIMANTAN, TAMBANG DI SARAWAK

Catatan: Peta ini memberikan perkiraan ilustratif lokasi dan luas konsesi berdasarkan informasi yang tersedia untuk umum; perkiraan ini bukanlah merupakan suatu sajian yang akurat.

## Konsumsi dan Ekspor

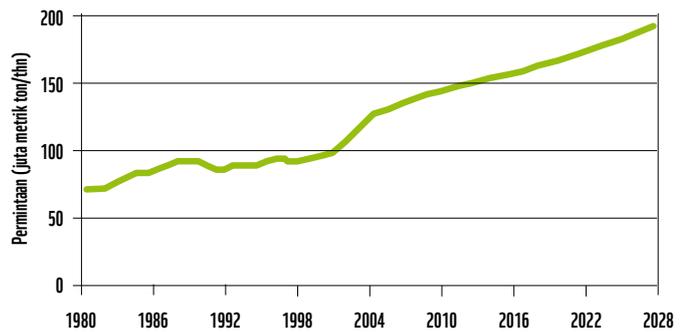
Sekitar 20% dari produksi batu bara Indonesia digunakan di dalam negeri, terutama untuk menghasilkan listrik, namun juga digunakan langsung oleh industri. Kebijakan Energi Nasional Indonesia menyatakan bahwa mereka ingin melihat batu bara mewakili 33% dari campuran energi di tahun 2025<sup>93</sup>, meningkat dari 17,1% di tahun 2006<sup>94</sup>, dan sekitar 25% saat ini.



Sumber: World Coal, 2009

GAMBAR 4.2: KONSUMSI DAN EKSPOR BATU BARA TERMAL INDONESIA

Indonesia mengekspor sejumlah besar batu bara ke Jepang, Taiwan, India dan Korea Selatan; di mana Asia mewakili 78% dari penjualan.<sup>95</sup> Konsumsi di banyak negara barat diperkirakan akan menurun, sebagian karena biaya eksternal terkait dengan emisi karbon dan perubahan iklim. Akan tetapi, sebagaimana ditunjukkan dalam Gambar 4.3, perkiraan dari the International Energy Agency (IEA) melihat pertumbuhan permintaan dunia yang berkesinambungan, kebanyakan didorong oleh negara-negara berkembang, khususnya India dan Cina. WWF yakin bahwa karena emisi karbon batu bara yang tinggi, pemakaiannya sebagai sumber energi perlu dikurangi secara signifikan di masa mendatang. Akan tetapi, dalam jangka pendek WWF mengakui bahwa batu bara akan tetap menjadi sumber energi yang penting dan relatif murah bagi negara-negara berkembang. "Visi energi WWF" memang pada kenyataannya melihat pemakaian batu bara meningkat dalam pasokan energi global sampai 2020, sebelum menurun bilamana teknologi terbarukan yang lain dikembangkan sebagai alternatif yang lebih murah.



Sumber: IEA, 2009

GAMBAR 4.3: PERKIRAAN PERMINTAAN AKAN BATU BARA DUNIA (SKENARIO BISNIS SEPERTI BIASA)

Ekspor batu bara merupakan sumber devisa yang penting bagi Indonesia, yang menghasilkan pendapatan sebesar USD 7,7 milyar pada 4 bulan pertama tahun 2010 saja.<sup>96</sup> Industri ini juga telah menjadi kontributor penting dalam pertumbuhan ekonomi, mewakili 4,5% dari PDB tahun 2009. Di Kalimantan batu bara mewakili lebih dari 7% dari PDB setempat.<sup>97</sup>

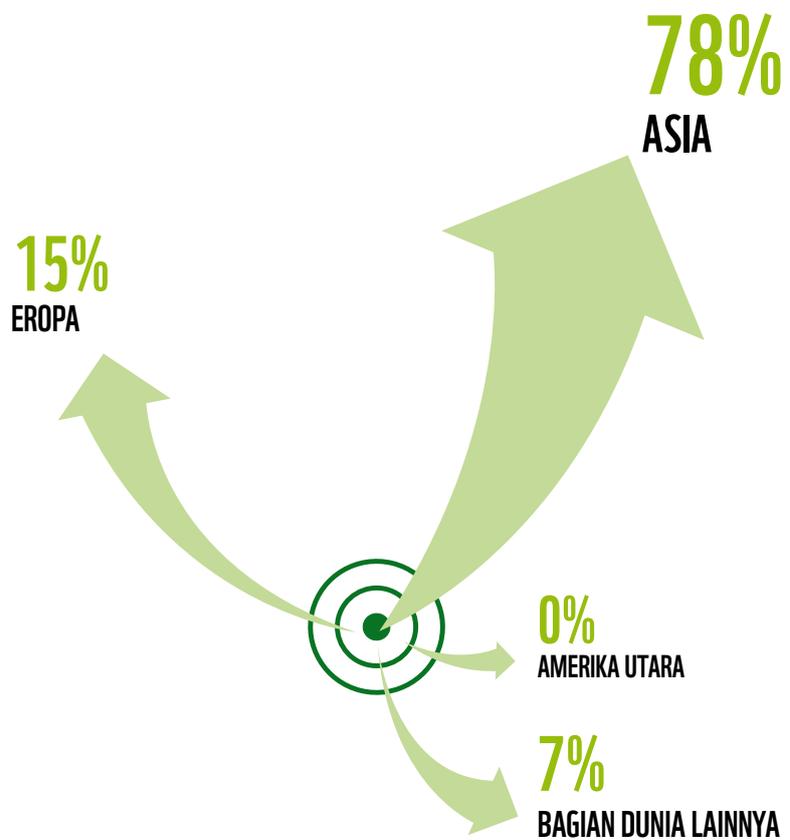
<sup>93</sup> Beserta 30% gas alam, 20% minyak, 2% pencairan batu bara, 5% energi terbarukan, dan 5% geotermal.

<sup>94</sup> Keputusan Presiden no. 5 Tahun, 2006

<sup>95</sup> Buku pegangan tentang energi dan statistik ekonomi Indonesia, 2009

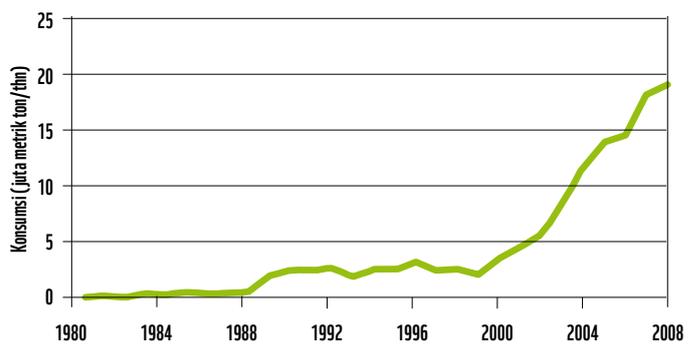
<sup>96</sup> <http://theindonesiatoday.com/stock-headline/1292.html>

<sup>97</sup> BPS Kalimantan Tengah Dalam Angka, 2009



GAMBAR 4.4: TUJUAN EKSPOR UNTUK BATU BARA DARI INDONESIA DAN MALAYSIA

Konsumsi nasional Malaysia telah mengalami kenaikan pesat selama dekade terakhir, yang didorong oleh kenaikan dalam proporsi batu bara dalam campuran bahan bakar, yang telah menggantikan gas alam yang lebih mahal, dan sekarang sudah mencapai hampir 40%.<sup>98</sup> Mengingat produksi dalam negeri Malaysia yang rendah saat ini, Malaysia ditopang oleh impor, terutama dari Indonesia, Australia dan Cina. Impor ini mempunyai biaya yang signifikan sebesar lebih dari USD 1,6 milyar per tahun.<sup>99</sup>



Sumber: TitiTudorancea.com, 2010

GAMBAR 4.5: KONSUMSI BATU BARA MALAYSIA

<sup>98</sup> COGEN3, Malaysian National Energy Review, 2003.

<sup>99</sup> <http://malaysianminerals.com/minerals-statistics.html>

## Perkembangan Produksi

Potensi sebagai penghasil energi yang relatif murah, pendapatan ekspor yang meningkat di Indonesia dan pengurangan biaya impor di Malaysia, memotivasi kedua pemerintah untuk melakukan eksploitasi yang lebih besar terhadap deposit mereka di Borneo.

Di Kalimantan terdapat rencana untuk pembangunan 1.461 km Sistem Transportasi Batu bara Terpadu yang menghubungkan area utama di sepanjang pantai Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan untuk meningkatkan ekspor batu bara; Sanggata, Mahakam, Balikpapan Selatan, Mangkupati dan Batu. Proposal termasuk 7 pelabuhan perluasan atau baru, yang menyediakan kapasitas ekspor yang lebih besar. Sebagian dari pembangunan ini didanai oleh investor swasta internasional untuk menjamin bagian dari ekspor yang akan datang. Misalnya, Middle East Coal Company dari India bermaksud menginvestasikan USD 1,4 milyar di Kalimantan Timur, termasuk bagian dari jalur kereta dan sebuah pelabuhan yang mampu menerima kapal berukuran besar (capesize vessels).<sup>100</sup> Untuk menjamin agar terdapat cukup batu bara dengan harga yang pantas untuk konsumsi dalam negeri maka Undang-undang Pertambangan yang Baru No. 4/2009 mewajibkan semua perusahaan untuk menjual paling sedikit seperempat dari produksi mereka kepada pengguna dalam negeri.

Perkembangan yang muncul dalam industri batu bara Indonesia adalah eksploitasi gas metana batu bara. Indonesia diperkirakan memiliki 450 triliun kaki kubik sumber gas metana batu bara. Ekstraksi pertama sebagian dari jumlah ini dipimpin oleh VICO (dimiliki bersama oleh BP dan ENI) di Kalimantan Timur. Produksi diharapkan akan dimulai tahun 2011 dari blok Sanga-Sanga mereka, yang dari tempat ini ekstraksi gas telah dilakukan selama 40 tahun. Gas metana batu bara sering terlepas selama ekstraksi batu bara, yang menyebabkan emisi gas rumah kaca yang signifikan. Akan tetapi, ini juga dapat menjadi tambahan sumber bahan bakar mudah menyala, dan pemakaian selanjutnya dapat memberikan rute potensial untuk mengurangi intensitas karbon dari produksi energi di Indonesia.

Rencana Kesepuluh Malaysia (the Tenth Malaysian Plan) menyebutkan rencana untuk peningkatan eksploitasi sumberdaya batu bara di Sabah dan Sarawak. Pembangunan ini bermaksud mengurangi biaya impor batu bara dan meningkatkan keamanan energi regional. Rencana tersebut termasuk pembangunan dua pembangkit listrik tenaga batu bara yang baru, satu di Lahad Datu, Sabah, dan satu di Semenanjung Malaysia, beserta infrastruktur pertambangan yang terkait untuk memenuhi kapasitasnya. Akan tetapi, pabrik di Sabah telah menarik perhatian media dan LSM yang signifikan yang menyerukan agar proyek tersebut ditinggalkan.<sup>101</sup> Tantangan juga telah datang dari Menteri Lingkungan Hidup, yang menolak Analisa Mengenai Dampak Lingkungan awal karena kegagalannya membahas sejumlah kepekaan lingkungan di area tersebut.<sup>102</sup> Selain itu, Pemerintah Negara Sabah telah berkomitmen untuk melestarikan Lembah Maliau yang menetapkan daerah itu sebagai Perlindungan Kelas 1 sebagai Konservasi Warisan berdasarkan Pemberlakuan Konservasi Warisan Budaya 1977, sehingga ekstraksi cadangan batu bara di masa depan di wilayah ini akan memerlukan persetujuan legislatif.

Di antara sub-sektor pertambangan, pertambangan batu bara memiliki potensi dampak pada tanah yang paling signifikan di dalam HoB. Pemerintah Malaysia dan Indonesia memiliki rencana yang dikembangkan dengan baik untuk meningkatkan produksi batu baranya dari Borneo dan proposal ini perlu dievaluasi dengan seksama untuk melihat keseuaian dengan tujuan paralel untuk melestarikan dan mengelola HoB secara berkelanjutan dan meningkatkan andil dari sektor lain misalnya eko-wisata. Bagi produsen, sejumlah tindakan dapat diambil untuk mengurangi dampak negatif dan ini dibahas dalam bagian kedua bab ini.

## Pertambangan lain di Borneo

### Emas

Pada tahun 2007, produksi emas Malaysia yang dilaporkan adalah 3.497 kg<sup>103</sup>, tetapi tidak terdapat produksi emas komersial berskala besar di Sabah atau Sarawak.<sup>104</sup> Akan tetapi Departemen Mineral dan Geoscience telah mengakui potensinya, terutama di Bau, Sarawak Barat Daya, di mana penambang skala kecil telah beroperasi sejak abad ke-sembilanbelas.

Pertambangan emas berskala kecil di Kalimantan lebih tersebar luas dibandingkan di Sabah dan Sarawak, terutama karena deposit aluvial lebih umum. Operasi tambang emas berskala kecil seringkali beroperasi tanpa izin dan menggunakan teknik ilegal, seperti pemakaian air raksa untuk mengekstraksi emas. Air raksa adalah logam yang sangat beracun yang menetap di rantai makanan; kontaminasi aliran air mengakibatkan dampak yang signifikan bagi kesehatan dan sosial, serta menyebabkan kerusakan lingkungan.

<sup>100</sup> Business Monitor International, Laporan Pertambangan Indonesia kuartal 3, 2010

<sup>101</sup> Misalnya koalisi the Green SURF mengeluarkan petisi yang dijalankan oleh Land Empowerment Animals and People, Partners of Community Organisations, Sabah Environmental Protection Association, the Malaysian Nature Society Sabah Branch, dan the Sabah office of WWF-Malaysia.

<sup>102</sup> Menteri Utama Sabah Datuk Musa Aman sebagaimana dikutip dalam The Star, 2 April 2008 mengatakan "setelah pertimbangan yang mendalam, kami tidak dapat mengambil risiko dan menghancurkan lingkungan yang masih utuh. Kami perlu mencari sumber energi yang lebih ramah lingkungan."

<sup>103</sup> Penurunan hampir 20%

<sup>104</sup> Departemen Mineral dan Geosciences, Malaysia, 2010



GAMBAR 4.6: MENDULANG EMAS DI SUNGAI BORNEO

Di sisi lain, pertambangan emas skala besar di Kalimantan telah menurun, terutama sejak penutupan tambang emas dan perak Kelian milik Rio Tinto di Kalimantan Timur tahun 2003, yang telah memproduksi hampir 15 ton emas dan perak per tahun. Akan tetapi masih ada minat pada potensi untuk produksi di masa depan. Misalnya, desa Muara Asa di Kalimantan Timur dilaporkan memiliki total deposit bijih emas sebanyak 300 juta ton, menghasilkan 400mg emas per ton bijih. Selain itu, Waringin, Kalimantan Tengah, diperkirakan memiliki lebih dari 140 juta ton bijih emas.<sup>105</sup>

Deposit emas seringkali berbarengan dengan tembaga dan investasi masa depan dibuat berdasarkan hal ini; Kalimantan Gold Corporation mengumumkan pada akhir tahun 1990 bahwa ia akan menerbitkan tambahan saham untuk membiayai kelanjutan eksplorasi deposit tembaga dan emas di bagian tenggara HoB di Kalimantan Tengah, serta di luar perbatasan HoB, dekat Malinau, di Kalimantan Timur.<sup>106</sup>

Sementara dampak historis dari pertambangan emas skala besar di Borneo tampaknya relatif sudah berkurang, eksplorasi baru di Kalimantan, minat di Sarawak, dan kegiatan ilegal yang terus terjadi, ditambah dengan harga emas saat ini, mengarah ke peningkatan ancaman bagi HoB. Para penguasa perlu berhati-hati akan potensi dampak negatif dari pertambangan emas dari operasi skala kecil yang ada dan skala besar yang baru. Paruh kedua bab ini membahas sejumlah solusi terhadap dampak lingkungan dan sosial yang relevan bagi operator swasta.

## Intan

Penambangan intan dilakukan di Kalimantan dan Sarawak, terutama oleh penambang aluvial skala kecil. Laporan mengatakan bahwa sementara sebagian dari penambang ini memiliki izin, banyak yang liar. Juga terdapat tambang intan besar di Kalimantan Selatan, yang dimiliki oleh PT Galuh Cempaka. Menurut situs web perusahaan ini, diperkirakan terdapat 2,6 juta karat di dalam kerikil sebanyak 44,3 juta meter kubik. Keberadaan deposit intan di Borneo menandakan risiko bagi HoB, namun saat ini kelihatannya tidak ada rencana yang signifikan untuk mengembangkan deposit ini secara luas. Otoritas mungkin ingin memfokuskan pada pengaturan kegiatan skala kecil. Bagi calon produsen sejumlah solusi yang disebutkan pada paruh kedua bab ini juga akan sangat relevan.

<sup>105</sup> Business Monitor International, Laporan Pertambangan Indonesia kuartal 3, 2010

<sup>106</sup> <http://www.kalimantan.com/i/pdf/KLG-Admission-Doc.pdf>

## Meregulasi Pertambangan

Peraturan yang efektif merupakan bagian penting dari operasi pertambangan. Peraturan membantu menjamin operasi dilakukan dengan cara yang dapat mengurangi risiko berlebihan dari dampak negatif terhadap pihak ketiga. Dalam melakukan hal ini, peraturan membantu memaksimalkan manfaat ekonomi dari suatu operasi tanpa membahayakan atau mengorbankan kebutuhan ekonomi, lingkungan dan sosial orang lain.

Peraturan di Borneo, dan secara khusus di HoB, perlu membimbing perusahaan untuk menerapkan praktik yang berkelanjutan secara lingkungan dan sosial untuk mencegah konsekuensi negatif yang potensial ini.

Untuk memaksimalkan kepatuhan, peraturan perlu jelas dan ditegakkan. Salah satu tantangan yang disebutkan oleh perusahaan melalui konsultasi kami adalah isu-isu menyangkut peraturan daerah yang tidak jelas dan bertentangan. Desentralisasi di Indonesia telah memberikan tanggungjawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mempertahankan peraturan, namun upaya ini harus tetap dikoordinasikan.

Bagi para pembuat peraturan, tantangan paling besar seringkali ditemukan pada pemantauan operasi penambang skala kecil. Hal ini kurang begitu menonjol dibandingkan pertambangan skala besar, dan operasinya pada umumnya lebih banyak dan terpisah. Terlebih lagi, Otoritas Pertambangan Indonesia memperkirakan bahwa ketidakpastian dalam penguasaan lahan jangka panjang yang diperkenalkan oleh Undang-undang Pertambangan yang Baru akan menumbuhkan pertambangan skala kecil, karena pelaku internasional dicegah. Adalah penting agar para pembuat peraturan mengantisipasi perkembangan institusional yang diperlukan untuk mengatur dengan baik para pelaku tersebut.

Pertambangan liar menjadi keprihatinan khusus. Pertambangan liar beroperasi tanpa izin, dan sering menggunakan teknik yang tidak efisien serta mencemarkan dan kurang memerhatikan aspek-aspek pada kesehatan, keselamatan dan lingkungan. Kebanyakan penambang liar beroperasi pada skala kecil, akan tetapi terdapat sebagian operasi yang berskala lebih besar yang menghindari penegakan hukum. Satu operasi pertambangan batu bara liar dilaporkan memiliki 16 ekskavator dan 200 truk yang siap digunakan. Angka yang tepat sulit diukur tetapi penambang liar dianggap menghasilkan lebih dari 5% produksi batu bara di Kalimantan Selatan<sup>107</sup> pada tahun 2000, dan di seluruh Kalimantan dan Sumatera produksi batu bara ilegal diperkirakan sekitar 20 juta ton per tahun<sup>108</sup> saat ini. Para penambang ini mendegradasi konsesi sebelum operasi komersial dimulai, yang berakibat hilangnya penghasilan swasta dan hilangnya pendapatan pemerintah yang cukup besar. Pemerintah nasional dan daerah dapat berbuat lebih banyak untuk mengendalikan pengambilan keputusan informal dan menjamin bahwa penegakan undang-undang berlaku bagi semua operasi pertambangan.

Menelusuri asal muasal produk pertambangan cukup menantang, dan upaya pembendungan perdagangan hasil pertambangan ilegal dibatasi oleh permintaan dalam negeri dan internasional yang tinggi dan menyebar. Kemudahan di mana penambang liar bisa mendapatkan pasar bagi barang mereka kendati dengan praktik lingkungan dan sosial yang buruk di tempat barang tersebut diproduksi menandakan bahwa saat ini hanya terdapat sedikit insentif untuk memperbaiki kegiatan operasional mereka. Itulah sebabnya penting agar pemerintah berupaya untuk mengurangi pertambangan liar dan menegakkan peraturan.

<sup>107</sup> Indonesia: Menghadapi Tantangan, Pemerintah Australia, 2000

<sup>108</sup> Lucarelli, 2010, The history and future of Indonesia's coal industry: impact of politics and regulatory framework on industry structure and performance, Stanford Program on Energy and Sustainable Development.

# TANTANGAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL SERTA SOLUSINYA

Ambisi pemerintah untuk meningkatkan pertambangan batu bara di Borneo menuntut agar perhatian yang lebih teliti diberikan untuk masalah lingkungan dan sosial, khususnya mengingat hadirnya konsesi dan eksplorasi di dalam HoB.

Tanpa bimbingan pemerintah yang jelas dan penegakan peraturan yang ketat maka terdapat risiko yang signifikan sehingga tindakan-tindakan yang dilakukan tidak akan cukup untuk mempertahankan nilai hutan HoB dan mutu lingkungan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat setempat.

Tabel 4. 1 menunjukkan sebagian isu lingkungan kunci yang potensial yang dapat timbul dari pengelolaan kegiatan pertambangan yang buruk.

Hilangnya habitat	Pertambangan terbuka adalah lahan yang secara intensif memerlukan pemindahan habitat tanah yang luas dan hilangnya nilai ekosistem yang terkait. Sering juga terdapat dampak sekunder yang mengarah ke hilangnya habitat terkait dengan kegiatan tambang terbuka dan tambang bawah tanah. Hal ini mencakup pemindahan habitat secara langsung dan pemecahan habitat untuk membangun jalan akses atau infrastruktur rel. Meskipun bukan pemindahan habitat secara langsung, peningkatan kebisingan, getaran dan debu terkait dengan kegiatan pertambangan dapat menciptakan dampak negatif pada habitat yang berdekatan dengan lokasi pembangunan.
Pemindahan tanah dan degradasi tanah	Tanah dalam volume besar dan kelebihan beban diekstrak dan diproses dalam operasi pertambangan, dan hal ini dapat menghasilkan tailing (limbah) yang terkontaminasi sebagai produk turunan. Hal ini dapat menyebabkan degradasi tanah, erosi dan pencemaran, dan juga menghasilkan “geohazards” (bahaya geologi) seperti amblesan dan tanah longsor. Hal ini mengurangi produktivitas dan nilai tanah, dan juga dapat mengarah ke risiko keselamatan bagi masyarakat setempat.
Degradasi aliran air	Aliran limbah tambang dapat mempengaruhi mutu air melalui peningkatan sedimentasi di aliran air setempat dan membawa kontaminan. Bahkan tingkat air raksa dan sianida yang rendah (yang digunakan dalam pengolahan emas) beracun bagi kebanyakan satwa liar dan manusia. Limbah dapat membentuk asam melalui oksidasi yang merembes ke air bawah tanah dan masuk ke aliran air. Pembuangan ampas yang tidak diperlakukan dan aliran limbah pengolahan di lingkungan laut dangkal bisa mempunyai masalah tersendiri bagi ekosistem pantai dan perikanan yang didukungnya.
Konflik sosial, kesehatan dan pemindahan	Operasi tambang (baik yang legal maupun liar) menarik jumlah pekerja yang banyak dan pemukiman sementara serta ekonomi informal terkait. Hal ini dapat mendorong penyebaran penyakit menular (misalnya HIV-AIDS) dan penyakit-penyakit yang berjangkit dalam tempat tinggal pekerja yang berkualitas buruk yang juga dapat menyebar ke masyarakat setempat. Sering terjadi pergantian pekerja, yang sebagian disebabkan oleh efek kesehatan yang negatif dari air raksa dan sianida manakala zat-zat ini digunakan. Pada beberapa kejadian, kegiatan pertambangan memindahkan penduduk asli dan masyarakat setempat, yang menyebabkan konflik dengan perusahaan pertambangan menyangkut keamanan dan hak atas tanah.

TABEL 4. 1: POTENSI ISU LINGKUNGAN KARENA PENGELOLAAN KEGIATAN PERTAMBANGAN YANG BURUK

Sebagai bagian atau bersama-sama dengan tanggapan terhadap penggerak peraturan, terdapat sejumlah tindakan praktis yang dapat diambil oleh perusahaan pertambangan untuk mengurangi dampak lingkungan dan sosial yang mungkin ada. Kotak berikut memberi tanggapan terhadap permasalahan di atas, memperhatikan tantangan yang diangkat dalam beberapa konsultasi dan menganjurkan berbagai solusi praktis.

### Apa permasalahannya?

#### Hutan Bernilai Konservasi Tinggi

Hutan sangat berharga karena berbagai alasan: mengatur aliran air, mencegah banjir dan tanah longsor, menyimpan karbon dan menyediakan habitat bagi spesies yang terancam punah. Pembukaan hutan yang bernilai konservasi tinggi (HCVF) mengakibatkan pengurangan habitat dan kehilangan 80-90% spesies.<sup>109</sup> Habitat orang utan, misalnya, menurun 39% antara tahun 1992 sampai 2002.<sup>110</sup> Apabila kawasan yang berharga untuk konservasi tidak diidentifikasi dan kegiatan pertambangan tidak dihindari pada dan di dekat HCVF maka kehilangan nilai hutan dapat lebih banyak daripada manfaat dari pertambangan.

### Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Pertambangan tidak begitu padat lahan** – “Operasi pertambangan mempunyai kebutuhan akan lahan yang lebih sedikit ketimbang kelapa sawit atau kehutanan jadi apakah HCVF merupakan suatu isu penting bagi kami?”

**Perlu layanan yang lebih baik dan lebih cepat untuk mengidentifikasi dan mengelola Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVA)** – penilaian HCVA bisa merupakan proses yang lambat di Borneo disebabkan kurangnya tenaga penilai, dan terdapat kebutuhan untuk pedoman manajemen khusus industri yang lebih baik.

**Kerjasama untuk konservasi** – Koridor satwa liar dan inisiatif konservasi perlu direncanakan pada tingkat lanskap yang membutuhkan kerjasama dari multi-pemangku kepentingan yang cukup rumit.

**Membatasi akses** – “Pelaku ilegal mendatangkan nama buruk bagi industri ini” – HCVF seringkali berada di area yang relatif terpencil; membatasi akses dari pelaku skala kecil dan ilegal dapat menyebabkan konflik dan bisa menjadi padat sumber.

### Solusi dan petunjuk

Kendati sejauh ini menciptakan jejak lingkungan yang lebih kecil daripada sektor lain di HoB, kegiatan pertambangan masih perlu menghindari pembangunan yang memberi dampak merugikan bagi kawasan HCVF. Distribusi dan lokalitas HCVF perlu dipertimbangkan sebelum alokasi konsesi dan jauh sebelum pembukaan hutan dan operasi pertambangan dimulai. Untuk memfasilitasi hal ini, sektor swasta dan pembuat peraturan sama-sama akan mendapat manfaat dari basis data dan peralatan untuk perencanaan tata ruang yang mengindikasikan adanya HCVF. Dalam situasi di mana pemecahan habitat tidak dapat dihindari, koridor satwa liar yang menghubungkan hutan-hutan yang terpecah harus dibuat untuk menghubungkan populasi satwa liar. WWF merekomendasikan agar konsesi baru tidak diberikan untuk hutan primer atau kawasan lain yang diperlukan untuk menjaga atau meningkatkan HCVF.

Lihat [www.hcvnetwork.org](http://www.hcvnetwork.org) untuk alat dan pedoman terkini untuk identifikasi dan manajemen HCVF.

<sup>109</sup> WWF, 2005

<sup>110</sup> Husson S. et al: The Status Of The Orang-utan In Indonesia; Report to the Orang-utan Foundation, UK, 2003



**GAMBAR 4.7: ILMUWAN INDONESIA MELAKUKAN SURVEI MAMALIA KECIL DI AREA KONTRAK BATU BARA BHP BILLITON DIBANTU OLEH ASISTEN LINGKUNGAN BHP**

## **STUDI KASUS: INDOMET COAL BIODIVERSITY STRATEGY DARI BHP BILLITON**

### **Permasalahan**

IndoMet Coal Project (IMC) dari BHP Billiton, yang terletak di dalam Lembah Maruwai di Kalimantan Tengah, berada pada tahap Studi Pra-kelayakan. IMC berusaha untuk memanfaatkan konservasi keanekaragaman hayati di Kalimantan yang berada di area operasi BHP Billiton dan dengan mendukung kegiatan konservasi berbasis luas di wilayah tersebut. Untuk lebih memahami tantangan di area tersebut sebelum penambangan dimulai, IMC telah melakukan lebih dari 10 survei keanekaragaman hayati dan analisa nilai konservasi tinggi (HCV) tingkat lanskap untuk keseluruhan Lembah Maruwai, mengerahkan bantuan dari ilmuwan nasional dan internasional dan LSM. Penilaian keanekaragaman hayati pertama dimulai pada tahun 1999 dan tanggal mulai pembangunan dan penambangan akan bergantung pada hasil dari tahap studi Seleksi dan Definisi, dan dengan memperhatikan persyaratan pembangunan yang tertuang dalam Kontrak Karya Batu Bara (CCOW) dan persyaratan hukum Indonesia dan persetujuan Pemerintah.

### **Tanggapan**

IMC merumuskan “the Indomet Coal Project Biodiversity Strategy”, diterapkan melalui praktik industri terkemuka dan proyek berorientasi keanekaragaman hayati. Rencana tersebut memerlukan prosedur dan sistem keanekaragaman hayati yang menyeluruh di seluruh area operasi IMC. Misalnya, rencana keanekaragaman hayati dan prosedur rekayasa dikembangkan untuk masing-masing tambang dan unsur infrastruktur utama, memasukkan informasi keanekaragaman hayati khusus yang dikumpulkan dari survei. Setiap rencana menyertakan faktor rancangan teknis, pengesampingan habitat, rencana regenerasi khusus, persyaratan khusus spesies dan persyaratan penutupan.

### **Hasilnya**

Karena BHP Billiton memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan di sekitar proyek IMC maka ia mampu merespon dengan strategi manajemen yang tepat. Misalnya, BHP Billiton melakukan serangkaian lokakarya dengan LSM terkemuka untuk membangun pemahaman tentang tekanan dan kepekaan dengan kelompok setempat dan pembuat peraturan. BHP Billiton dan Fauna and Flora International (FFI) telah bekerjasama sejak 2007, dan pada tahun 2010 memulai suatu kemitraan untuk meningkatkan pemahaman atas kawasan bernilai konservasi tinggi di dalam wilayah Murung Raya dengan tujuan untuk membangun konservasi dan strategi pembangunan yang berkelanjutan untuk wilayah itu. Selain itu, BHP Billiton telah mendukung the Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) dalam mengembalikan 149 orangutan yang diselamatkan ke hutan di sekitar area proyek serta di bagian lain Kalimantan Tengah.

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Analisa Mengenai Dampak Lingkungan

Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (EIA) (juga dikenal sebagai AMDAL di Indonesia) adalah persyaratan hukum di ketiga wilayah di Borneo, dan merupakan prasyarat wajib sebelum memulai operasi penambangan. Walaupun ada persyaratan ini, masih terdapat sejumlah tantangan untuk menjamin bahwa EIA cukup menganalisa dan mengurangi dampak lingkungan terkait dengan pembangunan tambang di HoB.

**Biaya untuk melakukan EIA** - EIA memerlukan tambahan biaya sebelum proyek dimulai yang bisa menjadi beban bagi perusahaan kecil.

**Insentif perlu disediakan oleh pemerintah** - “Perusahaan hanya dapat diharapkan mengikuti persyaratan yang ditetapkan bagi mereka oleh pembuat peraturan.” - Pembuat peraturan perlu memberikan pedoman yang jelas, dan menegakkannya dengan lebih efektif untuk memberikan insentif bagi perusahaan untuk membuat EIA yang terperinci.

EIA harus mengidentifikasi potensi isu lingkungan dan sosial terkait kegiatan penambangan jauh sebelum operasi penambangan itu sendiri dan EIA harus ditinjau kembali dan disetujui oleh pembuat peraturan setempat sebelum kegiatan dimulai.

Pengembang tambang (skala kecil dan besar) dapat menggunakan praktik terbaik global untuk EIA, termasuk:

- Pemilihan lokasi yang diberitahukan sebelumnya: EIA harus dianggap sebagai “alat seleksi lokasi” dan harus dimulai seawal mungkin pada tahap eksplorasi dan pra-kelayakan dari perencanaan tambang.
- Pemakaian “hirarki mitigasi”: EIA harus mengikuti hirarki mitigasi (suatu konsep yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan secara keseluruhan) dengan pertama-tama mencegah atau menghindari dampak lingkungan yang merugikan menggunakan seleksi lokasi yang tepat dan memeriksa lokasi alternatif; kemudian berusaha meminimalkan atau mengurangi dampak dengan menggunakan ukuran-ukuran mitigasi, dan kemudian memperbaiki atau mengembalikan efek residual yang merugikan, secara potensial menggunakan kompensasi keanekaragaman hayati.
- Partisipatif: EIA harus memberikan kesempatan awal dan tepat untuk menginformasikan dan melibatkan pemangku kepentingan yang berkepentingan dan terkena pengaruh, dan masukan serta keprihatinan mereka harus ditangani secara eksplisit dalam pembuatan keputusan. Hal ini penting ketika mempertimbangkan masyarakat asli dan minoritas lain yang rentan yang tradisi budayanya mungkin terancam.
- Pemantauan yang efektif: Pemantauan (baik pada fase operasi maupun pasca-penutupan) sangat penting untuk menjamin bahwa tindakan mitigasi yang diterapkan efektif dalam mencegah dampak lingkungan yang signifikan. Tindakan mitigasi (yang mungkin didokumentasikan dalam sebuah Tindakan Aksi Keanekaragaman Hayati atau Lingkungan) perlu dilihat kembali secara reguler, dan dalam waktu yang berbeda untuk menjamin efektivitasnya.

Informasi lebih lanjut mengenai cara melakukan EIA yang efektif dan mendapatkan persetujuan yang tepat waktu dapat diperoleh melalui instansi dan departemen pemerintah berikut ini:

- International Association for Impact Assessment: [www.iaia.org](http://www.iaia.org)
- Malaysian EIA guidance: [www.doe.gov.my/old/?q=ms/content/environmental-impact-assessment-eia](http://www.doe.gov.my/old/?q=ms/content/environmental-impact-assessment-eia)
- Indonesia AMDAL guidance: <http://bapedalda-diy.go.id>
- Brunei baru-baru ini telah menerapkan peraturan tentang EIA, yang harus disetujui oleh Kementerian Pembangunan: [www.mod.gov.bn](http://www.mod.gov.bn)

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Pemakaian air raksa

Air raksa adalah logam yang apabila dihirup atau diserap sangatlah beracun bagi manusia dan satwa liar. Pemakaian air raksa dalam penambangan emas dilarang baik di Malaysia maupun di Indonesia; akan tetapi, pemakaian terus dilakukan di antara banyak penambang skala kecil dan operasi liar. Di Kalimantan Tengah, lebih dari 50.000 kg diperkirakan dikeluarkan ke lingkungan setiap tahun dalam satu lokasi saja.<sup>111</sup>

**Diperlukan alternatif** - “Penambangan memberikan pendapatan, dan pemakaian air raksa meningkatkan hasil, apa alternatifnya?”

Sejumlah kelompok sedang membantu penambang skala kecil untuk mengurangi dampak negatif pada kesehatan dari pemakaian air raksa, dan secara potensial mencari sumber pendapatan alternatif termasuk:

- Sebuah inisiatif yang dipimpin PBB, the Global Mercury Project, sedang bekerja di Kalimantan untuk mengurangi pemakaian air raksa dan memberikan teknologi daur ulang air raksa bagi para penambang: [http://www.globalmercuryproject.org/countries/indonesia/indonesia.htm#Indo\\_Newsletters](http://www.globalmercuryproject.org/countries/indonesia/indonesia.htm#Indo_Newsletters)
- Yayasan Tambuhak Sinta sekarang sedang bekerjasama dengan pemerintah, LSM dan agen donor di 50 desa di wilayah Gunung Mas. Proyek ini membantu desa-desa untuk mengembangkan dan menerapkan “kelompok kehidupan ekonomi” (economic livelihood group): [http://project-activities.susiladharm.org/location\\_asia\\_oceania/yaysan\\_tambahak\\_sinta.shtml](http://project-activities.susiladharm.org/location_asia_oceania/yaysan_tambahak_sinta.shtml)

### STUDI KASUS INTERNASIONAL - ORO VERDE: SKEMA SERTIFIKASI PERTAMBANGAN SKALA KECIL KOLUMBIA

Sebagai respons atas dampak negatif dari kegiatan penambangan yang tidak dikendalikan pada lingkungan dan masyarakat di Chocó Bioregion Kolumbia, the Oro Verde, atau inisiatif Green Gold telah berhasil mengembangkan dan mendorong teknik pertambangan skala kecil yang berkelanjutan untuk membalikkan tren. Di bawah skema tersebut, pemakaian air raksa dan sianida dilarang, dan sebagai gantinya mengandalkan teknik penyaringan dan pendulangan untuk memisahkan emas dan platinum dari sedimen lainnya. Selain itu, perencanaan yang baik dan waktu ekstraksi sedimen dan pencucian didorong untuk menghindari erosi dan degradasi daerah aliran sungai.

Inisiatif ini mencakup lebih dari 140.000 ha, yang dari kegiatan tersebut masyarakat dan lingkungan memperoleh manfaat.

Penambang harus mematuhi kriteria lingkungan dan sosial untuk ikut serta dalam skema tersebut, dan sebaliknya mereka menerima harga yang dijamin untuk produksi mereka. Produksi yang berkelanjutan memungkinkan emas mendapatkan premi di pasar, dan keuntungannya diteruskan kepada produsen dan masyarakat:

- 10% diberikan kepada penambang yang bersertifikasi sebagai insentif ekonomi langsung untuk jasa lingkungan.
- 30% memungkinkan sayap komersial dari program itu untuk dapat dipertahankan.
- 60% diinvestasikan kembali di wilayah tersebut dalam proyek pembangunan.

<sup>111</sup> Kabar Itah, Agustus 2010

## Apa permasalahannya?

### Rehabilitasi Tambang

Kegiatan penambangan hanya memerlukan pemakaian lahan untuk sementara dan begitu sumberdaya yang berharga telah diekstraksi maka sangatlah vital agar area tersebut dikembalikan ke keadaan seperti semula. Rencana rehabilitasi tambang harus dibuat sebelum kegiatan penambangan dimulai, dan disetujui untuk setiap tambang sebagai bagian dari EIA. Oleh sebab itu, biaya untuk rehabilitasi harus dimasukkan dalam biaya operasi tambang sejak awal.

Rencana untuk reklamasi dan rehabilitasi tambang akan mencakup penyediaan penilaian pra-penambangan, penyimpanan sedimen dan tanah bagian atas selama kegiatan penambangan, dan suatu strategi untuk mengembalikan tanah yang dipindahkan, dengan gangguan seminimum mungkin, dan menanam kembali area tersebut untuk mendorong regenerasi alamiah. Selain itu, upaya rehabilitasi harus dipantau untuk melacak perkembangan dan menjamin bahwa tidak ada efek yang merugikan misalnya pencemaran tanah.

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Kapasitas teknik** - “Banyak penambang skala kecil tidak mempunyai kapasitas teknik atau sumberdaya yang tersedia untuk melakukan rehabilitasi tambang”

**Penguasaan** - “Penguasaan yang tidak pasti mengurangi insentif untuk melakukan banyak upaya untuk rehabilitasi tambang sebelum operasi dimulai”

## Solusi dan petunjuk

Pedoman praktik yang baik dapat diperoleh melalui rujukan di kotak solusi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan di atas.

Studi kasus di bawah ini memberikan suatu contoh tentang praktik yang baik untuk analisa dan perencanaan pra-operasi untuk rehabilitasi lokasi di masa datang.

## STUDI KASUS - RENCANA REHABILITASI TAMBANG PT INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK

### Permasalahan

PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITM) berusaha melindungi habitat alam dan keanekaragaman hayati di area konsesinya. Mengakui nilai dan kepekaan HoB, maka ITM melakukan analisa lokasi yang rinci di konsesi tambang batu bara Bharinto Ekatama mereka. Operasi penambangan memerlukan pemindahan sebagian habitat hutan, namun dampak jangka panjangnya dapat diminimalkan melalui analisa pra-proyek yang baik dan mendalam serta rehabilitasi lokasi pasca-proyek.

### Tanggapan

Sebagai bagian dari analisa pra-proyek mereka di konsesi Bharinto mereka, ITM berkolaborasi dengan Purwodadi Botanical Gardens untuk melaksanakan studi lapangan untuk memeriksa keanekaragaman hayati di area tersebut, yang menghasilkan sediaan tentang tumbuhan dan binatang dan mengukur simpanan karbon. Perhatian khusus diberikan pada berbagai jenis anggrek liar, karena tumbuhan ini peka terhadap perubahan lingkungan, dan dapat dipakai sebagai indikator kesehatan lingkungan dari suatu area. Masyarakat setempat diwawancarai untuk menganalisa kebutuhan mereka yang berbeda dan penggunaan tanaman setempat. Menggunakan informasi ini, maka contoh tanaman dikumpulkan dan dipindahkan ke lokasi sementara untuk dipelihara. Setelah operasi penambangan selesai dan selama rehabilitasi area tersebut maka permukaan tanah yang dipindahkan akan ditimbun kembali dan stok tanaman ini akan dipakai untuk menanam kembali lokasi tersebut, membantu untuk mengembalikannya ke keadaan alamnya seperti semula. Pemantauan terus-menerus akan dilakukan, beserta analisa genetik dari keanekaragaman tumbuhan di lokasi yang direhabilitasi.

### Hasilnya

ITM berencana untuk menggunakan informasi tersebut tentang lokasi beserta sampel yang dikumpulkan untuk meminimalkan dampak dari operasinya dan memaksimalkan kecepatan di mana area tersebut dikembalikan ke keadaan alamnya begitu operasi selesai. Melalui keterlibatan dengan masyarakat setempat, ITM bertujuan untuk menjamin bahwa mereka memperhatikan kebutuhan dan persyaratan dari masyarakat tersebut. Selain itu ITM membantu mendidik masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan pemakaian yang berkelanjutan.



GAMBAR 4. 8: BORNEO ADALAH TEMPAT TINGGAL BAGI BANYAK SPESIES ANGGREK LANGKA

## Apa permasalahannya?

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

## Solusi dan petunjuk

### Keuangan yang Bertanggungjawab

Perusahaan pertambangan, khususnya yang didanai oleh bank komersial multi-nasional, diwajibkan oleh penyandang dananya untuk menunjukkan manajemen yang tepat untuk dampak lingkungan dan sosial. Untuk pembangunan tambang yang didanai oleh keuangan proyek (project finance), komitmen lingkungan dan sosial ini sering dibentuk berdasarkan Equator Principles.

Khususnya di HoB (namun juga umum di seluruh dunia) terdapat beberapa tantangan dengan pendekatan yang ada saat ini:

- Pembangunan dan perluasan tambang dapat didanai menggunakan fasilitas pinjaman korporat ketimbang pendanaan proyek yang berarti bahwa pemakaian dana tidak selalu diketahui oleh bank. Bank mendapatkan kesulitan menerapkan Equator Principles untuk jenis fasilitas ini dan oleh sebab itu mendapatkan tantangan untuk menjamin pembangunan tambang yang bertanggungjawab.
- Pembangunan atau perluasan tambang dapat didukung oleh bank setempat atau bank nasional Indonesia atau Malaysia yang bukan penandatanganan Equator Principles, atau mempunyai fungsi manajemen risiko lingkungan dan sosial yang terbatas.
- Bahkan apabila perluasan atau pembangunan tambang didukung oleh bank dengan fungsi manajemen lingkungan dan sosial dan prosedur penyaringan risiko terkemuka, bank ditantang untuk bagaimana secara praktis dan pragmatis menerapkan komitmen ini, dan khususnya mengidentifikasi area yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati yang tinggi (misalnya Hutan Bernilai Konservasi Tinggi) dalam proyek atau portfolio klien mereka.

**Kriteria investasi** – “Kinerja yang berkelanjutan dapat mempengaruhi kemampuan kami untuk menarik investasi atau mendapatkan keuangan proyek” – Produsen yang lebih besar yang mencari investasi mendapati kriteria peminjaman yang bertanggungjawab sebagai insentif yang penting untuk bertindak.

**Perlu pembelian kembali (buy-in) yang lebih besar dari pemangku kepentingan** – Investor bisnis yang lebih kecil seringkali tidak begitu memperhatikan masalah keberlanjutan, dan kontraktor perlu diajak untuk bergabung.

**Mendorong bank setempat untuk mengadopsi Equator Principles:** Lebih banyak bank di wilayah tersebut didorong untuk menjadi penandatanganan Equator Principles. Walaupun sukarela, Equator Principles merupakan standar de facto di seluruh sektor keuangan untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko sosial dan lingkungan dalam keuangan proyek. Equator Principles didukung oleh Standar Kinerja (PS) dari International Finance Corporation (IFC) yang memberikan pedoman terperinci untuk bank dan nasabah mereka untuk mengelola dampak sosial dan lingkungan. Misalnya PS1 (Penilaian Sosial dan Lingkungan dan Sistem Manajemen), PS3 (Pencegahan dan Pengurangan Polusi) dan PS 6 (Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Manajemen Sumberdaya Alam yang Berkelanjutan) kemungkinan besar sangat relevan bagi perusahaan pertambangan di HoB. Sebagai tambahan pada Standar Kinerja, IFC telah mengembangkan Pedoman Industri Pertambangan khusus yang harus didorong oleh bank untuk dipatuhi oleh nasabahnya: [http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui\\_EHSGuidelines2007\\_Mining/\\$FILE/Final+-+Mining.pdf](http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf)

**Alat risiko keanekaragaman hayati spasial:** WWF dapat membantu untuk mendukung para penyandang dana dalam mengidentifikasi dan menghindari area yang mempunyai nilai keanekaragaman hayati tinggi. WWF saat ini sedang berdiskusi dengan penyandang dana kunci untuk mengembangkan alat pemetaan ruang yang mengidentifikasi, misalnya, Hutan Bernilai Konservasi Tinggi dan area yang dilindungi. Silahkan kunjungi situs web kami untuk rincian dari perkembangan kami.

## Apa permasalahannya?

### Insentif Finansial Baru

Hutan dan sungai memberikan jasa ekosistem yang berharga bagi masyarakat; akan tetapi, perusahaan swasta tidak selalu mempertimbangkan nilai-nilai ini ketika membuat keputusan untuk melindungi lingkungan selama operasi penambangan. Insentif finansial baru sedang diterapkan untuk mendorong pertimbangan yang lebih luas mengenai nilai hutan publik oleh sektor swasta.

Berbagai insentif keuangan tersedia bagi perusahaan pertambangan untuk mendukung mereka dalam transisi ke produksi yang lebih berkelanjutan. Ini termasuk pembayaran untuk jasa ekosistem, pembayaran untuk emisi karbon yang dikurangi melalui Clean Development Mechanism (CDM) dan Reduced Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD+). Banyak dari insentif ini sedang dikembangkan, tetapi ada momentum yang cukup di bidang ini dan prospek pertumbuhan yang baik.

Misalnya, pasar karbon saat ini menyediakan pembayaran untuk emisi karbon yang dikurangi dengan mengadakan kredit karbon berdasarkan CDM yang kemudian dapat dijual di pasar karbon. Di bawah CDM, perusahaan tambang batu bara dapat menerima pembayaran untuk proyek yang mengurangi emisi metana batu bara misalnya. Saat ini tidak ada program sejenis ini yang aktif di Borneo, akan tetapi, sejumlah produsen batu bara di Cina dan India sedang mendapatkan keuntungan melalui proyek seperti ini.

Selain itu, perusahaan pertambangan bisa menerima pembayaran dari REDD+ atas upayanya meminimalkan kerusakan hutan dan kegiatan restorasi hutan bila mereka dapat menunjukkan (sesuai dengan metodologi yang sedang dikembangkan) bahwa mereka membantu mengurangi emisi.

## Apa yang Anda beritahukan kepada kami?

**Biaya untuk keberlanjutan** – “Mengubah praktik manajemen dan memasukkan faktor keberlanjutan adalah mahal”

**Insentif yang bersifat aturan** – Lebih dari 80% orang yang diwawancarai berpendapat bahwa keberlanjutan perlu didorong dan ditegakkan melalui peraturan pemerintah.

**Insentif finansial** – LSM dan pemerintah perlu membantu para produsen untuk mempelajari tentang insentif finansial baru yang tersedia dan bagaimana memanfaatkannya.

## Solusi dan petunjuk

Sementara pedoman dasar untuk praktik yang berkelanjutan perlu diatur melalui pembuat peraturan, perusahaan pertambangan juga dapat diberi penghargaan secara finansial untuk kegiatan tertentu melalui sistem insentif nasional dan internasional. Insentif ini dapat mewakili peningkatan yang signifikan dalam pendapatan, sehingga mengoperasikan tambang secara lebih berkelanjutan meningkatkan keuntungan tambang.

Misalnya, Fuxin Coal Mine di Cina mengadakan proyek CDM dan akan menerima kredit untuk penangkapan metana batu bara dan gas rumah kaca yang kuat, yang sebelumnya dilepaskan ke udara. Proyek ini diharapkan akan menghindari emisi lebih dari 600.000 tCO<sub>2</sub>e setiap tahun<sup>112</sup>, senilai USD 9,6 juta dalam kredit karbon.<sup>113</sup> Perusahaan tidak hanya akan mendapat manfaat secara finansial dari penjualan kredit karbon; metana yang ditangkap juga akan dipakai untuk menghasilkan listrik, sehingga mengurangi biaya operasionalnya.

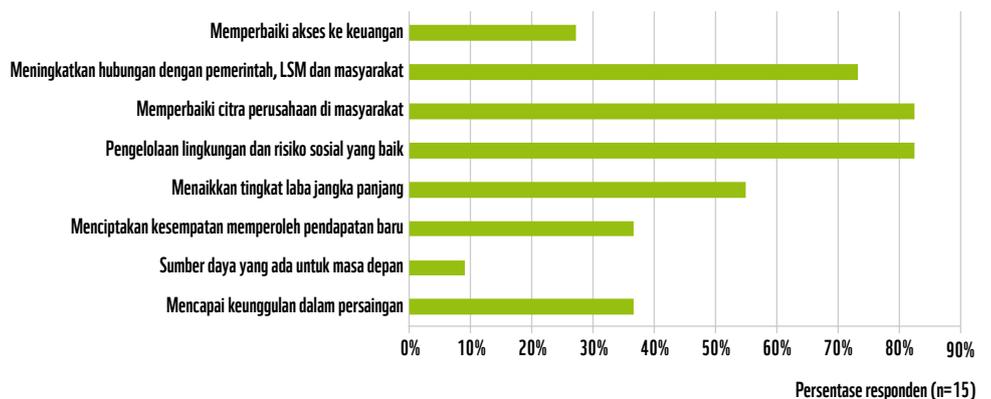
<sup>112</sup> <http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/DNV-CUK1214932135.8/view>

<sup>113</sup> 26/11/2010: harga CER Euro 12,26 (Bluenext.eu) = circa USD 16 \* 600.000 CERs = USD 9,6 juta (tidak didiskon)

## Kasus bisnis untuk pertambangan yang bertanggungjawab di Borneo

Untuk mewujudkan visi pemerintah untuk HoB maka penting agar prinsip keberlanjutan lingkungan dipegang oleh sektor pertambangan di Borneo. Masalah ekonomi untuk mengurangi degradasi tanah dan memperbaiki praktik lingkungan semakin diakui di tingkat nasional dan internasional berdasarkan jasa yang berharga yang diberikan oleh lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Masalahnya lebih kompleks untuk masing-masing perusahaan. Berbagai tantangan, sering dikaitkan dengan kurangnya penegakan hukum dan kapasitas teknis, telah diidentifikasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan dan ini dibahas dalam bagian sebelumnya. Sekalipun terdapat tantangan-tantangan ini, manfaat bisnis dari perbaikan praktik lingkungan semakin diakui oleh perusahaan pertambangan di Borneo.



GAMBAR 4.9: MANFAAT DARI PRAKTIK LINGKUNGAN DAN SOSIAL YANG BAIK SEBAGAIMANA DILAPORKAN OLEH PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BORNEO

Gambar 4.9 didasarkan pada wawancara dan survei dengan 15 responden dari perusahaan pertambangan yang beroperasi di Borneo. Sebanyak 82% dari kelompok ini menyebutkan manajemen risiko lingkungan dan sosial yang baik sebagai manfaat dari kegiatan yang berkelanjutan dan jumlah yang sama berpendapat bahwa perusahaan mereka akan mendapat manfaat dari citra publik yang baik. Hampir dua pertiga (73%) dari responden merasa bahwa kegiatan yang berkesinambungan memperbaiki hubungan mereka dengan pemerintah, LSM dan kelompok masyarakat dan mungkin terkait dengan ini, 64% melihat menurunnya risiko menjadi target kampanye negatif dari media. Lebih dari separuh (55%) perusahaan pertambangan merasa bahwa kegiatan yang berkelanjutan akan meningkatkan profitabilitas jangka panjang mereka.

Lebih jauh, sebagaimana disebutkan dalam kotak solusi pada halaman sebelumnya; dari penegakan yang diperketat atas peraturan yang ada dan persyaratan pembiayaan yang baru dari pemberi pinjaman; sampai pada respons kompetitor yang keras tentang manajemen keanekaragaman hayati; banyak faktor muncul bersama-sama untuk memperkuat kasus bisnis untuk pertambangan yang bertanggungjawab di Borneo.

# KONTAK WWF

---

## Situs web Green Business Network:

[wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork](http://wwf.panda.org/borneo/greenbusinessnetwork)

## Alamat email Green Business Network:

[borneo.gbn@wwf.panda.org](mailto:borneo.gbn@wwf.panda.org)

Anda juga dapat menghubungi para ahli kami secara langsung:

	<p><b>WWF Indonesia</b> Irwan Gunawan Corporate Engagement Manager <a href="mailto:igunawan@wwf.or.id">igunawan@wwf.or.id</a></p>
---	---

	<p><b>WWF Indonesia</b> Katie Stafford Head of Corporate Engagement for the HoB <a href="mailto:kstafford@wwf.or.id">kstafford@wwf.or.id</a></p>
---	--

	<p><b>WWF Malaysia</b> Ivy Wong National Coordinator for the HoB Initiative in WWF Malaysia <a href="mailto:iwong@wwf.org.my">iwong@wwf.org.my</a></p>
---	--



